



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **DATA UMUM**

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

#### **LETAK GEOGRAFIS**

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.631,35 Km<sup>2</sup> atau 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 Km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 Km<sup>2</sup>, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 127,00 Km<sup>2</sup>.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

#### **PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 350.007 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 106,4 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 889 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 307 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 301 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2022 adalah sebanyak 67,97 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 72,27% j dan 3,52% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 48,82% disusul sektor perdagangan sebesar 19,54% dan sektor jasa kemasyarakatan, social dan perorangan yang mencapai 13,05%.

#### **SUMBER DAYA LAHAN**

Tahun 2022 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan kering menurut jenis penggunaannya seluas 24.175 Ha serta bukan tanah seluas 47.351 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 20.014 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2022 mencapai 12.622 ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2022 sebesar 14.894.



## **SUMBER DAYA HUTAN**

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebesar 127.101,73 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.849,98 Ha, kawasan hutan produksi 85.802,01 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.449,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.719,88 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.053,28 Ha.

## **SUMBER DAYA AIR**

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2022 berkisar antara 33,4°C sampai 34,7°C, temperatur minimum berkisar antara 21,1°C sampai 22,9°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,9°C sampai 29,0°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 113,6 mm sampai 407,3 mm dengan jumlah hari hujan antara 12 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juli hingga September, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan Oktober hingga Juni, meskipun beberapa waktu kebelakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

## **SUMBER DAYA MINERAL**

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi seorang wakil bupati. Sejak Tahun 1966 telah terjadi tiga belas kali pergantian jabatan bupati. Saat ini Bupati Tanah Laut dipimpin oleh Drs. H. Sukamta, M.A.P dengan wakilnya H. Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 5 September 2018. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada Tahun 2010 juga telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dimana terjadi perubahan pada SKPD Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut diatas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

Laut dimana terjadi perubahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi Inspektorat Kabupaten, serta kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, begitu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang semula dihapus kemudian disisipkan kembali dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut, dan terakhir kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, mengikuti arah dan pedoman sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga penataan organisasi dapat efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Pariwisata;
- 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 23) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 24) Badan Pendapatan Daerah;
- 25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 29) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 30) Kecamatan Pelaihari;
- 31) Kecamatan Tambang Ulang;
- 32) Kecamatan Kurau;
- 33) Kecamatan Bati Bati;
- 34) Kecamatan Batu Ampar;
- 35) Kecamatan Panyipatan;
- 36) Kecamatan Takisung;
- 37) Kecamatan Jorong;
- 38) Kecamatan Kintap;
- 39) Kecamatan Bajuin;
- 40) Kecamatan Bumi Makmur.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan pola tata kelola di 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pada UPT Puskesmas Asam-Asam, UPT Puskesmas Batakan, UPT Puskesmas Bumi Makmur, UPT Puskesmas Jorong, UPT Puskesmas Kait-Kait, UPT Puskesmas Kintap, UPT Puskesmas Padang Luas, UPT Puskesmas Panyipatan, UPT Puskesmas Pelaihari, UPT Puskesmas Sungai Cuka, UPT Puskesmas Sungai Riam, UPT Puskesmas Tambang Ulang, UPT Puskesmas Takisung, UPT Puskesmas Tanjung Habulu, UPT Puskesmas Tirta Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/944-KUM/2020 tanggal 30 Desember 2020 namun efektif pada tanggal 1 April 2021. Pada tahun 2022 terdapat lagi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/437-KUM/2022 tentang Penetapan 2 (dua) unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dan 1 (satu) unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 14 Januari 2022, yaitu UPT Puskesmas Bentok Kampung, UPT Puskesmas Durian Bungkok dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 tahun 2018 terdapat perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yaitu pada 236 (dua ratus tiga puluh enam) Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pada 48 (empat puluh delapan) Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2020. Kemudian di tahun 2019 telah didirikan satuan pendidikan baru SMPN 6 Kintap di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/606-KUM/2019. .

## **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.



Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

- 21) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMRINTAH DAERAH**

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi
	4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keaunagn pemerintah daerah
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan-LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR

#### PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 EKONOMI MAKRO/EKONOMI REGIONAL

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tanah Laut Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- 1) Tingkat Kemiskinan sebesar 3,86%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,17%.
- 3) Gini Ratio sebesar 0,26%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,35%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,12%;
- 6) Tingkat Inflasi sebesar 6,98%;
- 7) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp19.019.180.

##### 2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Kab/Kota (%)	4,57	3,86	(0,71)
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	15,86	13,54	(2,32)
3	Provinsi (%)	7,62	4,49	3,13
4	Nasional (%)	9,22	9,57	0,35
5	Peringkat Provinsi	9,00	11,00	turun
6	Peringkat Nasional	480,00	409,00	naik

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 sebesar 3,86% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 4,57% Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,68	0,37	(0,31)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,67	0,63	(0,04)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	(0,11)
4	Peringkat Provinsi	4,00	9,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

**Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,14	0,06	(0,08)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,13	0,15	(0,02)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	(0,04)
4	Peringkat Provinsi	3,00	11,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

## 2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 4,17%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,52	4,17	(0,65)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,95	4,74	(0,21)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,90	0,59
4	Peringkat Provinsi	10,00	17,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,17%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,52%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021.

Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut masih lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

### 2.1.3 INDEKS GINI (GINI RATIO)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 0,26 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/ Kota	0,22	0,26	0,04
2	Tingkat Provinsi	0,33	0,31	(0,02)
3	Tingkat Nasional	0,38	0,38	0
4	Peringkat Provinsi	5	11	turun
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tanah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,26 Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,22 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

### 2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah ( $< 60$ )
- 2) Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- 3) Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- 4) Sangat Tinggi ( $> 80$ )

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 70,35 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut**

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	69,87	70,35	0,48
2	Provinsi	71,28	71,84	0,56
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	7,00	7,00	tetap
5	Peringkat Nasional	245,00	251,00	turun

*Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut*

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 70,35 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 69,87 poin mengalami kenaikan sebesar 0,48 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita .

IPM di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini berada pada urutan 7 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada urutan 251 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 21 dari 34 Provinsi di Indonesia.

### 2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut**

No.	IPM (Tingkat)	Kabupaten/Kota			Provinsi Tahun 2022	Nasional Tahun 2022
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	PDRB Menurut Jenis Pengeluaran (harga konstan 2010) (Rp)	10.370.457,25	179.151.113,73	179.151.113,73	179.151.113,73	15.434,20
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(1,95)	3,47	5,12	5,11	5,31
3	Peringkat Provinsi	10,00	3,00	6,00	3,00	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

*Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut*

Selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan 5,12%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kab Tanah Laut menempati urutan 3 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

### 2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Kemudian (iv) Hiperinflasi (*hyper inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 6,98% dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut (%)	3,07 (Banjarmasin)	6,98 (Banjarmasin)	3,91
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,07	6,99	3,92
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	5,51	2,79

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,99%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,07%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tanah Laut sama dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan namun lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 5,51%.

### 2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Milyaran**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2.765,38	2.962,56
2	Pertambangan dan Penggalian	3.340,95	6.523,43
3	Industri Pengolahan	1.853,92	1.997,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,36	16,69
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	28,58	30,30
6	Konstruksi	1.115,35	1.211,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.675,99	1.986,70



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
8	Transportasi dan Pergudangan	886,18	1.054,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232,79	254,80
10	Informasi dan Komunikasi	475,90	513,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,40	235,49
12	<i>Real Estate</i>	309,27	327,41
13	Jasa Perusahaan	53,25	59,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	869,54	882,21
15	Jasa Pendidikan	655,13	643,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,22	192,62
17	Jasa Lainnya	115,50	127,10
18	Produk Domestik Bruto	115,50	19.019,18

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

## 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

### 2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari:
  - a. Transfer Pemerintah Pusat  
Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
    1. Dana Perimbangan terdiri dari:
      - a. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
      - b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
    2. Dana Insentif Daerah
    3. Dana Otonomi Khusus
    4. Dana Keistimewaan
    5. Dana Desa
  - b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:
    1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
    2. Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu:
  - a. Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
  - b. Dana Darurat;
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
  - d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan anggaran pendapatan yang dilaksanakan Tahun 2022 meliputi:

- 1) Melakukan review atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini;
- 2) Melakukan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya yang terkait dengan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Meningkatkan manajemen pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi eksternal maupun internal dengan para pengelola pendapatan.

### 2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah;
  - f. Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Tanah;
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Jalan
  - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
  - f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, perubahan yang terjadi adalah dikenalkannya sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD.

Terkait dengan adanya sub kegiatan yang sifatnya *close list*, maka saat ini masih dilakukan pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sambil menunggu hasil pemutakhiran maka beberapa sub kegiatan yang belum bisa dicantumkan dalam PPAS untuk sementara indikator dan alokasi dananya disematkan ke sub kegiatan yang sudah ada, untuk kemudian disesuaikan dan dimasukkan dalam kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun Anggaran 2022.

#### Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Pada tahun 2022, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untukantisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.
- f. Belanja daerah setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

### **2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
  - a. SiLPA
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2022 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia dananya melalui penerimaan pembiayaan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA.

Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan cukup signifikan dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

#### **2.2.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode Akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP 13 pada paragraf 119 disebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai fungsi



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

perbendaharaan. Adapun untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan laporan yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian.

### 2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2022 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022:

Tabel 10 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022

Kode	Uraian	APBD 2022	APBD-P 2022
4	PENDAPATAN	1.494.508.572.035,00	1.740.032.489.864,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	168.281.561.435,00	178.390.127.793,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.326.227.010.600,00	1.560.894.562.071,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	747.800.000,00
5	BELANJA	1.635.547.777.496,00	2.122.153.778.445,00
5.1	Belanja Operasi	1.201.672.073.029,00	1.439.029.698.746,00
5.2	Belanja Modal	187.422.954.350,00	436.247.177.182,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377,00	22.406.879.377,00
5.4	Belanja Transfer	223.825.870.740,00	224.470.023.140,00
	Total Surplus/(Defisit)	(141.039.205.461,00)	(382.121.288.581,00)

### **BAB III**

## **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp1.494.508.572.035,00 dan anggaran belanja sebesar Rp1.635.547.777.496,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp141.039.205.461,00.

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp1.740.032.489.864,00 dan anggaran belanja sebesar Rp2.122.153.778.445,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp382.121.288.581,00.

Defisit anggaran tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp610.990.188.934,00. Penerimaan pembiayaan juga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp75.000.000.000,00.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp2.159.239.661.099,87 dan belanja sebesar Rp1.639.631.878.652,92 serta belanja transfer sebesar Rp224.230.043.540,00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp295.377.738.906,95.

Realisasi Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp611.325.812.033,83 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp75.000.000.000,00 maka sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp536.325.812.033,83.

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp295.377.738.906,95 ditambah sisa atas Pembiayaan Netto sebesar Rp536.325.812.033,83, maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2022 posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp831.703.550.940,78.



### 3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dimana pencapaiannya diatas 100 persen, hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* dan SKPD yang bekerja keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun diketahui bersama bahwa perlambatan ekonomi regional cukup mempengaruhi komponen penerimaan pendapatan secara keseluruhan, namun dengan berbagai metode baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berbagai sumber penerimaan daerah yang dilaksanakan berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2022.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2022 mencapai 87,83 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan efisiensi yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* dan SKPD untuk dapat merealisasikan kegiatan yang benar-benar prioritas.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

#### **4.1 IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI**

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tahun 2022 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2021.

#### **4.2 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

#### **4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PELAPORAN KEUANGAN**

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- 1) Basis Kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- 2) Basis Akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **4.4.1 AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA / LO**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

### **Pengakuan**

- 1) Pendapatan LRA diakui saat kas telah diterima/masuk ke rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Pendapatan LO diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 4) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

### **Pengukuran**

Seluruh komponen pendapatan LRA dan LO disajikan berdasarkan azas:

- 1) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan Pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan LRA dan pendapatan LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

#### **4.4.2 AKUNTANSI BELANJA - BEBAN**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

### **Pengakuan**

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D LS/SP2D GU Nihil/SP2D TU Nihil dan nota debit Bank;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
- 5) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat perintah pencairan dana SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi;
- 6) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh pengguna anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau

diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi.

#### **Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap**

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*threshold capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

1. Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
2. Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
3. Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
4. Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
5. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### **Pengukuran**

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

#### **Penilaian**

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

### **4.4.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### **Pengakuan**

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pengukuran**

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran);
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### **Penilaian**

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau

mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

#### 4.4.4 AKUNTANSI ANGGARAN, AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT DAN AKUNTANSI NON ANGGARAN

##### **Akuntansi Anggaran**

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

##### **Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

##### **Akuntansi Non Anggaran**

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

##### **Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan;
- 4) Ekuitas Akhir;

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.4.5 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.

#### 4.4.6 AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuaikannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

##### Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

##### Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

##### Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

Tabel 11 Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang (%)
1	0 < 1 Tahun	Lancar	0,50
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	30
3	>2 -3 Tahun	Diragukan	50
4	>3 Tahun	Macet	100

#### 4.4.7 AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:
2. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
3. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
4. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

#### **Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

#### **Pengukuran**

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

#### **Penilaian**

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

### **4.4.8 AKUNTANSI INVESTASI**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

### **Pengakuan Investasi**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

### **Pengukuran Investasi**

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

#### **1) Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

#### **2) Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

#### **3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

### Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari, Pembelian Surat Utang Negara, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi Non Permanen lainnya.

### Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat serta tujuan lainnya. Dana Bergulir ini dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos penerimaan kembali pinjaman dan bagi hasil usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan Tidak Tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengukuran Dana Bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil perhitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak sapi betina jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai perjanjian. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih yang ditentukan dengan menggunakan umur tunggakan dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 12 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen**

No.	Umur Dana Bergulir	Kategori	Penyisihan Dana Bergulir (%)
1	0 – 4 tahun	Lancar	0
2	> 4 – 5 tahun	Ragu Tertagih	50
3	> 5 tahun	Macet	100

Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini SKPD yang menanganinya.

Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan

berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan/kelompok nelayan.

Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang baru akan dicatat sebagai aset lain-lain. Pengukuran atas nilai aset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi aset

#### **4.4.9 AKUNTANSI ASET TETAP**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

**1) Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**2) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

**3) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

**4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

**5) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

**6) Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakannya seluruhnya.

**7) Aset Lainnya**

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya;
- 2) aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan *overhaul* pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan *overhaul* yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

### **Aset Donasi**

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

#### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

#### **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Aset tidak berwujud;
- 5) Aset lain-lain.

#### **Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

### **5.1.1 AKUNTANSI KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.



### **Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

### **Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

## **5.1.2 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG**

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

## **5.1.3 AKUNTANSI EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
  - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**BAB VI**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**6.1 RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**6.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**6.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun 2022 sebesar Rp193.890.015.753,87 dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp178.390.127.793,00 atau realisasi sebesar 108,69%. Pendapatan Asli Daerah-LRA ini mengalami penurunan sebesar Rp12.245.614.941,68 atau sebesar 5,94% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2021 sebesar Rp206.135.630.695,55.

**Grafik 1 Realisasi PAD 2022**



**6.1.1.1.1 PAJAK DAERAH**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>41.000.250.000,00</b>	<b>45.363.440.225,80</b>	<b>43.638.422.656,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp45.363.440.225,80 sedangkan di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp43.638.422.656,00 terdiri atas:

**Tabel 13 Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)	
			(Rp)	%		
1	Pajak Hotel	85.000.000,00	88.001.904,00	103,53	48.977.500,00	79,68
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	435.000.000,00	487.100.153,00	111,98	236.774.452,00	105,72



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi	
			(Rp)	(Rp)	%	
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.465.000.000,00	4.305.161.295,80	124,25	4.037.420.782,00	6,63
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	60.000.000,00	65.345.000,00	108,91	46.790.000,00	39,66
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	449.624.800,00	515.078.891,00	114,56	443.495.864,00	16,14
6	Pajak Reklame Kain	66.412.160,00	46.717.875,00	70,35	54.153.945,00	(13,73)
7	Pajak Reklame Melekat/Stiker	18.087.840,00	18.087.840,00	100,00	17.359.920,00	4,19
8	Pajak Reklame Berjalan	5.875.200,00	5.875.200,00	100,00	5.875.200,00	0,00
9	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.450.000.000,00	24.887.516.287,00	101,79	21.009.663.614,00	18,46
10	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000,00	52.972.952,00	105,95	60.867.925,00	(12,97)
11	Pajak Parkir	105.250.000,00	118.382.800,00	112,48	37.651.000,00	214,42
12	Pajak Air Tanah	1.250.000.000,00	1.357.979.711,00	108,64	1.222.482.059,00	11,08
13	Pajak Sarang Burung walet	60.000.000,00	75.090.000,00	125,15	93.364.500,00	(19,57)
14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00	1.630.843.755,00	163,08	1.305.156.468,00	24,95
15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.500.000.000,00	5.249.042.846,00	116,65	5.390.241.149,00	(2,62)
16	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	5.448.746.032,00	136,22	2.858.475.687,00	90,62
17	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00	1.011.497.684,00	101,15	6.769.672.591,00	(85,06)
	<b>Jumlah</b>	<b>41.000.250.000,00</b>	<b>45.363.440.225,80</b>	<b>110,64</b>	<b>43.638.422.656,00</b>	<b>3,95</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.725.017.569,80 atau 3,95% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah ini yang paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

#### 6.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>7.952.619.500,00</b>	<b>6.971.598.007,00</b>	<b>5.743.153.528,80</b>

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.971.598.007,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.743.153.528,80. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2022 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Pendapatan Retribusi

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi	
			(Rp)	(Rp)	%	
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>					
1	Retribusi Pelayanan kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	(100,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	375.650.000,00	223.380.000,00	59,46	324.077.500,00	(31,07)
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000,00	82.700.000,00	330,80	48.147.000,00	71,77
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	727.936.000,00	236.403.000,00	32,48	479.718.000,00	(50,72)
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	203.294.000,00	425.476.000,00	209,29	182.373.000,00	133,30
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	266.890.000,00	739.232.000,00	276,98	234.103.000,00	215,77
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	434.115.000,00	306.330.500,00	70,56	437.562.500,00	(29,99)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,00	22.330.000,00	206,76	14.240.000,00	56,81
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	300.000.000,00	314.499.500,00	104,83	190.478.950,00	65,11
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	555.056.000,00	562.424.000,00	101,33	564.880.000,00	(0,43)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.898.741.000,00</b>	<b>2.912.775.000,00</b>	<b>100,48</b>	<b>2.476.699.950,00</b>	<b>17,61</b>
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>					
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	554.134.000,00	337.995.000,00	61,00	343.956.000,00	(1,73)
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	488.450.000,00	495.792.500,00	101,50	542.789.600,00	(8,66)
3	Retribusi Pemakaian Ruang	36.800.000,00	46.214.000,00	125,58	29.745.000,00	55,37
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	72.915.000,00	97,22	52.485.000,00	38,93
5	Retribusi Pemakaian Alat	311.750.000,00	448.916.500,00	144,00	177.875.000,00	152,38
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	238.800.000,00	189.442.000,00	79,33	223.661.500,00	(15,30)
7	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	85.000.000,00	81.700.500,00	96,12	88.465.500,00	(7,65)
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	565.743.000,00	492.663.000,00	87,08	445.135.500,00	10,68
9	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	61.200.000,00	59.796.000,00	97,71	56.844.000,00	5,19
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.220.573.000,00	899.829.000,00	73,72	544.346.500,00	65,30
	<b>Jumlah</b>	<b>3.637.450.000,00</b>	<b>3.125.263.500,00</b>	<b>85,92</b>	<b>2.505.303.600,00</b>	<b>24,75</b>
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>					
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan bangunan	1.416.428.500,00	933.559.507,00	65,91	761.149.978,80	22,65
	<b>Jumlah</b>	<b>1.416.428.500,00</b>	<b>933.559.507,00</b>	<b>65,91</b>	<b>761.149.978,80</b>	<b>22,65</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>7.952.619.500,00</b>	<b>6.971.598.007,00</b>	<b>87,66</b>	<b>5.743.153.528,80</b>	<b>21,39</b>

Pendapatan Retribusi sebesar Rp6.971.598.007,00 ini terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.912.775.000,00, Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.125.263.500,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp933.559.507,00. Pendapatan retribusi daerah di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.228.444.478,20 atau 21,39% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada Retribusi Pelayanan Pasar-Kios.

#### 6.1.1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>11.010.810.370,00</b>	<b>11.010.810.384,00</b>	<b>9.836.676.685,00</b>

Jumlah realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp11.010.810.384,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.836.676.685,00 terdiri atas:

**Tabel 15 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	10.425.528.033,00	10.425.528.033,00	100,00	9.461.741.668,00	10,19
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank BPR	106.005.337,00	106.005.337,00	100,00	0,00	100,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Baratala	479.277.000,00	479.277.014,00	100,00	374.935.017,00	27,83
	<b>Jumlah</b>	<b>11.010.810.370,00</b>	<b>11.010.810.384,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.836.676.685,00</b>	<b>11,94</b>

Pada tahun 2022 pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp1.174.133.699,00 atau 11,94%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMN adalah bagian laba dari penyertaan modal di Bank Kalsel, dan Bagian Laba atas penyertaan modal BUMD adalah bagian laba dari penyertaan modal pada PD. Baratala.

#### 6.1.1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>118.426.447.923,00</b>	<b>130.544.167.137,07</b>	<b>146.917.377.825,75</b>

Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.544.167.137,07 dan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp146.917.377.825,75 terdiri atas:

**Tabel 16 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	171.026.425,0	100,00	271.301.749,00	(36,96)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Sewa BMD	481.900.000,00	544.032.742,00	112,89	172.120.382,00	216,08
4	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	119.750.000,00	(37,37)
5	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.682.000.000,00	18.071.530.348,14	154,70	17.153.845.293,13	5,35
6	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	318.000.000,00	383.838.274,83	120,70	144.973.481,26	164,76
7	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	10.671.270,00	(100,00)
8	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	800.000.000,00	0,00	0,00	16.808.219.172,75	(100,00)
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	7.897.950,00	100,00	17.200.000,00	(54,08)
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	318.000.000,00	486.442.982,00	152,97	163.569.620,00	197,39
12	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	410.225,00	100.410.125,00	24.476,84	71.427.500,00	40,58
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.362.000.000,00	1.622.030.176,84	119,09	530.479.990,94	205,77
14	Pendapatan Denda PBBP2	163.925.000,00	308.410.195,00	188,14	461.266.133,00	(33,14)
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	528.292.202,20	(99,62)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	241.380.000,00	401.587.962,00	166,37	0,00	100,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	161.499.510,00	161.499.510,00	100,00	0,00	100,00
18	Pendapatan BLUD	102.620.333.188	108.030.172.461,23	105,27	110.394.661.504,47	(2,14)

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	68.950.000,00	(100,00)
20	Lain - Lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	178.287.985,03	100,00	649.527,00	27.348,90
	<b>Jumlah</b>	<b>118.426.447.923,00</b>	<b>130.544.167.137,07</b>	<b>110,23</b>	<b>146.917.377.825,75</b>	<b>(11,14)</b>

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2022 ini mengalami Penurunan sebesar Rp16.373.210.688,68 atau 11,14% dari tahun sebelumnya. Penurunan Realisasi Lain-lain PAD yang sah ini yang paling dominan disebabkan oleh Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

### 6.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

#### 6.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2022 sebesar Rp1.963.205.983.275,00 dari Anggaran Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp1.560.894.562.071,00 atau realisasi sebesar 125,77%. Pendapatan Transfer-LRA ini mengalami kenaikan sebesar Rp688.756.442.024,00 atau sebesar 54,05% dari Realisasi Pendapatan Transfer-LRA tahun 2021 sebesar Rp1.274.449.541.251,00.

Grafik 2 Pendapatan Transfer 2022



Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.667.151.026.122,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp114.676.716.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp181.618.220.753,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp10.342.946.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp104.093.790.400,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp181.618.220.753,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00.

**6.1.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>1.335.967.846.071,00</b>	<b>1.667.151.026.122,00</b>	<b>1.045.900.191.937,00</b>

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.667.151.026.122,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.045.900.191.937,00 terdiri atas:

**Tabel 17 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Perimbangan	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	124,79	1.045.900.191.937,00	59,40
	<b>Jumlah</b>	<b>1.335.967.846.071,00</b>	<b>1.667.151.026.122,00</b>	<b>124,79</b>	<b>1.045.900.191.937,00</b>	<b>59,40</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp621.250.834.185,00 atau 59,40% dari tahun sebelumnya. Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp10.342.946.000,00 dan Rp19.072.439.000,00. Realisasi Dana Desa tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp104.093.790.400,00 dan sebesar Rp109.494.413.000,00.

**1. Dana Perimbangan**

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah realisasi Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.667.151.026.122,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.045.900.191.937,00 terdiri atas:

**a. Dana Bagi Hasil**

Merupakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam dari Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 18 Rincian Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	21.079.690.500,00	37.468.975.202,00	177,75	40.900.148.473,00	(8,39)
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	7.344.297.750,00	9.792.397.000,00	133,33	9.229.801.000,00	6,10



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
3	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	177.717.750,00	191.211.600,00	107,59	222.713.000,00	(14,14)
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	230.250,00	9.810,00	4,26	624,00	1.472,12
5	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	60.678.750,00	363.567.992,00	599,17	731.880.700,00	(50,32)
6	Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	542.721.600,00	(100,00)
7	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara ( <i>Landrent</i> )	0,00	0,00	0,00	765.343.498,00	(100,00)
8	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara ( <i>Royalty</i> )	543.063.436.500,00	886.407.324.498,00	163,22	306.096.178.297,00	189,58
9	Dana Bagi Hasil SDA Provisi Sumber Daya Hutan	124.891.500,00	608.082.162,00	486,89	381.172.050,00	59,53
10	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	1.468.733.250,00	1.958.311.000,00	133,33	1.357.619.150,00	44,25
	<b>Jumlah</b>	<b>573.319.676.250,00</b>	<b>936.789.879.264,00</b>	<b>163,40</b>	<b>360.227.578.392,00</b>	<b>160,06</b>

Dana Bagi Hasil pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.576.562.300.872,00 atau 160,06%. Kenaikan Dana Bagi Hasil ini yang paling dominan disebabkan oleh Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara (*Royalty*) sebesar Rp580.311.146.201,00.

**b. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, rincian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut:

**Tabel 19 Dana Alokasi Umum (DAU)**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	492.392.036.893,00	491.839.636.893,00	99,89	494.306.446.000,00	(0,50)
	<b>Jumlah</b>	<b>492.392.036.893,00</b>	<b>491.839.636.893,00</b>	<b>99,89</b>	<b>494.306.446.000,00</b>	<b>(0,50)</b>

Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp491.839.636.893,00. Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp2.466.809.107,00 dari tahun sebelumnya.

**c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp89.691.850.759,00 sebagai berikut:

**Tabel 20 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	DAK Bidang Pendidikan PAUD	200.000.000,00	198.515.000,00	99,26	161.699.500,00	22,77
2	DAK Bidang Pendidikan SD	9.592.503.000,00	8.895.453.690,00	92,73	6.307.404.287,00	41,03
3	DAK Bidang Pendidikan SMP	1.868.130.000,00	1.769.934.990,00	94,74	3.113.373.075,00	(43,15)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	211.182.000,00	201.080.000,00	95,22	13.635.873.013,00	(98,53)
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	199.921.000,00	177.539.000,00	88,80	0,00	100,00
6	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	3.958.663.000,00	3.441.079.653,00	86,93	3.312.537.670,00	3,88
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB - KB	1.267.805.800,00	1.144.157.000,00	90,25	685.072.172,00	67,01
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan Stunting	99.135.000,00	77.055.000,00	77,73	219.600.000,00	(64,91)
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	8.075.943.773,00	(100,00)
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.487.567.075,00	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	5.977.024.000,00	5.977.020.000,00	100,00	2.793.665.000,00	113,95
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	17.868.896.367,00	15.733.906.340,00	88,05	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Reguler-Penurunan AKI dan AKB					
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	313.852.000,00	296.883.840,00	94,59	0,00	100,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	653.000.000,00	398.774.460,00	61,07	0,00	100,00
15	DAK Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	495.376.000,00	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.423.950.000,00	5.256.882.750,00	96,92	2.910.617.416,00	80,61
17	DAK Kelautan dan Perikanan	407.941.000,00	357.771.036,00	87,70	290.630.000,00	23,10
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.177.440.000,00	10.762.859.500,00	96,29	15.243.807.735,00	(29,40)
19	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.838.902.000,00	16.454.105.000,00	97,71	0,00	100,00
20	DAK Air Minum	11.196.658.000,00	11.033.469.000,00	98,54	6.951.313.000,00	58,72
21	DAK Sanitasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00	2.631.288.000,00	(25,89)
22	DAK Irigasi	4.529.999.761,00	4.274.239.500,00	94,35	8.383.048.000,00	(49,01)
23	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.300.000.000,00	1.291.125.000,00	99,32	1.357.310.000,00	(4,88)
	<b>Jumlah</b>	<b>95.035.002.928,00</b>	<b>89.691.850.759,00</b>	<b>94,38</b>	<b>78.056.125.716,00</b>	<b>14,91</b>

Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan sebesar Rp11.635.725.043,00 atau 14,91%. Kenaikan paling dominan terdapat pada DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB sebesar Rp15.733.906.340,00.

**d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp148.829.659.206,00 sebagai berikut:

**Tabel 21 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	41.824.800.000,00	34.913.634.262,00	83,48	0,00	100,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.440.000.000,00	1.240.000.000,00	86,11	0,00	100,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	96.698.212.000,00	87.015.173.489,00	89,99	99.243.920.000,00	(12,32)
4	Tambahan penghasilan Guru PNSD	1.572.000.000,00	1.485.145.500,00	94,47	615.467.000,00	141,30



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.088.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bantuan Operasional PAUD	7.086.600.000,00	6.659.495.000,00	93,97	7.156.218.625,00	(6,94)
7	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	1.546.200.000,00	1.546.200.000,00	100,00	1.869.270.400,00	(17,28)
8	BOKKB -Bantuan Operasional Kesehatan	5.929.880.000,00	12.601.997.531,00	212,52	0,00	100,00
9	Bantuan Operasional Kesehatan KB Akreditasi Puskesmas	15.650.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bantuan Operasional Kesehatan KB Jaminan Persalinan	400.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bantuan Operasional Kesehatan KB	605.259.000,00	2.381.946.870,00	393,54	2.615.635.945,00	(8,93)
12	Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM	404.200.000,00	293.245.149,00	72,55	242.878.040,00	20,74
13	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.566.651.819,00	(100,00)
14	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	244.776.000,00	63,76	0,00	100,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	354.013.405,00	78,36	0,00	100,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	138.100.000,00	94.032.000,00	68,09	0,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>175.221.130.000,00</b>	<b>148.829.659.206,00</b>	<b>84,94</b>	<b>113.310.041.829,00</b>	<b>31,35</b>

Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp35.519.617.377,00 atau 31,35%. Kenaikan paling dominan terdapat pada DAK Non Fisik- BOS sebesar Rp36.153.634.262,00.

Pada tahun 2022 ini Pendapatan Dana BOS SD dan SMP masuk dalam Pendapatan Transfer DAK Non Fisik sedangkan tahun 2021 masuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Dana BOS SD dan SMP tahun 2022 adalah sebesar Rp36.153.634.262,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp39.112.780.000,00.

**6.1.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>114.676.716.000,00</u>	<u>114.436.736.400,00</u>	<u>128.566.852.000,00</u>

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp114.436.736.400,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp128.566.852,00 terdiri atas:

**Tabel 22 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00	19.072.439.000,00	(45,77)
2	Dana Desa	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77	109.494.413.000,00	(4,93)
	<b>Jumlah</b>	<b>114.676.716.000,00</b>	<b>114.436.736.400,00</b>	<b>99,79</b>	<b>128.566.852.000,00</b>	<b>(10,99)</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp14.130.115.600,00 atau 10,99% dari tahun sebelumnya. Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp10.342.946.000,00 dan Rp19.072.439.000,00. Realisasi Dana Desa tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp104.093.790.400,00 dan sebesar Rp109.494.413.000,00.

**1. Dana Insentif Daerah (DID)**

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari pendapatan APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu yang dialokasikan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Rincian Dana Insentif Daerah (DID) sebagai berikut:

**Tabel 23 Dana Insentif Daerah**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Insentif Daerah	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00	19.072.439.000,00	(45,77)
	<b>Jumlah</b>	<b>10.342.946.000,00</b>	<b>10.342.946.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.072.439.000,00</b>	<b>(45,77)</b>

Jumlah realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.342.946.000,00. sedangkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.072.439.000,00.

**2. Dana Desa**

Dana Desa adalah bagian dari dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Dana Desa sebagai berikut:

**Tabel 24 Dana Desa**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Desa	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77	109.494.413.000,00	(4,93)
	<b>Jumlah</b>	<b>104.333.770.000,00</b>	<b>104.093.790.400,00</b>	<b>99,77</b>	<b>109.494.413.000,00</b>	<b>(4,93)</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.093.790.400,00, sedangkan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp109.494.413.000,00.

**6.1.1.2.4 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>110.250.000.000,00</b>	<b>181.618.220.753,00</b>	<b>99.982.497.314,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp181.618.220.753,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp99.982.497.314,00 terdiri atas:

**Tabel 25 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Dana Bagi Hasil	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73	99.282.497.314,00	82,93
2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>110.250.000.000,00</b>	<b>181.618.220.753,00</b>	<b>164,73</b>	<b>99.982.497.314,00</b>	<b>81,65</b>

Selama tahun 2022 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp81.635.723.439,00 atau 81,65%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

**Tabel 26 Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.930.000.000,00	22.554.874.481,00	189,06	18.607.709.984,00	21,21
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.750.000.000,00	12.669.510.340,00	75,64	7.216.466.548,00	75,56
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	65.400.000.000,00	127.866.382.092,00	195,51	57.108.906.590,00	123,90
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	160.000.000,00	432.495.949,00	270,31	156.323.166,00	176,67
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	16.010.000.000,00	18.094.957.891,00	113,02	16.193.091.026,00	11,74
	<b>Jumlah</b>	<b>110.250.000.000,00</b>	<b>181.618.220.753,00</b>	<b>164,73</b>	<b>99.282.497.314,00</b>	<b>82,93</b>

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp82.335.723.439,00 atau 82,93% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak paling dominan disebabkan oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp70.757.475.502,00.

**Tabel 27 Bantuan Keuangan**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
			(Rp)	(Rp)	%	
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(100,00)
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>(100,00)</b>

Bantuan Keuangan Umum pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Jumlah realisasi Bantuan Keuangan Umum pada TA 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp700.000.000,00 atau 100%.

#### 6.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp2.143.662.071,00 sedangkan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 sebesar Rp42.316.218.570,00. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2022**



#### 6.1.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>747.800.000,00</b>	<b>2.143.662.071,00</b>	<b>3.203.438.570,00</b>

Realisasi Pendapatan Hibah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.143.662.071,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.203.438.570,00 merupakan Pendapatan Hibah yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Lainnya, Sumbangan Pihak Ketiga Sejenis, Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 28 Pendapatan Hibah**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66	0,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>747.800.000,00</b>	<b>2.143.662.071,00</b>	<b>286,66</b>	0,00	100,00

Pendapatan Hibah dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 29 Rincian Pendapatan Hibah**

No.	Pemberi Hibah	Jumlah	Keterangan
1	Pemerintah Pusat	1.288.000.000,00	Hibah Air Minum Pedesaan
2	Sumbangan Pihak Ketiga:		
	PT. Charoend Phokpand	21.000.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Pugung Raya	130.216.656,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Perkebunan
	PT. Patriot Intan AB	22.200.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Adhom Farm Indonesia	10.000.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Arutmin	620.456.982,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Pertambangan
	PT. Ciomas Adisatwa	2.500.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Prima Media Selaras	2.456.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Surat Kabar dan Iklan
	PT. Sumber Graha Sejahtera	5.934.100,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Pengolahan Kayu
	Bank BJB	1.318.333,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bank BJB
	BAPOPSI KALSEL	27.600.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Olahraga
	Sumbangan Masyarakat	11.980.000,00	Sumbangan Masyarakat
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>	<b>2.143.662.071,00</b>	

**6.1.1.3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.112.780.000,00</u>

Jumlah realisasi Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.112.780.000,00 merupakan Lain-Lain Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 30 Rincian Lain – Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	39.112.780.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.112.780.000,00</b>	<b>(100,00)</b>

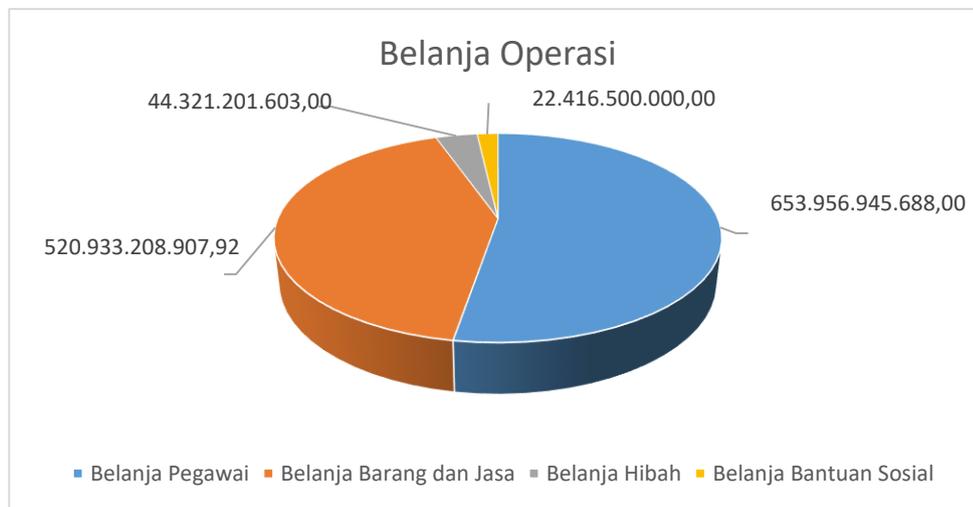
Pada tahun 2022 ini Pendapatan Dana BOS SD dan SMP masuk dalam Pendapatan Transfer DAK Non Fisik sedangkan tahun 2021 masuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Dana BOS SD dan SMP tahun 2022 adalah sebesar Rp36.153.634.262,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp39.112.780.000,00.

#### 6.1.1.4 BELANJA OPERASI

Belanja operasi untuk tahun anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp653.956.945.688,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp520.933.208.907,92, Belanja Hibah sebesar Rp44.321.201.603,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.416.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.849.213.345,92 atau sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya.

**Grafik 4 Realisasi Belanja Operasi 2022**



#### 6.1.1.4.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>761.383.543.055,00</b>	<b>653.956.945.688,00</b>	<b>639.840.569.796,56</b>

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp653.956.945.688,00 dan Rp639.840.569.796,56 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 31 Rincian Belanja Pegawai**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)	
			(Rp)	%		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	424.884.190.581,00	344.136.034.135,00	81,00	336.808.828.556,00	2,18
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	203.217.769.191,00	193.043.112.050,00	94,99	272.824.841.973,56	(29,24)
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100.997.548.491,00	87.285.442.015,00	86,42	0,00	100,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.443.872.220,00	22.428.513.779,00	91,76	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	802.542.572,00	726.393.709,00	90,51	0,00	100,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.450.000,00	100,00	23.839.886.856,00	(96,17)
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.534.915.000,00	(100,00)
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	171.739.411,00	(100,00)
9	Belanja Pegawai BOS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Pegawai BLUD	6.124.750.000,00	5.425.000.000,00	88,58	4.660.358.000,00	16,41
	<b>Jumlah</b>	<b>761.383.543.055,00</b>	<b>653.956.945.688,00</b>	<b>85,89</b>	<b>639.840.569.796,56</b>	<b>2,21</b>

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.116.375.891,44 atau sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp344.136.034.135,00 pada tabel di atas terdiri dari:

**Tabel 32 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	239.111.599.623,00	194.280.632.131,00	81,25
2	Dinas Kesehatan	72.765.225.337,00	60.274.959.998,00	82,83
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.773.784.878,00	3.996.955.132,00	83,73
4	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	3.872.522.467,00	3.779.085.452,00	97,59
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.306.527.098,00	2.805.109.602,00	84,84
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.518.010.491,00	1.034.651.311,00	68,16
7	Dinas Sosial	3.332.533.990,00	1.738.964.121,00	52,18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4.425.443.238,00	2.861.109.611,00	64,65
9	Dinas Pengendalian Masyarakat, KB, P3A	2.668.832.656,00	2.051.674.162,00	76,88
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.760.421.996,00	2.125.635.065,00	77,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.315.697.893,00	1.943.727.774,00	83,94
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.598.386.729,00	1.965.911.553,00	75,66
13	Dinas Perhubungan	2.950.351.967,00	2.314.655.029,00	78,45
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.679.611.378,00	1.262.914.187,00	75,19
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	2.561.342.102,00	1.930.187.507,00	75,36
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.147.219.440,00	1.181.079.694,00	55,01
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.758.600.152,00	1.401.074.542,00	79,67
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.923.304.178,00	1.630.379.568,00	55,77



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
19	Dinas Pariwisata	2.468.243.786,00	1.574.454.690,00	63,79
20	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.309.715.397,00	11.085.215.639,00	90,05
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.347.564.325,00	2.818.248.673,00	84,19
22	Sekretariat Daerah	9.410.286.798,00	7.464.044.594,00	79,32
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.568.179.321,00	2.170.472.422,00	84,51
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.484.072.570,00	2.312.642.134,00	93,10
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.694.261.460,00	2.883.483.731,00	78,05
39	Badan Pendapatan Daerah	2.212.067.475,00	1.919.741.646,00	86,78
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.086.149.747,00	1.959.691.661,00	93,94
36	Inspektorat Kabupaten	3.864.564.597,00	3.392.446.839,00	87,78
34	Kantor Kecamatan Bajuin	1.379.164.258,00	1.002.041.214,00	72,66
28	Kantor Kecamatan Bati-Bati	1.795.102.860,00	1.254.593.050,00	69,89
29	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1.473.003.124,00	1.159.502.198,00	78,72
35	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	1.502.135.784,00	1.353.961.011,00	90,14
32	Kantor Kecamatan Jorong	1.352.647.576,00	1.052.180.023,00	77,79
33	Kantor Kecamatan Kintap	1.296.326.787,00	812.251.833,00	62,66
27	Kantor Kecamatan Kurau	1.656.052.958,00	890.428.476,00	53,77
25	Kantor Kecamatan Pelaihari	5.980.382.347,00	4.670.587.533,00	78,10
30	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.345.207.068,00	1.189.829.415,00	88,45
31	Kantor Kecamatan Takisung	1.349.500.218,00	1.174.268.650,00	87,02
26	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1.416.940.675,00	1.165.541.964,00	82,26
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.423.205.837,00	2.251.700.300,00	92,92
	<b>Jumlah</b>	<b>424.884.190.581,00</b>	<b>344.136.034.135,00</b>	<b>81,00</b>

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp193.043.112.050,00 pada tabel di atas terdiri dari:

**Tabel 33 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.617.220.574,00	47.581.621.225,00	92,18
2	Dinas Kesehatan	39.602.716.469,00	38.897.253.247,00	98,22
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.489.996.092,00	4.211.664.826,00	93,80
4	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	3.967.680.831,00	3.951.762.102,00	99,60
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.940.176.252,00	2.842.116.886,00	96,66
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.093.847.724,00	1.040.047.281,00	95,08
7	Dinas Sosial	1.930.726.584,00	1.895.202.593,00	98,16



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.355.890.780,00	3.192.801.699,00	95,14
9	Dinas Pengendalian Masyarakat, KB, P3A	2.460.000.000,00	2.405.129.862,00	97,77
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.597.241.720,00	2.450.039.409,00	94,33
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.560.754.000,00	2.448.132.338,00	95,60
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.407.956.942,00	2.261.934.262,00	93,94
13	Dinas Perhubungan	2.851.994.440,00	2.674.137.750,00	93,76
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.128.769.339,00	1.887.389.019,00	88,66
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	2.395.722.390,00	2.324.653.904,00	97,03
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.722.000.000,00	1.469.626.061,00	85,34
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.812.472.508,00	1.812.472.508,00	100,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.082.696.192,00	1.873.657.585,00	89,96
19	Dinas Pariwisata	2.173.044.700,00	2.013.366.022,00	92,65
20	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	11.610.931.803,00	10.600.167.297,00	91,29
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.427.797.500,00	3.349.849.942,00	97,73
22	Sekretariat Daerah	12.260.897.522,00	12.232.969.716,00	99,77
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.485.435.107,00	2.296.129.347,00	92,38
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.795.083.820,00	3.687.722.109,00	97,17
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.689.963.372,00	4.526.098.789,00	96,51
39	Badan Pendapatan Daerah	2.874.461.940,00	2.557.594.978,00	88,98
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.709.119.998,00	2.480.718.559,00	91,57
36	Inspektorat Kabupaten	6.405.361.769,00	6.160.731.284,00	96,18
34	Kantor Kecamatan Bajuin	1.167.066.351,00	1.101.130.556,00	94,35
28	Kantor Kecamatan Bati-Bati	1.281.241.204,00	1.232.864.071,00	96,22
29	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1.240.000.000,00	1.175.118.044,00	94,77
35	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	1.308.263.411,00	1.230.546.547,00	94,06
32	Kantor Kecamatan Jorong	1.183.499.496,00	1.121.915.963,00	94,80
33	Kantor Kecamatan Kintap	1.069.131.483,00	973.254.718,00	91,03
27	Kantor Kecamatan Kurau	1.178.695.212,00	1.037.992.723,00	88,06
25	Kantor Kecamatan Pelaihari	4.149.549.910,00	4.141.688.892,00	99,81
30	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.224.529.903,00	1.176.521.394,00	96,08
31	Kantor Kecamatan Takisung	1.228.170.881,00	1.151.696.039,00	93,77
26	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1.226.490.972,00	1.153.402.656,00	94,04
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.511.170.000,00	2.421.989.847,00	96,45
	<b>Jumlah</b>	<b>203.217.769.191,00</b>	<b>193.043.112.050,00</b>	<b>94,99</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPR serta KDH/WKDH sebesar Rp912.450.000,00 pada tabel di atas terdiri dari:

**Tabel 34 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	312.480.000,00	312.450.000,00	99,99
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>912.480.000,00</b>	<b>912.450.000,00</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.845.011.250,00 pada tabel di atas terdiri dari:

**Tabel 35 Rincian Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	1.845.011.250,00	1.845.011.250,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.845.011.250,00</b>	<b>1.845.011.250,00</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp282.946.138,00 pada tabel di atas terdiri dari:

**Tabel 36 Rincian Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	375.333.637,00	282.946.138,00	75,39
	<b>Jumlah</b>	<b>375.333.637,00</b>	<b>282.946.138,00</b>	<b>75,39</b>

Realisasi Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp5.425.000.000,00 pada tabel di atas merupakan Belanja Pegawai BLUD RSUD H. Boejasin, sebagai berikut:

**Tabel 37 Rincian Belanja Pegawai BLUD**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	BLUD RSUD H. Boejasin	6.124.750.000,00	5.425.000.000,00	88,58
	<b>Jumlah</b>	<b>6.124.750.000,00</b>	<b>5.425.000.000,00</b>	<b>88,58</b>

**7.1.1.1.1 BELANJA BARANG DAN JASA**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>604.326.334.462,00</b>	<b>520.933.208.907,92</b>	<b>505.996.286.092,44</b>

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp520.933.208.907,92 dan Rp505.996.286.092,44 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 38 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	76.378.260.779,00	62.820.064.710,00	82,25	68.964.784.786,00	(8,91)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	24.728.284,00	22.174.000,00	89,67	251.370.000,00	(91,18)
3	Belanja Jasa Kantor	179.770.554.359,00	150.075.772.330,00	83,48	167.853.266.085,00	(10,59)
4	Belanja Premi Asuransi	62.451.560.452,00	60.926.358.860,00	97,56	60.370.090.875,98	0,92
5	Belanja Sewa Tanah	29.500.000,00	1.500.000,00	5,08	0,00	100,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.103.027.903,00	5.156.888.641,00	84,50	4.496.256.100,00	14,69
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.635.468.103,00	1.159.430.400,00	70,89	1.108.573.650,00	4,59
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	59.422.500,00	56.430.000,00	94,96	317.610.500,00	(82,23)
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.854.931.672,00	4.513.046.000,00	92,96	6.737.281.365,00	(33,01)
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.685.803.685,00	3.419.761.062,00	92,78	6.830.656.100,00	(49,94)
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	49.980.000,00	46.742.150,00	93,52	0,00	100,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	0,00	100,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.798.263.800,00	3.940.592.024,00	82,13	2.548.173.174,00	54,64
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	205.001.250,00	205.001.250,00	100,00	0,00	100,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	158.502.000,00	(100,00)
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.134.725.282,00	10.387.510.351,00	85,60	11.094.752.426,00	(6,37)
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.466.183.418,00	1.257.145.157,00	85,74	6.218.522.092,00	(79,78)
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.887.015.918,00	55.518.935.550,00	94,28	25.985.149.261,00	113,66
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.750.000,00	(12,73)
20	Belanja Perjalanan Dinas	62.018.718.751,00	45.122.842.241,00	72,76	40.228.425.279,00	12,17
21	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.889.549.698,00	14.367.849.698,00	96,50	4.351.990.976,00	230,14



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	120.502.800,00	(100,00)
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.980.168.208,00	27.527.531.405,00	86,08	32.532.379.983,00	(15,38)
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	82.571.070.400,00	74.125.233.078,92	89,77	65.825.248.639,46	12,61
	<b>Jumlah</b>	<b>604.326.334.462,00</b>	<b>520.933.208.907,92</b>	<b>86,20</b>	<b>505.996.286.092,44</b>	<b>2,95</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.936.922.815,48 atau sebesar 2,95% dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp74.125.233.078,92 pada tabel di atas terdiri dari:

**Tabel 39 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD**

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Persediaan	2.083.033.112,00
2	Belanja Jasa	43.586.453.376,92
3	Belanja Pemeliharaan	1.056.048.924,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	3.256.803.136,00
5	Belanja Barang	24.142.894.530,00
	<b>Jumlah</b>	<b>74.125.233.078,92</b>

**7.1.1.1.2 BELANJA HIBAH**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>47.079.621.851,00</u>	<u>44.321.201.603,00</u>	<u>53.691.496.964,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Hibah selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp44.321.201.603,00 dan Rp53.691.496.964,00 terdiri atas:

**Tabel 40 Belanja Hibah**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Dana BOP Kesetaraan	1.546.199.812,00	1.524.277.346,00	99,12	2.191.935.000,00	(30,08)
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.243.600.020,00	3.188.021.000,00	98,29	9.779.072.300,00	(67,40)
3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	897.000.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.973.324.047,00	31.511.219.048,00	92,75	32.846.697.364,00	(4,07)
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550,00	1.464.698.550,00	100,00	1.464.698.550,00	0,00
6	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	6.851.799.422,00	6.632.985.659,00	96,69	6.512.093.750,00	1,73
	<b>Jumlah</b>	<b>47.079.621.851,00</b>	<b>44.321.201.603,00</b>	<b>94,14</b>	<b>53.691.496.964,00</b>	<b>(17,45)</b>

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.370.295.361,00 atau sebesar 17,45% dari tahun sebelumnya.

Adapun penjelasan secara rinci atas Hibah sebesar Rp44.321.201.603,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Belanja Hibah Per SKPD

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.087.864.325,00	7.870.112.000,00	97,31
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7.043.600.014,00	6.832.401.000,00	97,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	21.213.220,00	19.230.000,00	90,65
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	680.440.813,00	623.947.780,00	91,70
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.985.000.000,00	8.739.094.691,00	97,26
7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4.170.820.940,00	3.864.814.000,00	92,66
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	99.999.989,00	90.564.000,00	90,56
9	Sekretariat Daerah	6.935.000.000,00	6.934.019.700,00	99,99
10	Kantor Kecamatan Bajuin	317.097.000,00	218.377.000,00	68,87
11	Kantor Kecamatan Bati-Bati	382.500.000,00	80.000.000,00	20,92
12	Kantor Kecamatan Batu Ampar	399.340.000,00	384.740.000,00	96,34
13	Kantor Kecamatan Jorong	991.538.000,00	580.000.000,00	58,49
14	Kantor Kecamatan Kintap	995.004.000,00	842.642.882,00	84,69
15	Kantor Kecamatan Kurau	52.750.000,00	52.750.000,00	100,00
16	Kantor Kecamatan Pelaihari	552.255.000,00	427.380.000,00	77,39
17	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.000.000.000,00	885.130.000,00	88,51
18	Kantor Kecamatan Takisung	410.500.000,00	410.500.000,00	100,00
19	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	845.000.000,00	355.800.000,00	42,11
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.609.698.550,00	4.609.698.550,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.079.621.851,00</b>	<b>44.321.201.603,00</b>	<b>94,14</b>

Adapun penjelasan secara rinci atas Hibah Dana BOP PAUD dapat dijelaskan pada *Lampiran 14*.

### 7.1.1.1.3 BELANJA BANTUAN SOSIAL

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>26.220.200.000,00</b>	<b>22.416.500.000,00</b>	<b>15.250.290.000,00</b>

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp22.416.500.000,00 dan Rp15.250.290.000,00 dimana realisasi Tahun Anggaran 2022 ini merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

**Tabel 42 Rincian Belanja Bantuan Sosial**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)	
			(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.250.290.000,00	(100,00)
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	23.205.440.000,00	22.416.500.000,00	96,60	0,00	100,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.014.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.220.200.000,00</b>	<b>22.416.500.000,00</b>	<b>85,49</b>	<b>15.250.290.000,00</b>	<b>46,99</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.166.210.000,00 atau sebesar 46,99% dari tahun sebelumnya.

Disamping itu penjelasan secara rinci atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.416.500.000,00 adalah sebagai berikut:

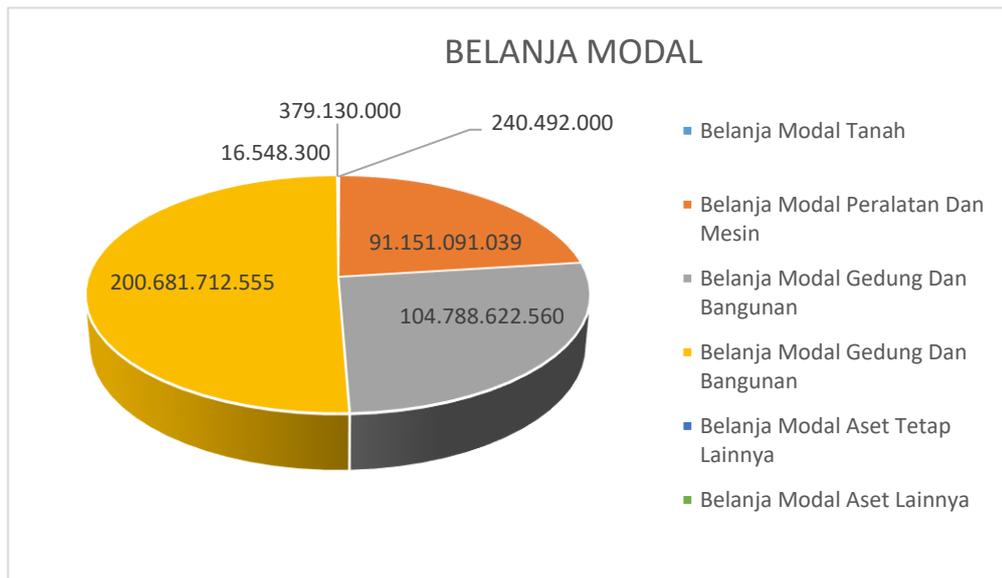
**Tabel 43 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**

	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)	
			(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu (DAK Fisik Bedah Rumah)	7.835.000.000,00	7.835.000.000,00	100,00	2.793.665.000,00	180,46
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.370.440.000,00	14.581.500.000,00	94,87	10.856.625.000,00	34,31
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>23.205.440.000,00</b>	<b>22.416.500.000,00</b>	<b>96,60</b>	<b>15.250.290.000,00</b>	<b>46,99</b>

### 7.1.1.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk tahun 2022 terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp240.492.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.151.091.039,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp104.788.622.560,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp200.681.712.555,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp395.678.300,00.

Grafik 5 Realisasi Belanja Modal 2022



#### 7.1.1.2.1 BELANJA MODAL TANAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>394.310.000,00</u>	<u>240.492.000,00</u>	<u>2.897.145.120,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp240.492.000,00 dan Rp2.897.145.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)	
			(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.675.255.000,00	(100,00)
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	12.500.000,00	12.490.000,00	99,92	0,00	100,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	381.810.000,00	228.002.000,00	59,72	221.890.120,00	2,75
	<b>Jumlah</b>	<b>394.310.000,00</b>	<b>240.492.000,00</b>	<b>60,99</b>	<b>2.897.145.120,00</b>	<b>(91,70)</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.656.653.120,00 atau sebesar 91,70% dari tahun sebelumnya.

#### 7.1.1.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>109.403.917.048,00</u>	<u>91.151.091.039,00</u>	<u>87.589.675.673,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp91.151.091.039,00 dan Rp87.589.675.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	750.869.000,00	(100,00)
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	91.373.927,00	75.571.037,00	82,71	123.095.687,00	(38,61)
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.020.598.789,00	5.562.700.000,00	92,39	10.766.550.700,00	(48,33)
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	439.462.492,00	437.601.000,00	99,58	158.114.500,00	176,76
5	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	40.139.265,00	40.100.000,00	99,90	0,00	100,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	37.539.242,00	33.862.869,00	90,21	99.648.040,00	(66,02)
7	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	97.036.900,00	(98,76)
8	Pengadaan Alat Ukur	165.253.455,00	133.017.397,00	80,49	1.516.681.260,00	(91,23)
9	Pengadaan Alat Pengolahan	4.012.760,00	3.660.000,00	91,21	458.208.000,00	(99,20)
10	Pengadaan Alat Kantor	1.160.234.639,00	1.046.812.161,00	90,22	2.405.291.432,00	(56,48)
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.590.543.589,00	11.211.566.881,00	82,50	13.525.580.155,00	(17,11)
12	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	89.514.655,00	81.655.275,00	91,22	1.424.604.208,00	(94,27)
13	Pengadaan Alat Studio	428.833.647,00	364.940.725,00	85,10	1.330.275.477,00	(72,57)
14	Pengadaan Alat Komunikasi	91.398.928,00	87.536.000,00	95,77	181.801.363,00	(51,85)
15	Pengadaan Peralatan Pemancar	82.720.035,00	79.550.000,00	96,17	556.165.127,00	(85,70)
16	Pengadaan Alat Kedokteran	49.092.836.592,00	39.251.146.725,00	79,95	25.123.422.359,00	56,23
17	Pengadaan Alat Kesehatan Umum	25.495.068.198,00	21.538.777.025,00	84,48	244.952.420,00	8.693,05
18	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.025.129.079,00	1.631.084.554,00	80,54	13.410.804.943,00	(87,84)
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	144.407.329,00	120.053.750,00	83,14	0,00	100,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.915.825.358,00	1.895.533.000,00	98,94	0,00	100,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	110.000.000,00	109.500.000,00	99,55	0,00	100,00
22	Pengadaan Komputer Unit	6.582.410.221,00	5.784.885.623,00	87,88	14.297.887.247,00	(59,54)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	919.898.388,00	823.978.817,00	89,57	0,00	100,00
24	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	170.844.300,00	168.300.000,00	98,51	0,00	100,00
25	Belanja Modal Alat Pelindung	69.734.500,00	69.508.200,00	99,68	0,00	100,00
26	Belanja Modal Alat SAR	153.162.077,00	130.870.000,00	85,45	0,00	100,00
27	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	359.999.992,00	358.600.000,00	99,61	0,00	100,00
28	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	25.663.000,00	25.530.000,00	99,48	472.309.000,00	(94,59)
29	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.112.591,00	83.550.000,00	86,93	594.546.000,00	(85,95)
30	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	51.831.855,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>109.403.917.048,00</b>	<b>91.151.091.039,00</b>	<b>83,32</b>	<b>87.589.675.673,00</b>	<b>4,07</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.561.415.366,00 atau sebesar 4,07% dari tahun sebelumnya.

#### 7.1.1.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>112.572.068.902,00</b>	<b>104.788.622.560,00</b>	<b>125.469.046.825,83</b>

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp104.788.622.560,00 dan Rp125.469.046.825,83, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.211.117.944,00	96.021.771.688,00	93,03	110.535.638.888,83	(13,13)
2	Pengadaan Bangunan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	199.320.000,00	179.161.000,00	89,89	7.685.029.000,00	(97,67)
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	9.161.630.958,00	8.587.689.872,00	93,74	5.444.423.937,00	57,73
4	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	220.100.000,00	(100,00)
5	Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	1.583.855.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>112.572.068.902,00</b>	<b>104.788.622.560,00</b>	<b>93,09</b>	<b>125.469.046.825,83</b>	<b>(16,48)</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp20.680.424.265,83 atau sebesar 16,48% dari tahun sebelumnya.

**7.1.1.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>213.225.317.172,00</b>	<b>200.681.712.555,00</b>	<b>226.307.789.870,00</b>

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp200.681.712.555,00 dan Rp226.307.789.870,00 terdiri atas:

**Tabel 47 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Jalan	97.352.523.848,00	92.430.628.008,00	94,94	129.487.456.023,00	(28,62)
2	Pengadaan Jembatan	33.281.084.875,00	31.903.296.930,00	95,86	29.751.184.500,00	7,23
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.079.742.467,00	4.264.206.800,00	83,95	7.804.146.000,00	(45,36)
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	2.999.741.429,00	2.804.942.000,00	93,51	0,00	100,00
5	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.426.563.663,00	10.205.464.917,00	97,88	12.158.781.000,00	(16,07)
6	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.429.038.200,00	1.290.087.000,00	90,28	0,00	100,00
7	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	31.660.553.360,00	28.522.227.400,00	90,09	22.634.985.000,00	26,01
8	Pengadaan Bangunan Air Kotor	13.130.751.000,00	11.964.112.300,00	91,12	12.061.776.000,00	(0,81)
9	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.029.941.982,00	1.796.364.300,00	88,49	1.527.700.000,00	17,59
10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.263.701.250,00	1.128.421.000,00	89,29	1.181.634.000,00	(4,50)
11	Pengadaan Jaringan Listrik	14.571.675.098,00	14.371.961.900,00	98,63	8.489.587.000,00	69,29
12	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	1.196.097.000,00	(100,00)
13	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	14.443.347,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>213.225.317.172,00</b>	<b>200.681.712.555,00</b>	<b>94,12</b>	<b>226.307.789.870,00</b>	<b>(11,32)</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.626.077.315,00 atau sebesar 11,32% dari tahun sebelumnya.

**7.1.1.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>24.289.060,00</b>	<b>16.548.300,00</b>	<b>835.130.626,00</b>

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp16.548.300,00 dan Rp835.130.626,00 terdiri atas:

**Tabel 48 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	19.609.300,00	12.098.300,00	61,70	119.739.500,00	(89,90)
2	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	4.679.760,00	4.450.000,00	95,09	43.915.126,00	(89,87)
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	529.324.000,00	(100,00)
4	Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	(100,00)
6	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	124.272.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>24.289.060,00</b>	<b>16.548.300,00</b>	<b>68,13</b>	<b>835.130.626,00</b>	<b>(98,02)</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp818.582.326,00 atau sebesar 98,02% dari tahun sebelumnya.

**7.1.1.2.6 BELANJA MODAL ASET LAINNYA**

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>627.275.000,00</b>	<b>379.130.000,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp379.130.000,00 dan Rp0,00. Rincian Belanja Aset lainnya sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Software	627.275.000,00	379.130.000,00	60,44	0,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>627.275.000,00</b>	<b>379.130.000,00</b>	<b>60,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp379.130.000,00 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya.

### 7.1.1.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>22.426.879.377,00</u>	<u>746.426.000,00</u>	<u>6.471.571.965,00</u>

Belanja Tak Terduga adalah Belanja yang dialokasikan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022 digunakan untuk bantuan tidak terencana sebesar Rp746.426.000,00. Rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Belanja Tak Terduga**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Tak Terduga	22.426.879.377,00	746.426.000,00	3,33	6.471.571.965,00	(88,47)
	<b>Jumlah</b>	<b>22.426.879.377,00</b>	<b>746.426.000,00</b>	<b>3,30</b>	<b>6.471.571.965,00</b>	<b>(88,47)</b>

Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.725.145.965,00 atau sebesar 88,47% dari tahun sebelumnya

### 7.1.1.4 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pendapatan untuk tahun 2022 dan 2021 terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp4.100.025.000,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp795.261.950,00.

**Grafik 6 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan 2022**



#### 7.1.1.4.1 TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>4.100.025.000,00</u>	<u>4.100.025.000,00</u>	<u>4.161.500.000,00</u>

Jumlah realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp4.100.025.000,00 dan Rp4.161.500.000,00.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp61.475.000,00 atau sebesar 1,48% dari tahun sebelumnya.

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pendapatan Pajak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

#### 7.1.1.4.2 TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>795.261.950,00</b>	<b>795.261.950,00</b>	<b>1.022.044.470,00</b>

Jumlah realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp795.261.950,00 dan Rp1.022.044.470,00. Transfer bagi hasil retribusi daerah ini merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp226.782.500,00 atau sebesar 22,19% dari tahun sebelumnya.

#### 7.1.1.5 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>219.574.736.190,00</b>	<b>219.334.756.590,00</b>	<b>224.535.379.190,00</b>

Jumlah realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah Rp219.334.756.590,00 dan Rp224.535.379.190,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Transfer Bantuan Keuangan**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	99,89	224.535.379.190,00	(2,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>219.574.736.190,00</b>	<b>219.334.756.590,00</b>	<b>99,89</b>	<b>224.535.379.190,00</b>	<b>(2,32)</b>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.200.622.600,00 atau sebesar 2,32% dari tahun sebelumnya.

Adapun transfer bantuan ke desa dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 52 Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa)	115.240.966.190,00	115.240.966.190,00	100,00	115.040.966.190,00	0,17



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Dari Pemerintah Pusat	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77	109.494.413.000,00	(4,93)
	<b>Jumlah</b>	<b>219.574.736.190,00</b>	<b>219.334.756.590,00</b>	<b>99,89</b>	<b>224.535.379.190,00</b>	<b>(2,32)</b>

#### 7.1.1.6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>610.990.188.934,00</b>	<b>611.325.812.033,83</b>	<b>996.156.725.010,11</b>

Realisasi Penerimaan dari Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp611.325.812.033,83 atau 100,05% dari total anggaran sebesar Rp610.990.188.934,00. Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah	TA. 2022		TA. 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penggunaan SILPA	604.990.188.934,00	604.990.188.933,83	990.302.466.610,11
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dari BPR Tanah Laut	6.000.000.000,00	6.004.455.100,00	5.747.184.400,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	112.018.000,00	11.894.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	219.150.000,00	95.180.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>610.990.188.934,00</b>	<b>611.325.812.033,83</b>	<b>996.156.725.010,11</b>

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp611.325.812.033,83 pada tahun 2022 terdiri atas realisasi penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp604.990.188.933,83, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp6.004.455.100,00 dari BPR Tanah Laut dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebesar Rp331.168.000,00 berasal dari penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp112.018.000,00 dan penerimaan kembali Piutang Daerah sebesar Rp219.150.000,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp384.830.912.976,11 atau sebesar 38,63% dari tahun sebelumnya.

#### 7.1.1.7 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>75.000.000.000,00</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp75.000.000.000,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp75.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan pemberian investasi daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 54 Rincian Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	TA. 2022		TA. 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Investasi Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp55.000.000.000,00 atau sebesar 275% dari tahun sebelumnya. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebagai berikut:

- Pengeluaran Pembiayaan untuk Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/519-KUM/2022 Tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
- Pengeluaran Pembiayaan berupa Pinjaman Pinjaman Modal Usaha dan Penyaluran Dana yang ditempatkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/466-KUM/2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Realisasi Investasi Daerah Berupa Penempatan Penyaluran Dana Investasi kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Telaahan Staf Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan tanggal 25 Januari 2022 Nomor 500/55/I/EKO/2022 perihal permohonan realisasi investasi daerah berupa pinjaman modal usaha dengan Program Gapura Karomah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
- Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal ke Bank Kalsel sebesar Rp25.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

## 7.1.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

### 7.1.2.1 SALDO AWAL SAL

Saldo Awal Sisa Anggaran Lebih tahun 2022 adalah sebesar Rp604.990.188.933,83 merupakan sisa SAL tahun 2021.

### 7.1.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp604.990.188.933,83 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2022..

### 7.1.2.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surplus Anggaran tahun 2022 sebesar Rp295.377.738.906,95 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp536.325.812.033,83 sebagaimana diuraikan diatas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp831.703.550.940,78 SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja dan transfer, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) Dari target pendapatan sebesar Rp1.740.032.489.864,00 realisasinya sebesar Rp2.159.239.661.099,87 sehingga terdapat pencapaian diatas target pendapatan sebesar Rp419.207.171.235,87. Pelampauan target pendapatan terutama pada Pendapatan Transfer terlampaui sebesar Rp402.311.421.204,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.560.894.562.071,00 dan terealisasi sebesar Rp1.963.205.983.275,00, untuk Pendapatan Asli Daerah terlampaui sebesar Rp15.499.887.960,87 dari target Rp Rp178.390.127.793,00 realisasi sebesar Rp193.890.015.753,87 serta pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terlampaui sebesar Rp1.395.862.071,00 dari target Rp747.800.000,00 berhasil realisasi sebesar Rp2.143.662.071,00.
- 2) Dari anggaran belanja sebesar Rp2.122.153.778.445,00 realisasinya sebesar Rp1.863.861.922.192,92 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp258.291.856.252,08. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
  - a. Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar Rp197.381.842.547,08 yang terdiri atas:
    - selisih kurang anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp107.426.597.367,00;
    - selisih kurang anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp83.393.124.932,08;
    - selisih kurang anggaran Belanja Hibah sebesar Rp2.758.420.248,00;
    - selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 3.803.700.000,00.
  - b. Selisih kurang anggaran Belanja Modal sebesar Rp 38.989.580.728,00 yang terdiri atas:
    - selisih kurang Belanja Modal Tanah sebesar Rp 153.818.000,00;
    - selisih kurang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp18.252.826.009,00;
    - selisih kurang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp7.783.446.342,00;
    - selisih kurang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp12.543.604.617,00;
    - selisih kurang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp255.885.760,00;
  - c. Selisih kurang anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp21.680.453.377,00.
  - d. Tidak ada selisih kurang atau lebih pada Belanja Bagi Hasil.
  - e. Selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp239.979.600,00.
- 3) Dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp610.990.188.934,00 realisasinya sebesar Rp611.325.812.033,83 dengan rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan anggaran sebesar Rp604.990.188.934,00 terealisasi sebesar Rp604.990.188.933,83, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.004.455.100,00. Untuk Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp331.168.000,00 melebihi anggaran sebesar nilai tersebut.
- 4) Dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp75.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp75.000.000.000,00 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00, Penyertaan Modal sebesar Rp25.000.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan anggaran sesuai dengan realisasinya.

#### 7.1.2.4 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (SAL)

Jumlah SAL per 31 Desember 2022 sebesar Rp831.703.550.940,78 terdiri atas saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp762.266.975.672,06, Kas di BLUD sebesar Rp65.761.548.698,67, Kas di Dana BOS sebesar Rp3.626.594.575,05, dan Kas Lainnya Rp48.431.995,00.

#### 7.1.3 NERACA

##### 7.1.3.1 KAS DI KAS DAERAH

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>762.266.975.672,06</b>	<b>541.773.574.626,45</b>

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp762.266.975.672,06 dan Rp541.773.574.626,45 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 55 Saldo Kas Daerah**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Umum Daerah Bank Kalsel No. 007.00.03.00003.8	762.266.975.672,06	541.773.574.626,45	220.493.401.045,61	40,70
	<b>Jumlah</b>	<b>762.266.975.672,06</b>	<b>541.773.574.626,45</b>	<b>220.493.401.045,61</b>	<b>40,70</b>

Pada saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 terdiri atas saldo kas terikat (yang dibatasi penggunaannya) dan saldo kas murni (saldo kas yang bersumber dari pendapatan daerah) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 56 Rincian Saldo Kas Umum Daerah Tahun 2022**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	<b>Saldo Kas Terikat</b>	
1	Sisa DAK Fisik	694.643.326,00
2	Sisa DAK Non Fisik	19.758.636.719,00
3	Sisa DID Murni	1.248.786.633,00
4	Sisa Kas Murni	740.564.908.994,06
	<b>Total Saldo Kas</b>	<b>762.266.975.672,06</b>

Sisa saldo kas pada rekening kas umum secara terinci dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

##### 1) Sisa DAK Fisik

Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berada pada Kas Umum Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp694.643.326,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 57 Sisa DAK Fisik**

No.	Tahun	PAGU	Pagu Total Yang Diterima RKUD	Total Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah
1	2018	126.882.632.000,00	120.284.900.729,00	120.004.071.872,60	280.828.857,40
2	2019	109.209.362.000,00	103.104.915.132,00	102.741.731.482,00	363.183.650,00
3	2020	55.434.498.910,00	53.583.533.126,00	52.688.357.923,00	895.175.203,00
4	2021	81.530.572.000,00	77.929.750.716,00	77.628.520.725,00	301.229.991,00
5	2022	95.035.002.928,00	89.691.850.759,00	88.997.207.433,00	694.643.326,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 58 Penggunaan DAK Fisik 2022**

No	Bidang	Penyaluran	Realisasi	sis
<b>REGULER</b>		<b>62.057.727.473,00</b>	<b>61.889.757.584,00</b>	<b>167.969.889,00</b>
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>11.242.522.680,00</b>	<b>11.231.507.680,00</b>	<b>11.015.000,00</b>
	Subbid PAUD	198.515.000,00	197.165.000,00	1.350.000,00
	Subbid SD	8.895.453.690,00	8.895.453.690,00	-
	Subbid SMP	1.769.934.990,00	1.760.269.990,00	9.665.000,00
	Subbid SKB	201.080.000,00	201.080.000,00	-
	Subbid perpustakaan daerah	177.539.000,00	177.539.000,00	-
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>21.091.856.293,00</b>	<b>20.998.089.780,00</b>	<b>93.766.513,00</b>
	subbid Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	15.733.906.340,00	15.733.906.340,00	-
	Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	77.055.000,00	77.055.000,00	-
	Pengendalian Penyakit	296.883.840,00	296.883.840,00	-
	Penguatan Sistem Kesehatan	398.774.460,00	372.669.447,00	26.105.013,00
	Kefarmasian	3.441.079.653,00	3.373.418.153,00	67.661.500,00
	Keluarga Berencana	1.144.157.000,00	1.144.157.000,00	-
<b>3</b>	<b>Jalan</b>	<b>10.762.859.500,00</b>	<b>10.762.859.500,00</b>	<b>-</b>
	Subbid Jalan (Reguler)	10.762.859.500,00	10.762.859.500,00	-
<b>4</b>	<b>Air Minum</b>	<b>11.033.469.000,00</b>	<b>10.970.280.624,00</b>	<b>63.188.376,00</b>
	Subbid Air Minum	11.033.469.000,00	10.970.280.624,00	63.188.376,00
<b>5</b>	<b>Sanitasi</b>	<b>1.950.000.000,00</b>	<b>1.950.000.000,00</b>	<b>-</b>
	Subbid Sanitasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	-
<b>6</b>	<b>Perumahan dan Permukiman</b>	<b>5.977.020.000,00</b>	<b>5.977.020.000,00</b>	<b>-</b>
	Subbid Perumahan dan Permukiman	5.977.020.000,00	5.977.020.000,00	-
<b>PENUGASAN</b>		<b>27.634.123.286,00</b>	<b>27.107.449.849,00</b>	<b>526.673.437,00</b>
<b>7</b>	<b>Jalan</b>	<b>16.454.105.000,00</b>	<b>16.454.105.000,00</b>	<b>-</b>
	Subbid Jalan	16.454.105.000,00	16.454.105.000,00	-
<b>8</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>1.291.125.000,00</b>	<b>1.291.125.000,00</b>	<b>-</b>
	Subbid Lingkungan Hidup	1.291.125.000,00	1.291.125.000,00	-
<b>9</b>	<b>Pertanian</b>	<b>5.256.882.750,00</b>	<b>5.249.288.749,00</b>	<b>7.594.001,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Bidang	Penyaluran	Realisasi	sis
	Subbid Pertanian (Ketahanan Pangan)	5.256.882.750,00	5.249.288.749,00	7.594.001,00
<b>10</b>	<b>Irigasi</b>	<b>4.274.239.500,00</b>	<b>3.764.180.500,00</b>	<b>510.059.000,00</b>
	Subbid Irigasi	4.274.239.500,00	3.764.180.500,00	510.059.000,00
<b>11</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>357.771.036,00</b>	<b>348.750.600,00</b>	<b>9.020.436,00</b>
	Subbid Kelautan dan Perikanan	357.771.036,00	348.750.600,00	9.020.436,00
	<b>TOTAL</b>	<b>89.691.850.759,00</b>	<b>88.997.207.433,00</b>	<b>694.643.326,00</b>

2) Sisa DAK Non Fisik

Sisa DAK Non Fisik yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp19.758.636.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59 Sisa DAK Non Fisik 2022

NO	URAIAN	Prog / Kegiatan	PENYALURAN	REALISASI	SISA	KET	sisa tahun lalu
1	Tunjangan Profesi Guru	02.01	91.597.659.700,00	83.948.591.100	7.649.068.600,00		
2	Tambahan Penghasilan Guru	02.01	1.542.250.000,00	1.503.097.500,00	39.152.500,00		
3	Tunjangan Khusus Guru	02.01	2.773.343.900,00	269.775.000,00	2.503.568.900,00		
4	Bantuan Operasional Kesehatan		18.803.100.000,00	11.159.112.003,00	7.643.987.997,00		
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	20.03, 17.03, 17.07, 18.04,	3.783.556.000,00	2.361.255.108,00	1.422.300.892,00		
6	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	19.01, 19.03, 21.06	451.800.000,00	163.795.644,00	288.004.356,00		
7	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19.02	138.100.000,00	120.413.416,00	17.686.584,00		
8	Dana Fasilitas Penanaman Modal	19.02	383.914.000,00	297.118.873,00	86.795.127,00		
9	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Ukm		404.200.000,00	331.579.250,00	72.620.750,00		
10	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	01.02, 05.10, 06.02, 06.09, 08.04	225.781.013,00	190.330.000,00	35.451.013,00		
			<b>120.103.704.613,00</b>	<b>100.345.067.894,00</b>	19.758.636.719,00		

Adapun rincian mutasi penggunaan Dana DAK Non fisik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**a) Tunjangan Profesi Guru PNSD**

Sisa Tunjangan Profesi Guru pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.649.068.600,00. Berikut perkembangan saldo sisa tunjangan Profesi Guru PNSD dari tahun ke tahun pada Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

**Tabel 60 Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru**

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	2010	11.694.415.200,00	11.764.110.700,00	0,00	-69.695.500,00
2	2011	27.685.533.980,00	27.542.301.400,00	0,00	143.232.580,00
3	2012	49.538.180.580,00	49.006.722.810,00	0,00	531.457.770,00
4	2013	64.711.039.770,00	57.501.575.600,00	0,00	7.209.464.170,00
5	2014	89.572.005.170,00	82.510.141.760,00	41.192.400,00	7.020.671.010,00
6	2015	102.215.322.010,00	88.075.520.700,00	248.534.304,00	13.891.267.006,00
7	2016	94.253.946.464,00	93.237.421.740,00	32.980.285,00	983.544.439,00
8	2017	86.963.796.585,00	85.086.206.030,00	18.807.170,00	1.858.783.385,00
9	2018	93.173.587.000,00	88.309.157.300,00	0,00	4.864.429.700,00
10	2019	95.585.044.200,00	94.047.384.240,00	0,00	1.537.659.960,00
11	2020	92.572.521.960,00	87.318.826.687,00	0,00	5.253.695.273,00
12	2021	104.497.615.273,00	99.904.970.184,00	10.158.878,00	4.582.486.211,00
13	2022	91.597.659.700,00	83.948.591.100,00	0,00	7.649.068.600,00

**b) Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD**

Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp39.152.500,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

**Tabel 61 Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD**

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	2011	6.329.252.000,00	5.994.752.000,00	0,00	334.500.000,00
2	2012	4.891.500.000,00	4.269.500.000,00	0,00	622.000.000,00
3	2013	4.867.000.000,00	3.519.500.000,00	0,00	1.347.500.000,00
4	2014	3.650.500.000,00	2.608.000.000,00	0,00	1.042.500.000,00
5	2015	2.839.000.000,00	2.673.000.000,00	86.400.000,00	252.400.000,00
6	2016	2.568.400.000,00	2.363.500.000,00	0,00	204.900.000,00
7	2017	2.093.400.000,00	1.440.000.000,00	0,00	653.400.000,00
8	2018	1.452.000.000,00	776.250.000,00	0,00	675.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
9	2019	1.140.770.000,00	532.250.000,00	0,00	608.520.000,00
10	2020	747.000.000,00	715.500.000,00	0,00	31.500.000,00
11	2021	646.967.000,00	592.000.000,00	2.137.500,00	57.104.500,00
12	2022	1.542.250.000,00	1.503.097.500,00	0,00	39.152.500,00

**c) Tunjangan Khusus Guru**

Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.503.568.900,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Tunjangan Khusus Guru dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

**Tabel 62 Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru**

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	3.035.117.400,00
2	2019	4.750.197.000,00	1.425.059.000,00	1.185.727.200,00	3.274.449.200,00
3	2020	0,00	0,00	262.428.900,00	3.012.020.300,00
4	2021	0,00	3.012.020.300,00	238.676.400,00	2.773.343.900,00
5	2022	1.088.648.000,00	2.773.343.900,00	269.775.000,00	2.503.568.900,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

**d) Bantuan Operasional Kesehatan**

Sisa Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.643.987.997,00. Berikut perkembangan saldo Sisa bantuan Operasional Kesehatan dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

**Tabel 63 Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan**

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	2	3	4	5	6
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	4.999.852.235,00
2	2019	21.521.860.000,00	21.521.860.000,00	14.695.933.460,00	6.825.926.540,00
3	2020	16.147.306.000,00	29.987.232.540,00	12.442.731.749,00	17.544.500.791,00
4	2021	19.191.751.000,00	17.544.500.791,00	11.339.560.465,00	6.204.940.326,00
5	2022	18.803.100.000,00	18.803.100.000,00	11.159.112.003,00	7.643.987.997,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

**e) Bantuan Operasional Keluarga Berencana**

Sisa Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.422.300.892,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Bantuan Operasional Keluarga Berencana dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

**Tabel 64 Sisa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana**

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	566.703.170,00
2	2019	2.365.615.000,00	2.365.615.000,00	1.534.262.380,00	831.352.620,00
3	2020	3.136.358.000,00	3.136.358.000,00	2.319.579.945,00	816.778.055,00
4	2021	3.432.414.000,00	3.432.414.000,00	2.030.804.870,00	1.401.609.130,00
5	2022	3.783.556.000,00	3.783.556.000,00	2.361.255.108,00	1.422.300.892,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

**f) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Sisa Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2022 adalah Rp288.004.356,00.

**g) Dana Ketahanan Pangan dan Perikanan**

Sisa Dana Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2022 adalah Rp17.686.584,00.

**h) Dana Fasilitasi Penanaman Modal**

Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal pada tahun 2022 adalah Rp86.795.127,00.

**i) Dana Peningkatan Koperasi dan UKM**

Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp72.620.750,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

**Tabel 65 Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM**

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019	358.000.000,00	358.000.000,00	327.183.833,00	30.816.167,00
3	2020	417.358.000,00	417.358.000,00	269.932.040,00	147.425.960,00
4	2021	390.304.000,00	390.304.000,00	279.349.149,00	110.954.851,00
5	2022	404.200.000,00	404.200.000,00	331.579.250,00	72.620.750,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

**j) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp35.451.013,00 dan Rp225.781.013,00 Berikut perkembangan saldo Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

**Tabel 66 Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan**

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	91.617.233,00
2	2019	1.205.909.000,00	1.114.291.767,00	1.132.703.816,00	73.205.184,00
3	2020	417.358.000,00	1.153.072.816,00	1.134.918.819,00	91.359.181,00
4	2021	1.221.514.000,00	1.221.514.000,00	995.732.987,00	225.781.013,00
5	2022	225.781.013,00	225.781.013,00	190.330.000,00	35.451.013,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan. Dana BOS PAUD pada tahun 2022 tidak masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tetapi langsung disalurkan ke masing-masing TK dan PAUD.

**3) Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Murni**

Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Murni pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.248.786.633,00 dengan jumlah dana yang disalurkan dari RKUN ke RKUD Pemkab Tanah Laut adalah sebesar Rp10.342.946.000,00 dan realisasi belanjanya sebesar Rp9.094.159.367,00. Dana Insentif Daerah Murni pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dipergunakan untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Penguatan Perekonomian Daerah termasuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri Kecil, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta untuk perlindungan sosial.

**4) Sisa Kas Murni**

Sisa Kas Murni Tahun 2022 adalah sebesar Rp740.564.908.994,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 007.0003.00.003.8 selain saldo terikat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

**7.1.3.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
0,00	0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**7.1.3.3 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

7.1.3.4 KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

31 Desember 2022

(Rp)

**65.761.548.698,67**

31 Desember 2021

(Rp)

**59.162.059.397,36**

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp65.761.548.698,67 dan Rp59.162.059.397,36 terdiri dari saldo Kas pada RSUD dan PKM yang merupakan UPT Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Kas BLUD

No.	Uraian	Saldo Kas (Rp)		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		Tunai	Bank	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	RSUD H. Boejasin	16.608.788,00	55.764.148.967,31	55.780.757.755,31	46.205.547.508,43	9.575.210.246,88	20,72
2	RSUD KH. Mansyur	5.756.789,00	2.933.549.660,79	2.939.306.449,79	1.736.678.730,00	1.202.627.719,79	69,25
3	PKM Angsau	142.000,00	744.581.112,65	744.723.112,65	791.146.831,39	(46.423.718,74)	(5,87)
4	PKM Asam-Asam	350.000,00	352.035.006,78	352.385.006,78	442.145.483,55	(89.760.476,77)	(20,30)
5	PKM Batakan	0,00	429.909.061,42	429.909.061,42	949.800.761,55	(519.891.700,13)	(54,74)
6	PKM Bati-Bati	235.500,00	656.317.704,40	656.553.204,40	950.615.960,81	(294.062.756,41)	(30,93)
7	PKM Bumi Makmur	72.000,00	307.046.300,35	307.118.300,35	702.818.235,66	(395.699.935,31)	(56,30)
8	PKM Jorong	229.000,00	372.993.546,68	373.222.546,68	624.377.969,40	(251.155.422,72)	(40,22)
9	PKM Kait-Kait	98.000,00	143.049.125,19	143.147.125,19	262.387.727,96	(119.240.602,77)	(45,44)
10	PKM Kintap	0,00	535.390.302,93	535.390.302,93	829.565.487,91	(294.175.184,98)	(35,46)
11	PKM Kurau	0,00	364.203.200,94	364.203.200,94	466.719.396,97	(102.516.196,03)	(21,97)
12	PKM Padang Luas	0,00	315.312.222,20	315.312.222,20	320.070.193,49	(4.757.971,29)	(1,49)
13	PKM Panyipatan	0,00	539.629.524,25	539.629.524,25	673.639.277,63	(134.009.753,38)	(19,89)
14	PKM Pelaihari	305.500,00	19.344.848,87	19.650.348,87	409.661.276,74	(390.010.927,87)	(95,20)
15	PKM Sungai Cuka	126.000,00	132.253.770,03	132.379.770,03	319.090.221,29	(186.710.451,26)	(58,51)
16	PKM Sungai Riam	68.000,00	156.553.322,03	156.621.322,03	397.166.915,52	(240.545.593,49)	(60,57)
17	PKM Tajau Pecah	62.000,00	217.065.851,01	217.127.851,01	849.114.977,66	(631.987.126,65)	(74,43)
18	PKM Tambang Ulang	0,00	278.580.051,97	278.580.051,97	467.737.687,07	(189.157.635,10)	(40,44)
19	PKM Takisung	287.000,00	1.035.347.920,65	1.035.634.920,65	1.290.031.459,66	(254.396.539,01)	(19,72)
20	PKM Tanjung Habulu	80.000,00	104.043.815,43	104.123.815,43	159.451.659,73	(55.327.844,30)	(34,70)
21	PKM Tirtajaya	0,00	160.714.435,05	160.714.435,05	314.291.634,94	(153.577.199,89)	(48,86)
22	PKM Durian Bungkok	53.000,00	35.482.756,83	35.535.756,83	0,00	35.535.756,83	100,00
23	PKM Bentok Kampung	70.000,00	130.403.833,96	130.473.833,96	0,00	130.473.833,96	100,00
24	Balai Labkes	0,00	9.048.779,95	9.048.779,95	0,00	9.048.779,95	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>24.543.577,00</b>	<b>65.737.005.121,67</b>	<b>65.761.548.698,67</b>	<b>59.162.059.397,36</b>	<b>6.599.489.301,31</b>	<b>11,15</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo tunai sebesar Rp24.543.577,00 pada 2 (Dua) RSUD dan 14 (empat belas) PKM yang merupakan pendapatan jasa pelayanan pada tanggal 31 Desember 2022. Rincian lengkap dapat dilihat pada *Lampiran 1.1*. Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

#### 7.1.3.5 KAS DI DANA KAPITASI JKN

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

#### 7.1.3.6 KAS DI DANA BOS

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>3.626.594.575,05</u>	<u>4.054.554.910,02</u>

Kas di Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.626.594.575,05 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.054.554.910,02. Kas Dana BOS terdiri dari Kas Pengelolaan dana BOS berada pada 49 SMPN dan 235 SDN dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perhitungan dana BOS Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Bank Kalsel	:	Rp	4.050.360.078,02	
Saldo Awal Tunai	:	Rp	4.194.832,00	(+)
<b>Total Saldo Awal</b>	:	<b>Rp</b>	<b>4.054.554.910,02</b>	
Pendapatan BOS	:	Rp	36.153.634.262,00	
Pendapatan Lain-Lain	:	Rp	178.287.985,03	(+)
<b>Total Pendapatan</b>	:	<b>Rp</b>	<b>36.331.922.247,03</b>	
Belanja BOS	:	Rp	36.759.882.582,00	(-)
<b>Saldo Kas Dana BOS</b>	:	<b>Rp</b>	<b>3.626.594.575,05</b>	

Pada SDN Riam Pinang terdapat selisih antara saldo awal audited dengan saldo awal rekening koran, pada saldo awal audited saldo sebesar Rp4.107.055,00, sedangkan pada rekening koran Rp3.966.200,00 selisih ini dikarenakan adanya penutupan rekening tabungan lama tetapi dana yang masih tersisa di rekening lama tersebut baru dipindah bukukan atau disetorkan pada rekening giro yang baru pada tanggal 6 Januari 2022 sebesar Rp140.855,00. Pada SDN Handil Negara 1 terdapat selisih antara saldo awal dengan saldo rekening koran, pada saldo awal audited hanya sebesar Rp3.123.485,00 sedangkan pada rekening koran Rp7.109.485,00. Selisih ini dikarenakan adanya salah transfer pada tanggal 29 Desember 2021 dari pihak ketiga an CV. Eureka Book House sebesar Rp3.986.000,00, saldo tersebut sudah ditarik bulan Januari tahun 2022. Rincian rekapitulasi Dana BOS dapat dilihat pada *Lampiran 1.2*.

#### 7.1.3.7 KAS LAINNYA

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>48.431.995,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.431.995,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Kas Lainnya merupakan saldo dari Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan per 31 Desember 2022 sebesar

Rp48.431.995,00 merupakan Bantuan Operasional pada PAUD di Kabupaten Tanah Laut. Rincian Saldo Kas BOP Kesetaraan dan BOP PAUD dapat dilihat dalam *Lampiran 14*.

### 7.1.3.8 PIUTANG

Piutang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Lainnya. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 68 Piutang**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Pajak	17.671.672.015,00	16.310.176.319,00	1.361.495.696,00	8,35
2	Piutang Retribusi Daerah	745.347.500,00	428.041.500,00	317.306.000,00	74,13
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	30.678.546.590,64	57.002.494.023,12	(26.323.947.432,48)	(46,18)
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	24.817.804.050,00	(24.817.804.050,00)	(100,00)
5	Piutang Transfer Antar Daerah	50.656.124.065,67	49.896.491.243,53	759.632.822,14	1,52
6	Piutang Lainnya	771.850.000,00	816.850.000,00	(45.000.000,00)	(5,51)
	<b>Jumlah</b>	<b>100.523.540.171,31</b>	<b>149.271.857.135,65</b>	<b>(48.748.316.964,34)</b>	<b>(32,66)</b>

Penjelasan atas masing-masing piutang tersebut adalah sebagai berikut:

#### 7.1.3.8.1 PIUTANG PAJAK DAERAH

**31 Desember 2022**  
(Rp)

**17.671.672.015,00**

**31 Desember 2021**  
(Rp)

**16.310.176.319,00**

Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp17.671.672.015,00 dan Rp16.310.176.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 69 Piutang Pajak Daerah**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pajak PBB – P2	17.670.922.015,00	16.309.426.319,00	1.361.495.696,00	8,35
2	Pajak Restoran / Rumah Makan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.671.672.015,00</b>	<b>16.310.176.319,00</b>	<b>1.361.495.696,00</b>	<b>8,35</b>

Dari tabel Piutang Pajak Daerah tersebut dapat dijelaskan:

- Saldo Piutang PBB-P2 selama tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 70 Piutang PBB-P2**

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal piutang bruto PBB P2	16.309.426.319,00
Koreksi Saldo awal Piutang PBB	0,00
Penambahan berupa penetapan PBB P2 Th. 2022	2.465.780.312,00
Pengurangan berupa penerimaan pendapatan PBB P2 di tahun 2022	1.104.284.616,00
<b>Saldo akhir piutang bruto PBB P2</b>	<b>17.670.922.015,00</b>

Daftar Piutang PBB-P2 terdapat pada *Lampiran 2.1*.

- 2) Piutang atas Pajak Restoran/Rumah Makan sebesar Rp750.000,00 merupakan Piutang yang berasal dari penerimaan jasa restoran oleh 2 (dua) penyedia yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah namun belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 antara lain Rumah Makan Kyta sebesar Rp350.000,00 atas ketetapan bulan Desember 2015 dan Rumah Makan Ramona sebesar Rp400.000,00 atas ketetapan bulan Oktober dan November 2015. Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan ini termasuk dalam kategori piutang macet karena umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sehingga penyisihan piutang sebesar Rp750.000,00.

Dari piutang tersebut sudah dilakukan penyisihan piutang. Perhitungan Piutang Pajak Netto dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 71 Piutang Pajak Netto**

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Pajak PBB – P2	17.670.922.015,00	13.273.093.532,31	4.397.828.482,69
2	Pajak Restoran/ Rumah Makan	750.000,00	750.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.671.672.015,00</b>	<b>13.273.843.532,31</b>	<b>4.397.828.482,69</b>

**7.1.3.8.2 PIUTANG RETRIBUSI**

**31 Desember 2022**  
 (Rp)  
**745.347.500,00**

**31 Desember 2021**  
 (Rp)  
**428.041.500,00**

Saldo Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan atas retribusi daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp745.347.500,00 dan Rp428.041.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 72 Piutang Retribusi Daerah**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Retribusi Pasar	679.577.000,00	353.771.000,00	325.806.000,00	92,10
	Retribusi Parkir Khusus				
2	Dinas Perhubungan	34.140.000,00	42.640.000,00	(8.500.000,00)	100,00
3	Dinas Koperasi, UK dan Perdagangan	31.630.500,00	31.630.500,00	0,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>745.347.500,00</b>	<b>428.041.500,00</b>	<b>317.306.000,00</b>	<b>74,13</b>

**Piutang Retribusi Pasar**

Piutang atas Retribusi Pasar sebesar Rp679.577.000,00 merupakan nilai bruto piutang atas sewa warung, kios/los yang belum dibayar oleh penyewa sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Piutang bruto atas retribusi pasar diketahui sebesar Rp679.577.000,00 dan penyisihan piutang dengan nilai Rp292.592.975,00.

Daftar Piutang Retribusi Pasar terdapat pada *Lampiran 3.1*.

### Piutang Retribusi Parkir

Piutang Retribusi Parkir sebesar Rp65.770.500,00 merupakan nilai bruto yang terdiri dari Piutang Retribusi Parkir dari Dinas Perhubungan sebesar Rp34.140.000,00 dan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan sebesar Rp31.630.500,00;

Saldo piutang bruto retribusi parkir dari dua SKPD tersebut telah dilakukan penyisihan piutang dengan nilai Rp21.865.000,00 pada Dinas Perhubungan serta penyisihan piutang dengan nilai Rp31.630.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

*Aging schedule* dan persentase penyisihan sebagai dasar perhitungan penyisihan sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Daftar piutang Retribusi Parkir terdapat pada *Lampiran 3.2* dan *Lampiran 3.3*.

Perhitungan Piutang Retribusi netto dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 73 Piutang Retribusi Netto**

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Retribusi Pasar	679.577.000,00	292.592.975,00	386.984.025,00
2	Dinas Perhubungan	34.140.000,00	21.865.000,00	12.275.000,00
3	Dinas Koperasi, UK dan Perdagangan	31.630.500,00	31.630.500,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>745.347.500,00</b>	<b>346.088.475,00</b>	<b>399.259.025,00</b>

### 7.1.3.8.3 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

**31 Desember 2022**  
(Rp)

**30.678.546.590,64**

**31 Desember 2021**  
(Rp)

**57.002.494.023,12**

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp30.678.546.590,64 dan sebesar Rp57.002.494.023,12 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 74 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	360.299.547,12	328.426.771,12	31.872.776,00	9,70
2	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	111.055.000,00	118.952.950,00	(7.897.950,00)	(6,64)
3	Piutang BLUD	3.738.127.295,40	33.790.199.377,00	(30.052.072.081,60)	(88,94)
4	Piutang Sewa Pakai Kapal	1.740.950.000,00	1.770.950.000,00	(30.000.000,00)	(1,69)
5	Piutang Sapi Jantan	292.641.600,00	334.642.100,00	(42.000.500,00)	0,00
6	Piutang Sapi Betina	132.800.000,00	272.250.000,00	(139.450.000,00)	0,00
7	Piutang Ijin Usaha Pertambangan	952.382.510,00	1.052.382.510,00	(100.000.000,00)	(9,50)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
8	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BPR	23.248.360.500,00	19.252.815.600,00	3.995.544.900,00	20,75
	- Dinas Kesehatan	23.830.000,00	0,00	23.830.000,00	0,00
	- DPPKBP3A	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00
	- Temuan Inspektorat	0,00	81.874.715,00	(81.874.715,00)	(100,00)
9	Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF	77.830.638,12	0,00	77.830.638,12	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30.678.546.590,64</b>	<b>57.002.494.023,12</b>	<b>(26.323.947.432,48)</b>	<b>(46,18)</b>

### 1. Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

31 Desember 2022  
(Rp)

360.299.547,12

31 Desember 2021  
(Rp)

328.426.771,12

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp360.299.547,12 dan Rp328.426.771,12 Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan saldo dari 6 (enam) orang yang telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian daerah. Rincian bruto Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut.

Tabel 75 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	RHM	43.589.948,00	58.717.172,00	(15.127.224,00)	(25,76)
2	H.JR/IQB	28.683.765,00	31.683.765,00	(3.000.000,00)	(9,47)
3	NASR	55.799.998,85	55.799.998,85	0,00	0,00
4	HJ.AST/PT.RUJ	93.141.441,43	93.141.441,43	0,00	0,00
5	CV.ACG/HJ.NS	6.136.699,84	6.136.699,84	0,00	0,00
6	HJ. S/CV.H	82.947.694,00	82.947.694,00	0,00	0,00
7	MST	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>360.299.547,12</b>	<b>328.426.771,12</b>	<b>31.872.776,00</b>	<b>9,70</b>

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp310.549.547,12 Rincian lebih lanjut dimuat dalam *Lampiran 4.1*.

### 2. Piutang Tuntutan Perbendaharaan

31 Desember 2022  
(Rp)

111.055.000,00

31 Desember 2021  
(Rp)

118.952.950,00

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp111.055.000,00 dan sebesar Rp118.952.950,00

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan saldo dari 2 (dua) orang yang telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian daerah. Rincian bruto Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebagai berikut:

**Tabel 76 Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	ADH	0,00	7.897.950,00	(7.897.950,00)	(100,00)
2	KART	111.055.000,00	111.055.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>111.055.000,00</b>	<b>118.952.950,00</b>	<b>(7.897.950,00)</b>	<b>(6,64)</b>

Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp111.055.000,00. Rincian lebih lanjut dimuat dalam *Lampiran 4.2*.

### 3. Piutang BLUD

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u><b>3.738.127.295,40</b></u>	<u><b>33.790.199.377,00</b></u>

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.738.127.295,40 dan Rp33.790.199.377,00. Saldo piutang ini merupakan saldo Piutang RSUD H. Boejasin sebesar Rp3.725.125.966,00, RSUD KH. Mansyur sebesar Rp1.688.082,40 dan 12 PKM BLUD sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp11.313.247,00.

Piutang BLUD Bruto dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 77 Piutang PKM BLUD Bruto**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	PKM Batakan	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2	PKM Padang Luas	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
4	PKM Takisung	0,00	27.340.000,00	(27.340.000,00)	(100,00)
5	PKM Kait Kait	0,00	4.460.000,00	(4.460.000,00)	(100,00)
6	PKM Tambang Ulang	0,00	11.125.000,00	(11.125.000,00)	(100,00)
7	PKM Tanjung Habulu	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
8	PKM Panyipatan	1.304,00	5.300.000,00	(5.298.696,00)	(99,98)
9	PKM Asam Asam	0,00	22.615.000,00	(22.615.000,00)	(100,00)
10	PKM Bati Bati	3.797.100,00	0,00	3.797.100,00	100,00
11	PKM Kintap	814.305,00	0,00	814.305,00	100,00
12	PKM Sungai Cuka	6.698.038,00	5.445.400,00	1.252.638,00	23,00
13	RSUD KH.Mansyur	1.688.082,40	0,00	1.688.082,40	100,00
14	RSUD H. Boejasin	3.725.125.966,00	33.709.513.977,00	(29.984.388.011,00)	(88,95)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.738.127.295,40</b>	<b>33.790.199.377,00</b>	<b>(30.052.072.081,60)</b>	<b>(88,94)</b>

Piutang Netto BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 78 Piutang PKM BLUD Netto**

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	PKM Batakan	2.500,00	12,5	2.487,50
2	PKM Panyipatan	1.304,00	6,52	1.297,48
3	PKM Bati Bati	3.797.100,00	18.985,50	3.778.114,50
4	PKM Kintap	814.305,00	4.071,53	810.233,48
5	PKM Sungai Cuka	6.698.038,00	33.490,19	6.664.547,81
6	RSUD KH.Mansyur	1.688.082,40	8.440,41	1.679.641,99
7	RSUD H. Boejasin	3.725.125.966,00	86.748.829,69	3.638.377.136,31
	<b>Jumlah</b>	<b>3.738.127.295,40</b>	<b>86.813.836,34</b>	<b>3.651.313.459,07</b>

Rincian lengkap Piutang BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 4.3*.

**4. Piutang Sewa Pakai Kapal**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.740.950.000,00**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**1.770.950.000,00**

Saldo Piutang Sewa Pakai Kapal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.740.950.000,00 dan Rp1.770.950.000,00 terdiri atas:

**Tabel 79 Piutang Sewa Pakai Kapal Bruto**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Perjanjian 30 Desember 2010	39.000.000,00	41.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,88)
2	Perjanjian 30 Desember 2011	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3	Perjanjian 08 Januari 2013	550.500.000,00	561.500.000,00	(11.000.000,00)	(1,96)
4	Perjanjian 01 April 2013	547.750.000,00	553.750.000,00	(6.000.000,00)	(1,08)
5	Perjanjian 01 Juli 2013	588.700.000,00	599.700.000,00	(11.000.000,00)	(1,83)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.740.950.000,00</b>	<b>1.770.950.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(1,69)</b>

Piutang Sewa Pakai Kapal Alat Tangkap beserta kelengkapannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.740.950.000,00 merupakan Piutang Sewa Kapal untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Terhadap piutang ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp1.740.950.000,00 sebagai berikut:

**Tabel 80 Piutang Sewa Pakai Kapal Netto**

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Perjanjian 30 Desember 2010	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
2	Perjanjian 30 Desember 2011	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3	Perjanjian 08 Januari 2013	550.500.000,00	550.500.000,00	0,00

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
4	Perjanjian 01 April 2013	547.750.000,00	547.750.000,00	0,00
5	Perjanjian 01 Juli 2013	588.700.000,00	588.700.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.740.950.000,00</b>	<b>1.740.950.000,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian Piutang Sewa Pakai Kapal pada *Lampiran 4.4*.

**5. Piutang Sapi Jantan**

<b>31 Desember 2022</b> (Rp)	<b>31 Desember 2021</b> (Rp)
<u><b>292.641.600,00</b></u>	<u><b>334.642.100,00</b></u>

Saldo Piutang Sapi Jantan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp292.641.600,00 dan Rp334.642.100,00. Piutang Sapi Jantan sebesar Rp292.641.600,00 merupakan nilai bruto atas penjualan sapi jantan yang telah dilakukan penyisihan sebesar piutang yaitu Rp292.641.600,00 dikarenakan umur piutang lebih dari 3 tahun (masuk kategori kualitas macet). Rincian Piutang Sapi Jantan terdapat pada *Lampiran 4.5*.

**6. Piutang Sapi Betina**

<b>31 Desember 2022</b> (Rp)	<b>31 Desember 2021</b> (Rp)
<u><b>132.800.000,00</b></u>	<u><b>272.250.000,00</b></u>

Saldo Piutang Sapi Betina per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp132.800.000,00 dan Rp272.250.000,00. Piutang Sapi Betina sebesar Rp132.800.000,00 merupakan nilai bruto atas penjualan sapi betina setelah dilakukan verifikasi ke peternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dilakukan penyisihan sebesar Rp39.800.000,00. Rincian Piutang Sapi Betina terdapat pada *Lampiran 4.6*.

**7. Piutang Ijin Usaha Pertambangan**

<b>31 Desember 2022</b> (Rp)	<b>31 Desember 2021</b> (Rp)
<u><b>952.382.510,00</b></u>	<u><b>1.052.382.510,00</b></u>

Pada tahun 2020 sebelumnya Piutang Ijin Usaha Pertambangan masuk ke dalam rekening Piutang Retribusi, dan pada tahun 2022 direklasifikasi ke rekening Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.

Dengan adanya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka semua perda pajak dan retribusi yang tidak diatur dalam Undang-undang tersebut tidak boleh dipungut lagi. Salah satunya Peraturan Daerah Retribusi Ijin Usaha Pertambangan; Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 perda – perda yang tidak diatur dalam UU 28 Tahun 2009 tidak boleh dipungut lagi dan dicabut kecuali sisa-sisa piutang tahun sebelumnya;

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 11.b/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal

25 Mei 2019 Pemerintah Daerah sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan namun berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/390/BMB/DESDM tanggal 22 Januari 2021 menyatakan bahwa Piutang Ijin Usaha Pertambangan sebesar Rp1.119.369.010,00 menjadi kewenangan dan tercatat di Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Saldo Piutang Ijin Usaha Pertambangan sebesar Rp952.382.510,00 merupakan piutang bruto yang telah dilakukan penyisihan sebesar Rp952.382.510,00. Namun berdasarkan aging schedule piutang, diketahui bahwa Piutang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan umur piutangnya masuk dalam kategori piutang macet karena diatas 3 tahun. Jadi pencatatan nettonya Rp0,00 dan sampai saat ini masih dalam proses penagihan.

**8. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>23.272.460.000,00</b>	<b>19.334.690.315,00</b>

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp23.272.460.000,00 dan Rp19.334.690.315,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 81 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	BPR	23.248.360.500,00	19.252.815.600,00	3.995.544.900,00	20,75
2	Dinas Kesehatan	23.830.000,00	0,00	23.830.000,00	100,00
3	DPPKBP3A	269.500,00	0,00	269.500,00	100,00
4	Temuan Inspektorat	0,00	81.874.715,00	(81.874.715,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>23.272.460.000,00</b>	<b>19.334.690.315,00</b>	<b>3.937.769.685,00</b>	<b>20,37</b>

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp23.272.460.000,00 terdiri dari Pinjaman yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut untuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat sebesar Rp23.248.360.500,00 yang akan dikembalikan dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian, dan Piutang Pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp23.830.000,00 dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp269.500,00.

**Tabel 82 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Netto**

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	BPR	23.248.360.500,00	8.141.472.200,00	15.106.888.300,00
2	Dinas Kesehatan	23.830.000,00	119.150,00	23.710.850,00
3	DPPKBP3A	269.500,00	1.347,50	268.152,50
	<b>Jumlah</b>	<b>23.272.460.000,00</b>	<b>8.141.592.697,50</b>	<b>15.130.867.302,50</b>

Rincian piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya terdapat pada *Lampiran 4.7*.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

9. Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>77.830.638,12</b>	<b>0,00</b>

Saldo Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp77.830.638,12 dan Rp0,00. Piutang Remunerasi Dana TDF ini merupakan hasil pengelolaan Dana TDF atas dana transfer non tunai yang tersimpan di Bank Indonesia pada Rekening Lain BI TDF TKD Kab Tanah Laut Nomor Rekening 519000452980. Saldo Remunerasi atas Dana Transfer TDF ini berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Rekening Bank Indonesia Kabupaten Tanah Laut Nomor S-214/WPB.19/2023 Tanggal 13 Februari 2023 Perihal Kebijakan Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Melalui *Treasury Deposit Facilities* (TDF).

Perhitungan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah netto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 83 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	360.299.547,12	310.549.547,12	49.750.000,00
2	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	111.055.000,00	111.055.000,00	0,00
3	Piutang BLUD	3.738.127.295,40	86.813.836,33	3.651.313.459,07
4	Piutang Sewa Pakai Kapal	1.740.950.000,00	1.740.950.000,00	0,00
5	Piutang Sapi Jantan	292.641.600,00	292.641.600,00	0,00
6	Piutang Sapi Betina	132.800.000,00	39.840.000,00	92.960.000,00
7	Piutang Ijin Usaha Pertambangan	952.382.510,00	952.382.510,00	0,00
8	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya			0,00
	- BPR	23.248.360.500,00	8.141.472.200,00	15.106.888.300,00
	-Dinas Kesehatan	23.830.000,00	119.150,00	23.710.850,00
	- DPPKBP3A	269.500,00	1.347,50	268.152,50
9	Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF	77.678.638,12	0,00	77.678.638,12
	<b>Jumlah</b>	<b>30.678.546.590,64</b>	<b>11.675.825.190,95</b>	<b>19.002.569.399,69</b>

**7.1.3.8.4 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>24.817.804.050,00</b>

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp24.817.804.050,00 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

**Tabel 84 Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DBH PBB	0,00	22.205.005.202,00	(22.205.005.202,00)	(100,00)
2	DBH PPh Ps.21, Ps. 25/29	0,00	2.346.279.051,00	(2.346.279.051,00)	(100,00)
3	DBH CHT	0,00	624,00	(624,00)	(100,00)
4	DBH SDA Mineral dan Batu Bara	0,00	246.359.748,00	(246.359.748,00)	(100,00)
5	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DBH SDA Kehutanan	0,00	20.159.425,00	(20.159.425,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>24.817.804.050,00</b>	<b>(24.817.804.050,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 127 /PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2022, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode 2 Pada Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.7/2022 tgl 28 Desember 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode 3 Pada Tahun 2022.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat ini tidak dilakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua. Daftar Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada *Lampiran 5*.

**7.1.3.8.5 PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
(Rp)	(Rp)
<b>50.656.124.065,67</b>	<b>49.896.491.243,53</b>

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp50.656.124.065,67 dan Rp49.896.491.243,53. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah tersebut merupakan sisa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut:

**Tabel 85 Pergub Bagi Hasil Pemerintah Provinsi**

No.	Uraian	No. Peraturan Gubernur	Nilai Yang Disalurkan (Rp)
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pergub Nomor 068 Tahun 2022	6.314.389.421,68
2.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pergub Nomor 06 Tahun 2023	40.726.078.689,99
3.	Pajak Air Permukaan	Pergub Nomor 07 Tahun 2023	224.920.419,00
4.	Pajak Rokok	Pergub Nomor 08 Tahun 2023	3.390.735.535,00
<b>Jumlah</b>			<b>50.656.124.065,67</b>

Piutang Transfer Antar Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 86 Piutang Transfer Antar Daerah**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	7.878.772.743,49	(7.878.772.743,49)	(100,00)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)	0,00	4.747.811.322,00	(4.747.811.322,00)	(100,00)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	47.040.468.111,67	34.362.233.457,05	12.678.234.654,62	36,90
4	Pajak Rokok	3.390.735.535,00	2.872.117.501,00	518.618.034,00	18,06
5	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT-AP)	224.920.419,00	35.556.219,99	189.364.199,01	532,58
<b>Jumlah</b>		<b>50.656.124.065,67</b>	<b>49.896.491.243,53</b>	<b>759.632.822,14</b>	<b>1,52</b>

Rincian lengkap daftar Piutang Transfer Antar Daerah pada *Lampiran 6*. Piutang Transfer Antar Daerah ini tidak dilakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual.

### 7.1.3.8.6 PIUTANG LAINNYA

31 Desember 2022

(Rp)

**771.850.000,00**

31 Desember 2021

(Rp)

**816.850.000,00**

Saldo Piutang Lainnya merupakan saldo piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atau Piutang sewa beli kapal per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp771.850.000,00 dan sebesar Rp816.850.000,00 merupakan saldo bruto dari tagihan penjualan angsuran atas kerjasama pemanfaatan kapal dan alat tangkap ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Rincian piutang bruto tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

**Tabel 87 Rincian Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	AH	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00
2	Usm	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00
3	Jhr	42.000.000,00	54.000.000,00	(12.000.000,00)	(22,22)
4	TS	97.500.000,00	102.500.000,00	(5.000.000,00)	(4,88)
5	Rms	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00
6	Swm	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hj	155.250.000,00	155.250.000,00	0,00	0,00
8	Ltk	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00
9	Iskd	70.600.000,00	98.600.000,00	(28.000.000,00)	(28,40)
	<b>Jumlah</b>	<b>771.850.000,00</b>	<b>816.850.000,00</b>	<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(5,51)</b>

Rincian lebih lanjut dimuat dalam *Lampiran 7*.

Saldo bruto tersebut di atas telah dilakukan penyisihan dengan persentase 94,49% karena umur piutangnya di atas 3 tahun. Penyisihan Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai Rp771.850.000,00. Piutang netto dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 88 Rincian Piutang Netto Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	771.850.000,00	771.850.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>771.850.000,00</b>	<b>771.850.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 7.1.3.8.7 PENYISIHAN PIUTANG

31 Desember 2022

(Rp)

**26.067.607.198,26**

31 Desember 2021

(Rp)

**22.295.734.650,46**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp26.067.607.198,26 dan sebesar Rp22.295.734.650,46. Rincian Penyisihan bruto tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

**Tabel 89 Penyisihan Piutang**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	13.273.843.532,31	12.365.861.293,92	907.982.238,39	7,34
2	Penyisihan Piutang Retribusi	346.088.475,00	272.031.530,00	74.056.945,00	27,22
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	11.675.825.190,95	8.840.991.826,54	2.834.833.364,41	32,06
4	Penyisihan Piutang Lain-lain	771.850.000,00	816.850.000,00	(45.000.000,00)	(5,51)
	<b>Jumlah</b>	<b>26.067.607.198,26</b>	<b>22.295.734.650,46</b>	<b>3.771.872.547,80</b>	<b>16,92</b>

### 8.1.1.1 PERSEDIAAN

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**22.842.008.750,19**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**27.714.368.100,41**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp22.842.008.750,19 dan Rp27.714.368.100,41. Saldo Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD, BTT, BOS, serta BLUD. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari APBD per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 5.886.984.267,32 atau sebesar 33,98% dari tahun sebelumnya. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari BTT per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 95.785.040,00 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari BOS per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 379.129.951,91 atau sebesar 24,81% dari tahun sebelumnya. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari BLUD per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.489.539.909,01 atau sebesar 17,00% dari tahun sebelumnya. Untuk rincian masing-masing sumber yang tercatat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 90 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	313.135.522,08	420.167.908,30	(107.032.386,22)	(25,47)
2	Alat Listrik	1.015.590.901,00	68.168.375,00	947.422.526,00	1.389,83
3	Materai	6.290.000,00	33.190.000,00	(26.900.000,00)	(81,05)
4	Perabot Kantor	269.770.304,00	618.593.020,00	(348.822.716,00)	(56,39)
5	Natura	40.020.000,00	31.442.300,00	8.577.700,00	27,28
6	Barang Hibah	24.000.000,00	4.488.728.000,00	(4.464.728.000,00)	(99,47)
7	Bahan Komputer	736.335.522,00	565.525.323,00	170.810.199,00	30,20
8	Bibit Ternak / Bibit Tanaman	9.500.000,00	11.900.000,00	(2.400.000,00)	(20,17)
9	Alat Kesehatan Habis Pakai	2.913.315.258,75	3.887.948.246,36	(974.632.987,61)	(25,07)
10	Bahan Obat-Obatan	5.172.506.341,45	4.943.835.543,94	228.670.797,51	4,63
11	Bahan Kimia	796.203.126,00	1.443.707.108,00	(647.503.982,00)	(44,85)
12	Suku Cadang	2.374.400,00	121.514.400,00	(119.140.000,00)	(98,05)
13	Kertas dan Cover	100.162.487,00	206.711.199,00	(106.548.712,00)	(51,54)
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.712.994,00	484.469.700,00	(444.756.706,00)	(91,80)
	<b>Jumlah</b>	<b>11.438.916.856,28</b>	<b>17.325.901.123,60</b>	<b>(5.886.984.267,32)</b>	<b>(33,98)</b>

Pada persediaan barang pakai habis sesuai dengan tabel diatas terdapat beberapa *item* barang persediaan yang mengalami kenaikan dan penurunan sesuai stock opname yang ada di SKPD antara lain sebagai berikut:

- 1) Persediaan Alat listrik sebesar Rp1.015.590.901,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp68.168.375,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp947.422.526,00 atau 1.389,83% yang terbesar persediaannya pada DPRKPLH sebesar Rp.1.004.716.638;
- 2) Persediaan Suku Cadang yang terdapat pada DP2KBP3A dengan total barang persediaan Suku Cadang sebesar Rp2.374.400,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp121.514.400,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp119.140.000.000,00 atau 98,05%;
- 3) Persediaan Bahan Obat-Obatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan, RSUD K. H. Mansyur, DP2KBP3A, Distanhorbun dan Disnakeswan dengan total barang persediaan Rp5.172.506.341,45 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.943.835.543,94 sehingga ada kenaikan sebesar Rp 228.670.797,51 atau 4,63%. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2022 barang obat-obat antara APBD dan BLUD sudah dipisah berdasarkan sumber penerimaannya masing – masing;
- 4) Persediaan Alat Tulis Kantor untuk tahun 2022 sebesar Rp313.135.522,08, untuk total stock opname persediaan barang pakai habis pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp Rp420.167.908,30, terjadi penurunan sebesar Rp(107.032.386,22) atau sebesar 25,47%. Hal ini disebabkan adanya perubahan kode rekening yang terjadi pada tahun 2022 sehingga mempengaruhi terhadap nilai yang ada pada tahun 2021;
- 5) Barang Hibah terdapat pada Inspektorat sebesar Rp24.000.000,00, saja sesuai dengan berita acara *stock opname*, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.488.728.000,00, sehingga ada penurunan sebesar Rp4.464.728.000,00 atau sebesar 99,47%;
- 6) Bahan Kimia pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp796.203.126,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.443.707.108,00, terjadi kenaikan sebesar Rp647.503.982,00 atau 44,85%. Bahan kimia yang paling tinggi terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp612.152.306,00;

Sementara untuk persediaan yang lain diperoleh dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 91 Rincian Persediaan Berasal dari Dana BTT**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Kesehatan Habis Pakai	0,00	95.785.040,00	(95.785.040,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>95.785.040,00</b>	<b>(95.785.040,00)</b>	<b>(100,0)</b>

Untuk persediaan barang pakai habis ini hanya terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan.

**Tabel 92 Rincian Persediaan Berasal dari Dana BOS**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	413.788.940,96	512.145.762,00	(98.356.821,04)	(19,20)
2	Alat Listrik	43.399.034,00	31.347.540,00	12.051.494,00	38,44



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Materai	1.171.994,00	4.140.000,00	(2.968.006,00)	(71,69)
4	Perabot Kantor	297.586.729,39	368.438.604,33	(70.851.874,94)	(19,23)
5	Bahan Komputer	129.135.214,50	124.397.500,00	4.737.714,50	3,81
6	Alat Kesehatan Habis Pakai	2.402.977,00	7.842.000,00	(5.439.023,00)	(69,36)
7	Bahan Obat-Obatan	13.749.360,00	57.962.044,00	(44.212.684,00)	(76,28)
8	Bahan Kimia	9.468.559,00	3.641.800,00	5.826.759,00	160,00
9	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	6.330.000,00	(6.330.000,00)	(100,00)
10	Kertas dan Cover	199.205.548,90	276.093.546,00	(76.887.997,10)	(27,85)
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.639.457,00	89.124.412,00	(75.484.955,00)	(84,70)
12	Perlengkapan Pendukung Olahraga	24.647.800,00	46.942.558,33	(22.294.758,33)	(47,49)
13	Bahan lainnya	1.080.200,00	0,00	1.080.200,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.149.275.814,75</b>	<b>1.528.405.766,66</b>	<b>(379.129.951,91)</b>	<b>(24,81)</b>

Untuk persediaan barang pakai habis ini hanya terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 93 Rincian Persediaan Berasal dari Dana BLUD

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	247.278.431,78	226.962.874,00	20.315.557,78	8,95
2	Alat Listrik	26.684.035,00	24.391.049,00	2.292.986,00	9,40
3	Materai	1.360.000,00	300.000,00	1.060.000,00	353,33
4	Perabot Kantor	117.831.854,00	74.080.956,50	43.750.897,50	59,06
5	Bahan Komputer	81.045.108,00	41.255.832,00	39.789.276,00	96,45
6	Alat Kesehatan Habis Pakai	5.066.304.088,15	5.022.408.896,46	43.895.191,69	0,87
7	Bahan Obat-Obatan	4.028.258.881,73	3.140.719.800,69	887.539.081,04	28,26
8	Bahan Kimia	327.460.046,00	159.835.661,50	167.624.384,50	104,87
9	Bahan Bangunan & Konstruksi	0,00	4.140.944,00	(4.140.944,00)	(100,00)
10	Suku Cadang	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
11	Kertas dan Cover	99.067.133,50	70.180.156,00	28.886.977,50	41,16
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	216.936.501,00	0,00	216.936.501,00	0,00
13	Bahan lainnya	41.250.000,00	0,00	41.250.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.253.816.079,16</b>	<b>8.764.276.170,15</b>	<b>1.489.539.909,01</b>	<b>17,00</b>

Untuk persediaan barang pakai habis ini hanya terdapat pada 19 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah. Daftar Persediaan selengkapnya terdapat pada *Lampiran 8*.

### 8.1.1.2 INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
(Rp)	(Rp)
<b>1,856,677,500.00</b>	<b>18.083.589.716 ,00</b>

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1,856,677,500.00 dan Rp18.083.589.716 ,00 sebagai berikut:

**Tabel 94 Investasi Non Permanen Lainnya**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penggaduhan Ternak Sapi	1.856.677.500,00	4.747.077.500,00	(2.890.400.000,00)	(60,89)
2	Pengelolaan Kapal kepada Nelayan	13.336.512.216,00	13.336.512.216,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.193.189.716,00</b>	<b>18.083.589.716,00</b>	<b>(2.890.400.000,00)</b>	<b>(15,98)</b>

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.193.189.716,00 tersebut merupakan nilai bruto yang telah dilakukan penyisihan pada penggaduhan ternak sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pengelolaan kapal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Investasi Non Permanen disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.856.677.500,00 untuk Pengganduhan Ternak Sapi dan Pengelolaan Kapal Nelayan sebesar Rp0,00. Penyisihan Investasi Non Permanen telah dilakukan penyisihan sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Rincian investasi non permanen per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Penggaduhan Ternak Sapi

Merupakan nilai perguliran yang belum lunas pada pengelolaan ternak sapi betina sebesar Rp4.330.392.500,00 dan sapi jantan dengan nilai bruto sebesar Rp79.600.000,00 dan telah dilakukan penyisihan investasi non permanen sebesar Rp2.523.215.000,00 untuk sapi betina dan Rp30.100.000,00 untuk sapi jantan sehingga diperoleh nilai bersih yang direalisasikan sebesar Rp1.856.677.500,00 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Lampiran Data Aging Schedule* sapi terdapat pada *Lampiran 9.1*.

#### 2) Pengelolaan Kapal kepada Nelayan

Merupakan nilai aset Kapal 10 GT beserta alat tangkap dan kelengkapannya berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Nelayan pada Tanggal 03 Januari 2011, 02 Januari 2012 dan 08 Januari 2013. Perjanjian ini telah berakhir pada tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Ketiga atas Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa jika perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan nelayan berakhir, maka aset kapal tersebut akan dicatat sebagai aset lain-lain. Nilai investasi kapal dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

**Tabel 95 Nilai Investasi Kapal**

No.	Uraian	Nilai Investasi (Rp)
1.	Kapal 10 GT Tahun 2010	3.843.839.426,00
2.	Kapal 10 GT Tahun 2011	4.952.080.000,00
3.	Kapal 10 GT Tahun 2012	4.540.592.790,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.336.512.216,00</b>

Kapal Ukuran 2,6 GT beserta alat tangkapnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dipinjamkaikan ke nelayan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 590 Tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pengelolaan Kapal dan Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Nelayan pada Tanggal 25 Juni 2010 telah dihapuskan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/756-KUM/2014 tanggal 24 Desember 2014. Untuk data pengelolaan kapal kepada nelayan pada *Lampiran 9.2*.

Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Tahun 2022, Investasi Non Permanen disajikan dengan nilai netto sebesar Rp1.856.677.500,00 yaitu nilai bruto dikurangi dengan penyisihan Investasi Non Permanen dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 96 Investasi Non Permanen Netto**

No.	Uraian	Investasi Non Permanen Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Investasi Non Permanen Netto (Rp)
1	Pengaduan Ternak Sapi	4.330.392.500,00	2.523.215.000,00	1.807.177.500,00
2	Pengaduan Sapi Jantan	79.600.000,00	30.100.000,00	49.500.000,00
3	Pengelolaan Kapal kepada Nelayan	13.336.512.216,00	13.336.512.216,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.746.504.716,00</b>	<b>15.889.827.216,00</b>	<b>1.856.677.500,00</b>

### 8.1.1.3 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**144.405.364.828,06**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**117.587.676.158,88**

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp144.405.364.828,06 dan Rp117.587.676.158,88 terdiri atas:

**Tabel 97 Saldo Penyertaan Modal**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bank Kalsel	110.374.250.000,00	85.374.367.703,00	24.999.882.297,00	29,28
2	PDAM Kabupaten Tanah Laut	25.101.136.078,23	26.616.722.133,54	(1.515.586.055,31)	(5,69)
3	PT.BPR Tanah Laut	5.477.300.435,83	5.596.586.322,34	(119.285.886,50)	(2,13)
4	PD Baratala Tuntung Pandang	3.452.678.314,00	0,00	3.452.678.314,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>144.405.364.828,06</b>	<b>117.587.676.158,88</b>	<b>26.817.688.669,18</b>	<b>22,81</b>

**1) Bank Kalsel**

Saldo penyertaan modal kepada Bank Kalsel per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.374.250.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 6,36% dan penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode biaya sama seperti tahun 2021. Penambahan Penyertaan Modal ke Bank Kalsel sebesar Rp25.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

**2) PDAM Kabupaten Tanah Laut**

Saldo penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.101.136.078,23 dengan persentase kepemilikan sebesar 89,10% dan penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Nilai penyertaan modal sebesar Rp25.101.136.078,23 ini merupakan bagian 89,10% dari total Ekuitas dalam Neraca PDAM Kabupaten Tanah Laut Audited 2022 sebesar Rp28.171.869.897,00. Data dukung pada *Lampiran 10.1*.

**3) PT. BPR Tanah Laut**

Saldo penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.477.300.435,83 dengan persentase kepemilikan sebesar 75,41%, saldo tersebut merupakan 75,41% dari total Ekuitas dalam Neraca PT. BPR Tanah Laut Audited 2022 sebesar Rp7.263.360.875,00 sehingga penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Data dukung pada *Lampiran 10.2*.

**4) PT Baratala Tuntung Pandang**

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 06 tentang akuntansi penyertaan modal, Nilai 0 (Nol) tersebut dicatat Laporan Keuangan PT Baratala Tahun 2022 bernilai negatif berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2022. Secara administratif Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyetorkan penyertaan modal secara tunai, namun secara substansi Perusahaan Daerah tersebut dalam penguasaan penuh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Penggunaan metode ekuitas dimulai tahun 2012 sehingga laba pada tahun 2011 dianggap sebagai akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 desember 2011 sebesar Rp1.432.857.977,19 sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut pada pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa Modal Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2022 PD Baratala Tuntung Pandang memberikan bagian laba ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sebesar Rp374.935.017,00 dan pada tanggal 8 April 2022 sebesar Rp479.277.014,00. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp3.452.678.314,00 merupakan nilai Ekuitas dalam Neraca PT. Baratala Tuntung Pandang dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten tanah Laut sebesar 100%. Data dukung pada *Lampiran 10.3*.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

8.1.1.4 ASET TETAP

31 Desember 2022  
(Rp)

**3.562.874.935.230,64**

31 Desember 2021  
(Rp)

**3.398.012.153.979,96**

Saldo Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.562.874.935.230,64 dan Rp3.398.012.153.979,96 terdiri atas:

Tabel 98 Rincian Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1.	Tanah	836.235.257.191,35	808.616.413.726,52	27.618.843.464,83
2.	Peralatan dan Mesin	656.530.372.042,31	570.096.134.486,45	86.434.237.555,86
3.	Gedung dan Bangunan	1.329.095.131.735,75	1.234.545.603.141,78	94.549.528.593,97
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.533.893.026.483,34	2.334.275.258.255,78	199.617.768.227,56
5.	Aset Tetap Lainnya	4.830.380.283,00	4.796.764.345,00	33.615.938,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.586.988.476,40	24.530.347.182,50	(7.943.358.706,10)
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.814.296.220.981,51)	(1.578.848.367.158,06)	(235.447.853.823,45)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.562.874.935.230,64</b>	<b>3.398.012.153.979,97</b>	<b>164.862.781.250,67</b>

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

8.1.1.4.1 TANAH

31 Desember 2022  
(Rp)

**836.235.257.191,35**

31 Desember 2021  
(Rp)

**808.616.413.726,52**

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp836.235.257.191,35 dan Rp808.616.413.726,52. Realisasi Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp27.618.843.464,83 atau sebesar 3,42% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Tanah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	808.616.413.726,52	810.833.152.356,52	(2.216.738.630,00)	(0,27)
2	Penambahan:				
	- Belanja Modal	240.492.000,00	2.897.145.120,00	(2.656.653.120,00)	(91,70)
	- Penilaian:	27.683.634.600,00		27.683.634.600,00	100,00
	- Mutasi Unit Kerja	48.741.833.876,00	625.375.080,00	48.116.458.796,00	7.694,02
	- Reklasifikasi	116.782.690,00	568.929.500,00	(452.146.810,00)	(79,47)
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset	328.000.000,00	2.209.386.500,00	(1.881.386.500,00)	(85,15)
	Pengurangan:				
	- Mutasi Unit Kerja	48.741.833.876,00	625.375.080,00	48.116.458.796,00	7.694,02
	- Reklasifikasi	12.490.000,00		12.490.000,00	100,00
	- Penghapusan	604.965.825,17	7.892.199.750,00	(7.287.233.924,83)	(92,33)
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	132.610.000,00		132.610.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>836.235.257.191,35</b>	<b>808.616.413.726,52</b>	<b>27.618.843.464,83</b>	<b>3,42</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Penambahan aset tetap Tanah pada tahun 2022 salah satunya berasal dari belanja modal sebesar Rp240.492.000,00 terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan berupa belanja perencanaan *land clearing* pabrik karet sebesar Rp12.490.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa belanja penyertifikatan tanah sebesar RpRp228.002.000,00.

Saldo Tanah tersebut termasuk tanah yang bersertifikat, belum proses sertifikat, proses pembuatan sertifikat dan sertifikat yang belum ditemukan senilai Rp836.235.257.191,35 yang berasal dari pembelian dan hibah saat otonomi daerah dari instansi vertikal. Tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat senilai Rp624.016.874.012,70 yang di atasnya berdiri bangunan Perkantoran, Poskesdes, tanah Balai Desa, tanah SD, tanah SMP yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Tanah yang bukti kepemilikan sertifikatnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah senilai Rp2.439.270.794,00 yang di atasnya berdiri bangunan Poskesdes, tanah balai desa, tanah SD, SMP yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Tanah yang bukti kepemilikan sertifikatnya belum diproses pembuatan sertifikatnya senilai Rp204.858.240.584,65 termasuk didalamnya tanah untuk bangunan pemerintah, tanah untuk jalan serta tanah yang berasal dari proses ganti rugi. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang sertifikatnya belum ditemukan senilai Rp. 4.920.871.800,00.

Penambahan aset tetap tanah pada tahun 2022 yang berasal koreksi tambah sebesar Rp23.000.000,00 yaitu berupa tanah eks SPDN yang berasal dari aset hasil likuidasi PD. AUMB, dan yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp Rp305.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	No BAST	Pemberi Hibah	Nilai	Jumlah Persil
1	Dinas Kesehatan	032/01/BAST/BPKA D/2022	Tan Selamat	15.000.000,00	1
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	032/04/BAST/BPKA D/2022	Mulyono (Kepala Desa Bumi Jaya)	250.000.000,00	1
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	032/05/BAST/BPKA D/2022	Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, MS (Yayasan Udiansyah Muhammad Kasi)	40.000.000,00	1
<b>Jumlah</b>				<b>305.000.000,00</b>	

Mutasi unit kerja tanah pada tahun 2022 sebesar Rp48.741.833.876,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.121.720,00
2	Dinas Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	300.000.000,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	610.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	80.240.000,00
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	89.100.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Dinas Kesehatan	2.335.280,00
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.932.680,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	535.080,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	240.523.600,00
		Dinas Pariwisata	46.790.891.516,00
		Dinas Koperasi Dan Perdagangan	610.000.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	5.300.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	9.854.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>48.741.833.876,00</b>

Reklasifikasi tambah pada aset tetap berupa tanah sebesar Rp116.782.690,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Tanah	116.782.690,00
		<b>Jumlah</b>		<b>116.782.690,00</b>

Reklasifikasi kurang pada aset tetap berupa tanah sebesar Rp12.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Tanah	116.782.690,00
		<b>Jumlah</b>		<b>116.782.690,00</b>

Pengurangan aset tetap Tanah pada tahun 2022 diantaranya berupa penghapusan sebesar Rp604.965.825,17 karena pemindah tanganan dalam bentuk hibah pada tiga SKPD yaitu pada Sekretariat Daerah sebesar Rp276.900.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp268.259.960,00, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp59.805.865,17, dengan rincian sebagai berikut:

- 188.45/680-KUM/2022 tanggal 12 April 2022 senilai Rp276.900.000,00 dikarenakan hibah ke Yayasan Pondok Pesantren Asy Syuhada pada Sekretariat Daerah.
- 032/57-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp268.259.960,00 dikarenakan hibah kepada Kepolisian Resor Tanah Laut pada Dinas Perhubungan.
- 032/62-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 senilai Rp59.805.865,17 dikarenakan hibah ke Pemerintah Desa Kunit pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD);

Pengurangan aset tetap tanah selanjutnya yaitu koreksi kurang sebesar Rp132.610.000,00 berupa tanah kantor Bank Kalsel yang masih tercatat di KIB A Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Tanah terdapat dalam *Lampiran 11*.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

8.1.1.4.2 PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2022

(Rp)

**656.530.372.042,31**

31 Desember 2021

(Rp)

**570.096.134.486,45**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp656.530.372.042,31 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp570.096.134.486,45. Realisasi peralatan dan mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp86.434.237.555,86 atau sebesar 15,16% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 100 Rincian Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Saldo Awal	570.096.134.486,47	485.555.599.058,47	84.540.535.428,00	17,41
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	91.151.091.039,00	87.589.675.673,00	3.561.415.366,00	4,07
	- Atribusi	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Mutasi Unit Kerja	10.495.120.861,75	5.446.175.122,22	5.048.945.739,53	92,71
	- Reklasifikasi	394.522.900,00	374.794.626,00	19.728.274,00	5,26
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset	2.609.225.206,00	2.565.727.000,00	43.498.206,00	1,70
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomtabel	197.265.470,00	541.918.284,87	(344.652.814,87)	(63,60)
	- Mutasi Unit Kerja	10.495.120.861,75	5.446.175.122,22	5.048.945.739,53	92,71
	- Reklasifikasi	1.359.755.110,00	967.053.479,00	392.701.631,00	40,61
	- Penghapusan	5.688.077.361,16	4.216.361.477,15	1.471.715.884,01	34,90
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	475.503.648,00	264.328.630,00	211.175.018,00	79,89
	<b>Jumlah</b>	<b>656.530.372.042,31</b>	<b>570.096.134.486,45</b>	<b>86.434.237.555,86</b>	<b>15,16</b>

Penambahan pada aset tetap peralatan dan mesin diantaranya yaitu belanja modal sebesar Rp91.151.091.039,00 dan hibah masuk pada tahun 2022 sebesar Rp2.609.225.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	No BAST	Nama Pemberi	Nilai
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5991/4.2/PLK.03.03/XII/2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	300.743.400,00
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34/RT.01.3/6301/2022	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut	16.799.818,00
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33/RT.01.3/6301/2022	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut	53.628.640,00
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	264/XI/PH-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	16.525.300,00
5.	Dinas Perhubungan	PL.301/08/7.A/AJ/XI/2022 dan 550/477/DISHUB/2022	Kementerian Perhubungan RI	515.560.000,00
6.	Dinas Kesehatan	KN 02 02/9/3695.2/2022	Kementerian Kesehatan RI	275.248.048,00
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29701.111/C3/KPA/XII/BAST/2022	Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1.430.720.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>2.609.225.206,00</b>

Penambahan berupa mutasi unit kerja peralatan dan mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp10.495.120.861,75 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53.243.414,67
2	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial	39.831.099,97
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	145.708.668,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Kecamatan Kurau	6.600.000,00
		Kecamatan Pelaihari	25.750.000,00
		Dinas Kesehatan	18.370.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	188.700.000,00
		Kecamatan Kintap	6.600.000,00
4	Dinas Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	750.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.300.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	121.151.272,73
		Dinas Kesehatan	82.500.000,00
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	267.800.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86.649.682,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.654.000,00
		Dinas Kesehatan	2.639.000,00
9	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.800.000,00
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.510.000,00
11	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Dinas Komunikasi dan Informatika	545.000.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.750.000,00
12	Sekretariat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41.900.000,00
		Kecamatan Pelaihari	845.786.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	169.157.200,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.129.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.693.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	356.160.000,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	821.443.933,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	453.050.000,00
14	Kecamatan Kurau	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	122.210.000,00
15	Kecamatan Bati-Bati	Dinas Perhubungan	354.200.000,00
16	Kecamatan Panyipatan	Dinas Perhubungan	354.200.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54.000.000,00
17	Kecamatan Jorong	Dinas Perhubungan	354.200.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.635.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17.299.755,29
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.590.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.000.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	162.987.282,09
		Dinas Perhubungan	255.000.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	15.308.500,00
		Kecamatan Kurau	147.383.333,00
		Dinas Sosial	269.500.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	336.945.975,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275.865.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	78.391.746,00
		Inspektorat Kabupaten	271.600.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	286.700.000,00
		Sekretariat Daerah	2.651.850.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	7.800.000,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	67.328.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>10.495.120.861,75</b>

Penambahan berupa reklasifikasi tambah pada aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp394.522.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	17.833.000,00
		Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	45.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	246.020.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	20.394.900,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	32.000.000,00
5	Kecamatan Pelaihari	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	9.350.000,00
6	Kecamatan Bajuin	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	4.465.000,00
7	Inspektorat Kabupaten	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	11.560.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	7.900.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>394.522.900,00</b>

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2022 diantaranya penghapusan sebesar Rp5.688.077.361,16 dimana penghapusan ini terdapat 20 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp1.038.296.000,00 dengan SK Nomor: 188.45/723-KUM/2022 tanggal 28 April 2022, sebesar Rp213.000.000,00 dengan SK Nomor : 188.45/738-KUM/2022 tanggal 10 Mei 2022 dan sebesar Rp37.260.000,00 dengan SK Nomor : 188.45/917-KUM/2022 tanggal 7 Juli 2022, sebesar Rp145.000.000,00 dengan SK Nomor 188.45/1260-KUM/2022 tanggal 7 Desember 2022;
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset

- tetapnya sebesar Rp89.658.704,00 dengan SK Nomor : 032/02-BPKAD/2022 tanggal 14 Maret 2022;09
- 3) Kecamatan Bati-Bati penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp8.171.545,00 dengan SK Nomor : 032/01-BPKAD/2022 tanggal 11 Maret 2022;
  - 4) Badan Pendapatan Daerah penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp8.169.650,00 dengan SK Nomor : 032/03-BPKAD/2022 tanggal 15 Maret 2022, sebesar Rp28.542.007,48 dengan SK Nomor : 032/48-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
  - 5) Dinas Perhubungan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp25.233.864,00 dengan SK Nomor : 032/05-BPKAD/2022 tanggal 22 Maret 2022;
  - 6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp43.122.889,00 dengan SK Nomor : 032/08-BPKAD/2022 tanggal 1 April 2022,;
  - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp113.722.884,75 dengan SK Nomor: 032/09-BPKAD/2022 tanggal 25 April 2022, dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp43.168.885,00 dengan SK Nomor : 032/17-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022;
  - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp22.900.000,00 dengan SK Nomor: 032/10-BPKAD/2022 tanggal 25 April 2022;
  - 9) Dinas Kesehatan penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp174.500.000,00 dengan SK Nomor: 032/11-BPKAD/2022 tanggal 25 April 2022, sebesar Rp1.961.003.992,00 dengan SK Nomor: 032/64-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022;
  - 10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp27.150.000,00 dengan SK Nomor : 032/13-BPKAD/2022 tanggal 6 Mei 2022;
  - 11) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp102.921.673,87 dengan SK Nomor : 032/15-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022,;
  - 12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp216.748.637,15 dengan SK Nomor : 032/18-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022;
  - 13) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penghapusan dikarenakan sebab pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp44.149.255,00 dengan SK Nomor : 032/20-BPKAD/2022 tanggal 4 Juli 2022, sebesar Rp621.593.859,67 dengan SK Nomor : 032/73-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022;
  - 14) Kecamatan Kurau penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp48.647.113,45 dengan SK Nomor: 032/22-BPKAD/2022 tanggal 4 Juli 2022;
  - 15) Dinas Sosial penghapusan dikarenakan sebab lain (terbakar) dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp64.802.545,00 dengan SK Nomor : 032/21-BPKAD/2022 tanggal 4 Juli 2022,;

- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp99.593.801,60 dengan SK Nomor: 032/51-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- 17) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp210.491.545,19 dengan SK Nomor: 032/55-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- 18) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp5.000.000,00 dengan SK Nomor: 032/63-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022;
- 19) Kecamatan Pelaihari penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp294.628.509,00 dengan SK Nomor: 032/65-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022,
- 20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah penghapusan dikarenakan sebab lain (kebakaran) dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp 600.000,00 dengan SK Nomor: 032/60-BPKAD/2022 tanggal 28 November 2022;

Pengurangan berupa reklasifikasi kurang pada aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp1.359.755.110,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peralatan Mesin	Aset Tetap Lainnya	1.038.224.633,00
2	Dinas Kesehatan	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	187.037.017,00
		Peralatan Mesin	Jalan Jaringan dan Irigasi	5.582.460,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	44.000.000,00
		Peralatan Mesin	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.150.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	6.000.000,00
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	16.761.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.359.755.110,00</b>

Berdasarkan data kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki 1.744 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp129.121.850.205,44. Dari 1.744 unit kendaraan dinas bermotor yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 1.564 unit sudah memiliki bukti kepemilikan (BPKB) senilai Rp118.046.035.201,44

Terdapat 180 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp11.075.815.004,00 yang belum memiliki bukti kepemilikan (BPKB) dengan rincian : 76 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp603.586.000,00 BPKB masih belum ditemukan dan dalam proses penelusuran, 33 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp9.189.646.533,00 BPKB masih dalam proses penerbitan BPKB (kendaraan pengadaan Tahun Anggaran 2021 dan 2022) serta 71 unit kendaraan dinas senilai Rp1.282.582.471,00 yang sudah memiliki bukti kepemilikan (BPKB) namun keberadaan BPKB masih di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Pusat.

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin terdapat dalam **Lampiran II**.

**8.1.1.4.3 GEDUNG DAN BANGUNAN**

**31 Desember 2022**  
 (Rp)

**1.329.095.131.735,75**

**31 Desember 2021**  
 (Rp)

**1.234.545.603.141,78**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar dan 2021 sebesar Rp1.329.095.131.735,75 dan Rp1.234.545.603.141,78. Realisasi Bangunan dan Gedung Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp94.549.528.593,97 atau sebesar 7,66% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 101 Rincian Gedung dan Bangunan**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Saldo Awal	1.234.545.603.141,82	1.120.868.287.443,68	113.677.315.698,14	10,14
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	104.788.622.560,00	125.469.046.825,83	(20.680.424.265,83)	(16,48)
	- Mutasi Unit Kerja	35.912.649.013,06	36.111.731.480,00	(199.082.466,94)	(0,55)
	- Reklasifikasi	7.664.878.096,00	6.171.803.989,00	1.493.074.107,00	24,19
	- Hibah dan Koreksi Tambah	1.170.505.247,65	0,00	1.170.505.247,65	100,00
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomtabel	6.000.000,00	241.288.247,00	(235.288.247,00)	(97,51)
	- Mutasi Unit Kerja	35.912.649.013,06	36.111.731.480,00	(199.082.466,94)	(0,55)
	- Reklasifikasi	10.129.307.001,00	2.984.624.639,00	7.144.682.362,00	239,38
	- Penghapusan	6.704.519.374,72	12.203.507.418,73	(5.498.988.044,01)	(45,06)
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	2.234.650.934,00	2.534.114.812,00	(299.463.878,00)	(11,82)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.329.095.131.735,75</b>	<b>1.234.545.603.141,78</b>	<b>94.549.528.593,97</b>	<b>7,66</b>

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan diantaranya berasal dari belanja modal Rp104.788.622.560,00, koreksi tambah sebesar Rp900.650.540,00 berupa bangunan eks SPDN yang berasal dari aset hasil likuidasi PD. AUMB, dan yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp83.875.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	No BAST	Nama Pemberi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	032/02/BAST/BP KAD/2022	DONY WIDODO (Komite Sekolah UPTD SMPN 2 Batu Ampar)	57.875.000,00
		032/03/BAST/BP KAD/2022	H. SYAHMINAN (Komite Sekolah UPTD SMPN 1 Bumi Makmur)	26.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>83.875.000,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi unit kerja aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp35.912.649.013,06 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD Awal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial	4.579.143.887,06
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	195.620.000,00
		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	3.548.941.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	189.255.000,00
		Dinas Kesehatan	6.020.674.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	198.250.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	391.364.000,00
		Kecamatan Bati-Bati	499.557.000,00
		Kecamatan Batu Ampar	269.765.000,00
		Kecamatan Jorong	215.280.000,00
		Kecamatan Kintap	3.397.567.000,00
		Kecamatan Kurau	3.425.115.000,00
		Kecamatan Panyipatan	195.862.000,00
		Kecamatan Takisung	215.280.000,00
		Kecamatan Pelaihari	7.279.593.100,00
		Sekretariat Daerah	216.510.000,00
		Kecamatan Tambang Ulang	195.440.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	215.570.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Inspektorat Kabupaten	299.860.207,00
		Kec. Batu Ampar	193.738.700,00
4	Dinas Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	785.545.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.500.897.400,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	333.098.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Dinas Koperasi dan Perdagangan	1.500.897.400,00
		Sekretariat Daerah	49.825.319,00
<b>Jumlah</b>			<b>35.912.649.013,06</b>

Selain itu juga terdapat reklasifikasi tambah sebesar Rp7.664.878.096,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	865.507.000,00
2	Dinas Kesehatan	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	187.037.017,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	1.268.012.171,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	918.370.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	44.000.000,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	4.031.683.308,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	123.843.000,00
		Barang dan Jasa	Gedung dan Bangunan	34.253.400,00
5	Dinas Sosial	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	15.712.200,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	6.000.000,00
7	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Barang dan Jasa	Gedung dan Bangunan	77.121.000,00
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	16.761.000,00
9	Kecamatan Pelaihari	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	76.578.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>7.664.878.096,00</b>

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2022 diantaranya merupakan reklasifikasi kurang dan penghapusan. Pengurangan karena reklasifikasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp10.129.307.001,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.907.597.139,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	764.388.720,00
2	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	17.833.000,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.600.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.117.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	246.020.000,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.311.007.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	428.350.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Tanah	116.782.690,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.180.274.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	568.927.300,00
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	20.394.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	187.666.000,00
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.680.000,00
8	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	194.161.000,00
9	Kecamatan Pelaihari	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.028.000,00
10	Kecamatan Tambang Ulang	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.480.252,00
<b>Jumlah</b>				<b>10.129.307.001,00</b>

Sedangkan untuk penghapusan sebesar Rp6.704.519.374,72 dimana penghapusan ini terdapat pada 10 SKPD dengan rincian SK Penghapusan sebagai berikut:

- 032/06-BPKAD/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan nilai Rp816.344.421,00 dikarenakan pemusnahan pada Kecamatan Kurau;
- 032/07-BPKAD/2022 tanggal 1 April 2022 dengan nilai Rp9.977.800,00 dikarenakan pemusnahan, 032/23-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan nilai Rp 223.491.589,40 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, total Rp233.469.389,40;
- 032/12-BPKAD/2022 tanggal 29 April 2022 dengan nilai Rp971.420.228,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 032/14-BPKAD/2022 tanggal 6 Juni 2022 dengan nilai Rp5.894.646,00 dikarenakan pemusnahan, 032/71-BPKAD/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan nilai Rp 17.683.939,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, total Rp23.578.585,00;
- 032/19-BPKAD/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai Rp113.825.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Kecamatan Bati-Bati;
- 032/24-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan nilai Rp1.168.934.796,11 dikarenakan pemusnahan, 032/27-BPKAD/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan nilai Rp563.860.879,12 dikarenakan pemusnahan, 032/70-BPKAD/2022 tanggal 7 Desember 2022 dengan nilai Rp210.450.226,50 dikarenakan pemusnahan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, total Rp1.943.245.901,73;
- 032/25-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan nilai Rp197.599.000,00 dikarenakan pemusnahan, 032/67-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan nilai Rp 1.435.583.400,00 dikarenakan pemusnahan, 032/69-BPKAD/2022 tanggal 7 Desember 2022 dengan nilai Rp519.030.000,00 dikarenakan pemusnahan, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, total Rp2.152.212.400,00;
- 032/50-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan nilai Rp130.216.449,59 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Kesehatan;
- 032/59-BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022 dengan nilai Rp307.211.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Kecamatan Kintap;
- 032/68-BPKAD/2022 tanggal 7 Desember 2022 dengan nilai Rp12.996.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan terdapat dalam **Lampiran 11**.

**8.1.1.4.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**2.533.893.026.483,34**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**2.334.275.258.255,78**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.533.893.026.483,34 dan Rp2.334.275.258.255,78. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2199.617.768.227,56 atau sebesar 8,55% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 102 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	2.334.275.258.255,79	2.113.229.213.765,78	221.046.044.490,01	10,46
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	200.681.712.555,00	226.307.789.870,00	(25.626.077.315,00)	(11,32)
	- Mutasi Unit Kerja	63.740.000,00	169.310.122.687,35	(169.246.382.687,35)	(99,96)
	- Reklasifikasi	10.112.607.889,00	1.124.581.500,00	8.988.026.389,00	799,23
	- Hibah dan Koreksi Tambah	37.140.774.269,35	3.751.911.769,00	33.388.862.500,35	889,92
3	Pengurangan :				
	- Mutasi Unit Kerja	63.740.000,00	169.310.122.687,35	(169.246.382.687,35)	(99,96)
	- Reklasifikasi	8.773.827.959,00	9.804.950.083,00	(1.031.122.124,00)	(10,52)
	- Penghapusan	201.640.136,80	333.288.566,00	(131.648.429,20)	(39,50)
	- Koreksi Kurang aset tetap	39.341.858.390,00	0,00	39.341.858.390,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.533.893.026.483,34</b>	<b>2.334.275.258.255,78</b>	<b>199.617.768.227,56</b>	<b>8,55</b>

Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan diantaranya berupa belanja modal sebesar Rp200.681.712.555,00 dan mutasi unit kerja pada jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp63.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD Awal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.1870.000
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	3.1870.000
<b>Jumlah</b>			<b>63.740.000,00</b>

Reklasifikasi tambah pada aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp10.112.607.889,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.907.597.139,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	118.242.000,00
2	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.582.460,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.311.007.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.313.732.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.150.000,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.180.274.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.581.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	59.814.290,00
6	Kecamatan Pelaihari	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.028.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>10.112.607.889,00</b>

Reklasifikasi kurang pada aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp8.773.827.959,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Kesehatan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	1.268.012.171,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.335.766.280,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	4.031.683.308,00
4	Dinas Sosial	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	15.712.200,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.076.000,00
6	Kecamatan Pelaihari	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	76.578.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>8.773.827.959,00</b>

Pengurangan aset tetap jalan irigasi dan jaringan pada tahun 2022 diantaranya adalah penghapusan sebesar Rp201.640.136,80 dimana penghapusan ini terdapat 3 SKPD dengan rincian SK Penghapusan sebagai berikut:

- 1) 032/49-BPKAD/2022 tanggal 5 September 2022 dengan nilai Rp70.126.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) 032/67-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan nilai Rp31.870.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 3) 032/27-BPKAD/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan nilai Rp99.644.136,80 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat dalam *Lampiran II*.

**8.1.1.4.5 ASET TETAP LAINNYA**

**31 Desember 2022**

(Rp)

**4.830.380.283,00**

**31 Desember 2021**

(Rp)

**4.796.764.345,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.830.380.283,00 dan sebesar Rp4.796.764.345,00. Realisasi Aset Tetap Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.615.938,00 atau sebesar 0,70% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 103 Rincian Aset Tetap Lainnya**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	4.796.764.345,00	4.756.568.345,00	40.196.000,00	0,85
2	Penambahan:				
	- Belanja Modal	16.548.300,00	305.806.626,00	(289.258.326,00)	(94,59)
	- Mutasi Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Reklasifikasi	1.038.224.633,00	0,00	1.038.224.633,00	100,00
	- Hibah	30.343.400,00	0,00	30.343.400,00	100,00
3	Pengurangan:				
	- Ekstrakomtabel	1.041.150.395,00	42.044.000,00	999.106.395,00	2.376,34
	- Mutasi Unit kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Reklasifikasi	10.350.000,00	124.294.626,00	(113.944.626,00)	(91,67)
	- Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koreksi kurang aset tetap	0,00	99.272.000,00	(99.272.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>4.830.380.283,00</b>	<b>4.796.764.345,00</b>	<b>33.615.938,00</b>	<b>0,70</b>

Penambahan aset tetap lainnya diantaranya berupa belanja modal sebesar Rp16.548.300,00 dan adanya berupa reklasifikasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp1.038.224.633,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	1.038.224.633,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.038.224.633,00</b>

Penambahan aset tetap lainnya berupa hibah sebesar Rp30.343.400,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	No BAST	Nama Pemberi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5991/4.2/PLK.03.03/XII/2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	30.343.400,00
<b>Jumlah</b>				<b>30.343.400,00</b>

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya terdapat dalam *Lampiran II*.

**8.1.1.4.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

**31 Desember 2021**  
(Rp)

**16.586.988.476,40**

**31 Desember 2020**  
(Rp)

**24.530.347.182,50**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.586.988.476,40 dan Rp24.530.347.182,500. Realisasi Konstruksi Dalam

Pengerjaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.943.358.706,10 atau sebesar 32,38% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 104 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	24.530.347.182,50	18.600.746.970,50	5.929.600.212,00	31,88
2	Penambahan:				
	- Mutasi Unit Kerja	195.681.700,00	0,00	195.681.700,00	100,00
	- Reklasifikasi	5.668.102.552,00	7.672.494.612,00	(2.004.392.060,00)	(26,12)
3	Pengurangan:				
	- Mutasi Unit Kerja	195.681.700,00	0,00	195.681.700,00	100,00
	- Reklasifikasi	12.018.883.657,00	1.742.894.400,00	10.275.989.257,00	589,59
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	1.592.577.601,10	0,00	1.592.577.601,10	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.586.988.476,40</b>	<b>24.530.347.182,50</b>	<b>(7.943.358.706,10)</b>	<b>(32,38)</b>

Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2022 sebesar Rp5.668.102.552,00 merupakan jasa konsultansi perencanaan/DED yang nantinya menjadi penambahan harga perolehan pada aset tetap yang akan dibangun, dengan rincian:

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	764.388.720,00
2	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.117.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	428.350.000,00
		Jalan Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.335.766.280,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	568.927.300,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Tanah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.490.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	187.666.000,00
		Jalan Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.076.000,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.680.000,00
7	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	194.161.000,00
8	Kecamatan Tambang Ulang	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.480.252,00
<b>Jumlah</b>				<b>5.668.102.552,00</b>

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp4.498.089.290,00 berupa jasa konsultansi perencanaan/DED sudah diatribusikan ke aset induk yang berkenaan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	865.507.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan Jaringan dan Irigasi	118.242.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	918.370.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan Jaringan dan Irigasi	2.313.732.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	123.843.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan Jaringan dan Irigasi	98.581.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan Jaringan dan Irigasi	59.814.290,00
<b>Jumlah</b>				<b>4.498.089.290,00</b>

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp7.520.794.367,00 berupa jasa konsultasi perencanaan/DED dreklasifikasi ke aset lain-lain karena tidak akan digunakan lagi, direncanakan untuk dihapuskan, dan jasa konsultasi perencanaan/DED yang belum diketahui kapan keberlanjutan atas pekerjaan fisiknya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	6.656.422.767,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	291.800.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	11.248.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	48.500.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	89.666.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	423.157.600,00
<b>Jumlah</b>				<b>7.520.794.367,00</b>

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2022 yang lain yaitu berupa koreksi kurang sebesar Rp1.592.577.601,10 atas jasa konsultasi perencanaan/DED yang dinyatakan dihentikan pengerjaannya/tidak digunakan lagi dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	203.148.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	792.399.100,00
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	30.690.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	98.277.000,00
5	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	63.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Nilai (Rp)
6	Dinas Pariwisata	23.248.139,00
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	10.578.858,00
8	Sekretariat Daerah	23.050.000,00
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.913.000,00
10	Kecamatan Kurau	115.128.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	182.838.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	42.657.504,10
<b>Jumlah</b>		<b>1.592.577.601,10</b>

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat dalam *Lampiran 11*.

**8.1.1.4.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**

**1.814.296.220.981,51**

**31 Desember 2021**  
**(Rp)**

**1.578.848.367.158,06**

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.814.296.220.981,51 dan 1.578.848.367.158,06. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 105 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Kenaikan/ Penurunan %	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi			Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
1	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	365.527.848.626,81	66.740.171.936,18	3.779.394.446,39	428.488.626.116,60	17,22
2	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	244.888.025.733,44	35.659.350.945,67	2.415.333.316,00	278.132.043.363,11	13,58
3	Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	966.784.656.265,81	139.349.686.612,99	108.570.865,00	1.106.025.772.013,80	14,40
4	Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.647.836.532,00	1.942.956,00	0,00	1.649.779.488,00	0,12
<b>Jumlah</b>		<b>1.578.848.367.158,06</b>	<b>241.751.152.450,84</b>	<b>6.303.298.627,39</b>	<b>1.814.296.220.981,51</b>	<b>14,91</b>

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2022 sebesar Rp241.751.152.450,84, berupa beban penyusutan sebesar Rp241.648.364.857,84 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp66.637.384.198,18;
- 2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.659.351.170,67;
- 3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp139.349.686.532,99;
- 4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.942.956,00.



Penambahan lainnya berupa reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp102.787.875,00 dan koreksi saldo awal sebesar Rp282,00 akibat dari selisih perhitungan penyusutan pada aplikasi SIMDA BMD.

Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2022 sebesar Rp6.303.298.627,39 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berupa penghapusan sebesar Rp3.779.394.446,39;
- 2) Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar berupa penghapusan, koreksi kurang dan perbaikan atribusi serta kode barang Rp2.415.333.316,00;
- 3) Pengurangan akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan berupa penghapusan dan koreksi kurang sebesar Rp108.570.865,00 .

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Jika setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

#### 8.1.1.5 DANA CADANGAN

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>56.160.390.391,32</u>	<u>15.000.000.000,00</u>

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp56.160.390.391,32 dan Rp15.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Tahun 2024 atau tahun lain sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening khusus Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah. Dana Cadangan yang disisihkan dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan total dana sebesar Rp75.000.000.000,00. Dana Cadangan pada tahun 2022 sebesar Rp40.000.000.000,00 telah dikeluarkan sebagai pengeluaran pembiayaan dan terdapat penambahan sebesar Rp1.160.390.391,32 yang merupakan bunga deposito dari Deposito Dana Cadangan pada Bank Kalsel dengan Nomor 0042099 Nomor Rekening AA22339K5MSJ-3201322722 yang menambah Dana Cadangan tersebut.

#### 8.1.1.6 ASET LAINNYA

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>341.837.641.175,37</u>	<u>15.822.566.957,61</u>

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp341.837.641.175,37 dan Rp15.822.566.957,61 terdiri atas:

**Tabel 106 Rincian Saldo Aset Lainnya**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Tak Berwujud	5.206.658.805,52	7.556.204.010,52	(2.349.545.205,00)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud	(2.834.236.121,39)	(5.526.751.385,32)	2.692.515.263,93
3	Aset Lain-lain	349.666.114.158,06	27.764.661.333,35	321.901.452.824,71
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(10.200.895.666,82)	(13.971.547.000,94)	3.770.651.334,12
<b>Jumlah</b>		<b>341.837.641.175,37</b>	<b>15.822.566.957,61</b>	<b>326.015.074.217,76</b>

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

**8.1.1.6.1 ASET TIDAK BERWUJUD**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**5.206.658.805,52**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**7.556.204.010,52**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.206.658.805,52 dan Rp7.556.204.010,52. Aset Tidak Berwujud berupa *Software*, *Software Lainnya*, Hak Cipta, Film, Karya Seni, Lisensi dan *Franchise*, serta Kajian yang nilai bruto sebesar Rp5.206.658.805,52 dengan nilai Amortisasi senilai Rp2.834.236.121,39 sehingga nilai netto sebesar Rp2.372.422.684,13 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 107 Rincian Aset Tidak Berwujud**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Software	5.936.106.010,52	379.130.000,00	3.430.798.205,00	2.884.437.805,52	(3.051.668.205,00)	(51,41)
2	Software Lainnya	40.425.000,00	0,00	0,00	40.425.000,00	0,00	0,00
3	Hak Cipta	138.847.000,00	0,00	69.597.000,00	69.250.000,00	(69.597.000,00)	(50,12)
4	Film	44.990.000,00	0,00	0,00	44.990.000,00	0,00	0,00
5	Karya Seni/Budaya	95.300.000,00	0,00	72.100.000,00	23.200.000,00	(72.100.000,00)	(75,66)
6	Lisensi dan Frenchise	128.425.000,00	0,00	0,00	128.425.000,00	0,00	100,00
7	Kajian	1.172.111.000,00	843.820.000,00	0,00	2.015.931.000,00	843.820.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.556.204.010,52</b>	<b>1.222.950.000,00</b>	<b>3.572.495.205,00</b>	<b>5.206.658.805,52</b>	<b>(2.349.545.205,00)</b>	<b>(31,09)</b>

Realisasi aset tak berwujud Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.349.545.205,00 atau sebesar 31,09% dari tahun sebelumnya.

Penambahan aset tak berwujud berasal dari belanja modal aset tak berwujud Rp379.130.000,00 dan belanja konsultansi kajian sebesar Rp843.820.000,00 dan pengurangannya berasal dari penghapusan aset tak berwujud berdasarkan SK Penghapusan Nomor 032/26-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan nilai Rp3.572.495.205,00

Nilai netto Aset Tak Berwujud untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.372.422.684,13. Adapun rincian Amortisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 108 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Software	5.042.610.185,32	420.175.741,07	3.430.798.205,00	2.031.987.721,39	(3.010.622.463,93)	(59,70)
2	Software Lainnya	13.541.000,00	8.085.000,00	0,00	21.626.000,00	8.085.000,00	59,71
3	Hak Cipta	97.197.000,00	13.850.000,00	69.597.000,00	41.450.000,00	(55.747.000,00)	(57,35)
4	Film	17.996.000,00	8.998.000,00	0,00	26.994.000,00	8.998.000,00	50,00
5	Karya Seni/Budaya	95.300.000,00	0,00	72.100.000,00	23.200.000,00	(72.100.000,00)	(75,66)
6	Lisensi dan Franchise	25.685.000,00	25.685.000,00	0,00	51.370.000,00	25.685.000,00	100,00
7	Kajian	234.422.200,00	403.186.200,00	0,00	637.608.400,00	403.186.200,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.526.751.385,32</b>	<b>879.979.941,07</b>	<b>3.572.495.205,00</b>	<b>2.834.236.121,39</b>	<b>(2.692.515.263,93)</b>	<b>(48,72)</b>

Saldo Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.692.515.263,93 atau sebesar 48,72% dari tahun sebelumnya.

Penambahan nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berasal dari beban amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2022 sebesar Rp879.979.941,07, dan pengurangannya berasal dari penghapusan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp3.572.495.205,00.

#### 8.1.1.6.2 ASET LAIN-LAIN

**31 Desember 2022**  
(Rp)

**349.666.114.158,06**

**31 Desember 2021**  
(Rp)

**27.764.661.333,35**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp349.666.114.158,06 dan Rp27.764.661.333,35. Realisasi Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp325.672.104.158,83 atau sebesar 2.361,12% dari tahun sebelumnya. Nilai bruto Aset Lain-lain sebesar Rp349.666.114.158,06 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp10.200.895.666,82 sehingga nilai netto sebesar Rp339.465.218.491,24. Adapun rincian Aset Lain-Lain terdiri atas:

**Tabel 109 Rincian Aset Lain-Lain**

No.	Uraian	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Kenaikan / (Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Uang persediaan yang hilang dicuri	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00
2	Aset tidak ditemukan keberadaannya	15.784.174.468,10	17.863.807.707,69	(2.079.633.239,59)	(11,64)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Kenaikan / (Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Aset yang direncanakan akan dihapuskan	4.603.317.966,96	9.053.867.125,66	(4.450.549.158,70)	(49,16)
4	Jasa Konsultasi Perencanaan	8.358.860.867,00	838.066.500,00	7.520.794.367,00	897,40
5	Transfer DBH berupa TDF	320.910.840.856,00	0,00	320.910.840.856,00	100,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(10.200.895.666,82)	(13.971.547.000,94)	3.770.651.334,12	(26,99)
<b>Jumlah</b>		<b>339.465.218.491,24</b>	<b>13.793.114.332,41</b>	<b>325.672.104.158,83</b>	<b>2.361,12</b>

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 terdiri atas:

- 1) Dalam saldo 31 Desember 2021 masih terdapat Uang Persediaan Tahun 2008 pada Dinas Peternakan sebesar Rp8.920.000,00 yang hilang akibat pencurian di Kantor Dinas Peternakan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian No.Pol: STPL/77/XI/2008/SPK tanggal 25 Nopember 2008. Uang Persediaan yang hilang tersebut masih dalam proses penghapusan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan proses permintaan keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Nomor: 700/03/LHK/NSP/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Laporan Hasil Permintaan Keterangan tentang Kehilangan Uang Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dinyatakan memang terbukti telah terjadi pencurian uang kas yang dikelola bendahara pengeluaran pada Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut yang terjadi pada tanggal 25 Nopember 2008 senilai Rp8.920.000,00 untuk selanjutnya diusulkan dilakukan proses penghapusan;
- 2) Aset Tetap yang Tidak Ditemukan pada penguasaan pengguna sebesar Rp15.788.794.468,10 pada 24 SKPD berdasarkan hasil Inventarisasi/Sensus Aset Daerah dan masih dalam tahap konfirmasi yang selanjutnya akan dihapuskan atau direklasifikasi kembali ke Aset Tetap sampai dengan diperolehnya hasil penelitian dan pengkajian oleh tim. Penurunan aset tetap yang tidak ditemukan sebesar Rp2.079.633.239,59 karena adanya penghapusan, reklasifikasi ke aset tetap yang akan dihapuskan, dan koreksi pencatatan ganda dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 032/15-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022 Rp1.449.536,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. 032/73-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Rp252.215.897,59 dikarenakan sebab lain (kadaluwarsa) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. 032/21-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp7.650.000,00 dikarenakan sebab lain pada Dinas Sosial;
  - d. 032/22-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp14.710.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Kurau;
  - e. 032/55-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp14.978.271,55 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan;
  - f. 032/73-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Rp121.355.000,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - g. 032/72-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Rp1.777.509.534,39 dikarenakan sebab lain (hilang tidak ditemukan) pada Sekretariat Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Kabupaten, dan Kecamatan Bajuin.
- h. Reklasifikasi ke aset tetap yang akan dihapuskan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp4.620.000,00.
  - i. Koreksi kurang karena pencatatan ganda pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.500.000,00.
- 3) Aset tetap yang akan dihapuskan pada Tahun 2022 mengalami dikarenakan adanya penghapusan sebesar Rp4.355.244.158,69 dan reklasifikasi ke aset tetap karena perubahan kondisi sebesar Rp110.275.000,00 dengan sebagai berikut:
- a. 188.45/1036-KUM /2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp70.145.000,01 dikarenakan sebab pemusnahan pada Sekretariat Daerah;
  - b. 032/37-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp1.450.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Perhubungan;
  - c. 032/34-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp129.200.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. 032/41-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp12.925.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. 032/40-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp716.272.139,60 dan 032/40-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp377.089.620,65 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Kesehatan;
  - f. 032/39-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp5.338.181,75 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - g. 032/43-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp4.000.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. 032/16-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022 Rp3.313.636,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
  - i. 032/18-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022 Rp39.375.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - j. 032/20-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp17.941.176,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan, 032/58-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp328.303.000,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan, 032/73-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Rp121.355.000,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - k. 032/35-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp4.137.500,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Sosial;
  - l. 032/22-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp5.947.500,00 dikarenakan sebab pemusnahan, 032/47-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp3.550.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Kurau;

- m. 032/28-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp3.450.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan penghapusan;
- n. 032/29-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp146.623.111,75 dikarenakan sebab pemusnahan, 032/55-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp72.105.388,75 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan;
- o. 032/30-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp9.407.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. 032/31-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp60.236.550,33 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- q. 032/32-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp461.334.920,01 dikarenakan sebab pemusnahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin;
- r. 032/33-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp73.891.154,38 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- s. 032/36-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp65.536.571,43 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- t. 032/38-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp9.510.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- u. 032/42-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp14.111.500,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Sekretariat DPRD;
- v. 032/44-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp137.359.564,80 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- w. 032/45-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp14.158.909,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Pelaihari;
- x. 032/46-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp7.650.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Bajuin;
- y. 032/52-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp482.971.950,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan 032/66-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 Rp14.500.000,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan karena hibah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- z. 032/53-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp11.900.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pariwisata;
- aa. 032/54-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp278.599.422,69 dikarenakan sebab pemusnahan, 032/61-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 Rp643.455.361,54 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- bb. 032/56-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp8.100.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Tambang Ulang;
- cc. Reklasifikasi ke aset tetap karena perubahan kondisi barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp32.000.000,00, Kecamatan Pelaihari sebesar Rp9.350.000,00, Kecamatan Bajuin sebesar Rp4.465.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp45.000.000,00, Inspektorat sebesar Rp11.560.000,00, dan BPKAD sebesar Rp7.900.000.

Sehingga saldo akhir aset tetap yang akan dihapuskan dengan nilai Rp4.592.967.966,96 dengan rincian sebagai berikut:

- Aset rusak berat hasil sensus BMD Tahun 2013 sebesar Rp139.862.500,00 dan aset rusak berat hasil Sensus BMD Tahun 2018 sebesar Rp3.354.441.871,96;
  - Alsintan yang rencana akan dihapuskan sebesar Rp194.843.095,00 merupakan reklasifikasi dari Investasi non Permanen;
  - Aset sisa P3D Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp824.331.700,00;
  - Selisih aset sisa P3D Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp74.868.800,00.
  - Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp8.358.860.867,00 merupakan jasa konsultansi perencanaan/DED yang sudah tidak akan digunakan lagi, direncanakan untuk dihapuskan, dan jasa konsultansi perencanaan/DED yang belum diketahui kapan keberlanjutan atas pekerjaan fisiknya.
  - Aset Tetap lainnya berupa maket sebesar Rp10.350.000,00 pada Dinas Kesehatan yang direncanakan akan dihapuskan.
- 4) Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp10.200.895.666,82 yang terdiri dari:
- a. Akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk hasil sensus BMD Tahun 2018 sebesar Rp9.531.271.531,88.
  - b. Akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk Aset sisa P3D Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp669.624.134,94;

Terdapat juga Aset lainnya berupa Treasury Deposit Facilities per 31 Desember 2022 sebesar Rp320.910.840.856,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Treasury Deposit Facilities (TDF) di Bank Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai penampungan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai, dengan cara pencairan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

#### 8.1.1.7 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
(Rp)	(Rp)
<b>45.004.188.393,86</b>	<b>77.655.730.591,51</b>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp45.004.188.393,86 dan Rp77.655.730.591,51 terdiri atas:

**Tabel 110 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan Diterima Di muka	346.108.795,96	218.646.756,26	127.462.039,70
2.	Utang Belanja	3.509.128.544,90	5.599.125.149,25	(2.089.996.604,35)
3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	41.148.951.053,00	71.837.958.686,00	(30.689.007.633,00)
<b>Jumlah</b>		<b>45.004.188.393,86</b>	<b>77.655.730.591,51</b>	<b>(32.651.542.197,65)</b>

Penjelasan atas saldo masing-masing Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut  
 Penjelasan atas saldo masing-masing Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

#### 8.1.1.7.1 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2022

(Rp)

**346.108.795,96**

31 Desember 2021

(Rp)

**218.646.756,26**

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp346.108.795,96 dan Rp218.646.756,26. Saldo tersebut berasal dari:

- Pendapatan diterima dimuka atas sebagian tanah di Desa Panggung seluas ± 122.540 m<sup>2</sup> x Rp. 15,-/m<sup>2</sup> milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Abdul Rahman sebesar Rp1.135.674,80 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 188.45/50-PPBMD/KUM/2022 tanggal 6 September 2022 dengan besaran sewa Rp7.352.000,00 dengan jangka waktu 4 bulan mulai 19 September 2022 sampai dengan 19 Januari 2023.
- Pendapatan diterima dimuka atas Sebagian Tanah Jl. Penggadungan Desa Ujung Kec. Bati-Bati Rt. 007 Rw. 002 seluas lahan seluas ±13.894 m<sup>2</sup> x Rp. 15,-/m<sup>2</sup> milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Safriansyah sebesar Rp231.566,67 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 188.45/89-PPBMD/KUM/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan besaran sewa Rp416.820,00 dengan jangka waktu 2 bulan mulai 4 Desember 2022 sampai dengan 4 Februari 2023.
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa Bangunan Gedung Kantor Jalan A. Syairani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari dengan luas bangunan 101 m<sup>2</sup> sebesar Rp68.316.035,58 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Bank Kalsel Cabang Pelaihari berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/9-Perj/KUM/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 3 tahun mulai 23 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2025 dengan besaran sewa Rp95.625.000,00 per 3 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan gedung untuk *booth* ATM di Jalan A. Syairani dengan luas 5 m<sup>2</sup> sebesar Rp33.595.415,15 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Bank Kalsel Cabang Pelaihari berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/9-Perj/KUM/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 3 tahun mulai 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp47.025.000,00 per 3 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan rumah dinas di Jalan Pangeran Antasari Pelaihari dengan luas bangunan 60 m<sup>2</sup> sebesar Rp90.986,30 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/21-Perj/KUM/2022 dan 001/PT. BPR/TALA/VI/2022 tanggal 2 Januari 2021 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 2 tahun mulai 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp33.210.000,00 per 1 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan rumah dinas di Jalan Pangeran Antasari Pelaihari dengan luas bangunan 60 m<sup>2</sup> sebesar Rp66.142,47 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/37-Perj/KUM/2022 dan 088/PT. BPR/TALA/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 1 tahun mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp12.071.000,00 per 1 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah di Jalan Swadaya No.111 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau sebesar Rp7.915.808,22 milik Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pelaihari berdasarkan Perjanjian Nomor 180.3/PK-KUM/2021 tanggal 5 Januari 2021 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 3 tahun mulai 5 Januari 2021 sampai dengan 4 Januari 2024, dengan besaran sewa Rp23.490.000,00 per 3 tahun;

- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan gudang di Jalan Telkom Desa Ambungan Pelaihari dengan luas 440 m2 sebesar Rp827.465,75 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PT. Gede Langgeng Makmur berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/4/PK-KUM/2021 tanggal 6 Januari 2022 dengan jangka waktu 1 tahun, mulai 6 Januari 2022 sampai dengan 5 Januari 2023, dengan besaran sewa Rp60.405.000,00 per tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa Tanah dan 1 unit Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen seluas 192 m2 sebesar Rp22.915.380,82 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PD. Baratala Tuntung Pandang berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/5/PK-KUM/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan jangka waktu 2 tahun, mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024, dengan besaran sewa Rp42.243.000,00 per tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Penyewaan Sebagian Bangunan Gedung Kantor Permanen DPMPTSP sebesar Rp7.618.510,27 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang Kab. Tanah Laut berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/87-Perj/KUM/2022 tanggal 27 Desember 2022 dengan jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 7 Oktober 2022 dengan besaran sewa Rp8.622.500,00 per 2 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Penyewaan rumah dinas di Jalan Karya RT. 2 RW. 1/Mess Pemda sebesar Rp802.756,83 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Khairandi berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/64-Perj/KUM/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dengan jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 11 April 2023 dengan besaran sewa Rp1.454.500,00 per 6 bulan;
- Pendapatan diterima dimuka atas Penyewaan Rumah Dinas Jalan Pancapan Kecamatan Pelaihari Nomor 50.13.01/0040 sebesar Rp6.811,83 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Rohib Hidayat berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/70-Perj/KUM/2022 tanggal 30 September 2022 dengan jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp633.500,00 per 3 bulan;
- Pendapatan diterima dimuka atas Penyewaan rumah dinas di Jalan Karya RT. 2 RW. 1/Mess Pemda sebesar Rp245.051,97 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Abdul Bakar berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/48-Perj/KUM/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp1.454.502,00 per 6 bulan;
- Pendapatan Diterima dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame yang diterima di tahun 2022 sebesar Rp202.341.189,31 pada Badan Pendapatan Daerah.

Rincian Pendapatan diterima dimuka atas sewa dan pajak reklame bisa dilihat pada *Lampiran 12.1* dan *Lampiran 12.2*.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

8.1.1.7.2

UTANG BEBAN

31 Desember 2022

(Rp)

**3.509.128.545,50**

31 Desember 2021

(Rp)

**5.599.125.149,25**

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.509.128.545,50 dan Rp5.599.125.149,25. Utang beban barang dan jasa yang berasal dari jasa listrik, jasa air, jasa telepon serta jasa internet sebesar Rp629.811.837,00 tahun 2022, yang telah dibayarkan semua pada triwulan I Tahun Anggaran 2023.

Rincian Utang Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 111 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa SKPD

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DPUPRP	23.996.601,00	19.569.204,00	4.427.397,00	22,62
2	Dinas Perhubungan	6.746.098,00	5.701.515,00	1.044.583,00	18,32
3	Inspektorat Kabupaten	6.190.328,00	4.187.710,00	2.002.618,00	47,82
4	DPMPSTP	6.624.072,00	5.319.808,00	1.304.264,00	24,52
5	Kecamatan Jorong	1.333.900,00	1.544.772,00	(210.872,00)	(13,65)
6	DP2KBP3A	7.906.818,00	3.643.144,00	4.263.674,00	117,03
7	DPMD	1.864.524,00	1.536.530,00	327.994,00	21,35
8	Sekretariat DPRD	26.219.259,00	22.272.256,00	3.947.003,00	17,72
9	BPBD	441.000,00	3.009.037,00	(2.568.037,00)	(85,34)
10	Dinas Pariwisata	2.016.361,00	6.667.572,00	(4.651.211,00)	(69,76)
11	Kecamatan Batu Ampar	1.434.688,00	1.712.804,00	(278.116,00)	(16,24)
12	Kecamatan Kintap	1.460.400,00	1.185.908,00	274.492,00	23,15
13	Kecamatan Bumi Makmur	1.213.242,00	2.007.387,00	(794.145,00)	(39,56)
14	Badan Pendapatan Daerah	5.778.306,00	4.285.204,00	1.493.102,00	34,84
15	Dinas Kesehatan	3.190.498.047,50	5.321.556.240,25	(2.131.058.192,75)	(40,05)
16	DPRKPLH	2.824.720,00	8.076.541,00	(5.251.821,00)	(65,03)
17	Disdikbud	15.835.366,00	9.358.635,00	6.476.731,00	69,21
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.087.859,00	8.296.912,00	3.790.947,00	45,69
19	Dinas Sosial	2.137.292,00	3.745.843,00	(1.608.551,00)	(42,94)
20	Disnakerind	9.269.432,00	8.895.598,00	373.834,00	4,20
21	DKPP	0,00	386.090,00	(386.090,00)	(100,00)
22	Disdukcapil	13.547.439,00	7.116.468,00	6.430.971,00	90,37
23	Diskopdag	4.837.622,00	3.812.234,00	1.025.388,00	26,90
24	Dispora	11.414.548,00	9.532.064,00	1.882.484,00	19,75
25	Dispusip	9.637.188,00	5.330.830,00	4.306.358,00	80,78
26	Distanhorbun	12.222.348,00	9.715.665,00	2.506.683,00	25,80
27	Disnakeswan	7.432.855,00	5.471.993,00	1.960.862,00	35,83
28	Sekretariat Daerah	76.976.550,00	70.836.720,00	6.139.830,00	8,67
29	Kecamatan Pelaihari	3.167.291,00	2.833.090,00	334.201,00	11,80
30	Kecamatan Tambang Ulang	996.899,00	1.120.527,00	(123.628,00)	(11,03)
31	Kecamatan Kurau	1.620.302,00	2.502.831,00	(882.529,00)	(35,26)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
32	Kecamatan Bati-Bati	3.374.656,00	2.925.444,00	449.212,00	15,36
33	Kecamatan Panyipatan	0,00	2.271.052,00	(2.271.052,00)	(100,00)
34	Kecamatan Takisung	3.503.619,00	3.215.403,00	288.216,00	8,96
35	Kecamatan Bajuin	2.181.317,00	1.063.154,00	1.118.163,00	105,17
36	Bappeda	9.182.270,00	7.273.950,00	1.908.320,00	26,23
37	BPKAD	13.753.851,00	13.341.692,00	412.159,00	3,09
38	BKPSDM	4.509.208,00	4.914.266,00	(405.058,00)	(8,24)
39	Badan Kesbangpol	4.892.269,00	2.889.056,00	2.003.213,00	69,34
	<b>Jumlah</b>	<b>3.509.128.545,50</b>	<b>5.599.125.149,25</b>	<b>(2.089.996.603,75)</b>	<b>(37,33)</b>

Utang beban barang dan jasa SKPD pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.089.996.603,75 atau sebesar 37,33% dari tahun sebelumnya, utang beban jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.879.316.708,50 merupakan utang pada BLUD. Utang BLUD RSUD & Puskesmas sebesar Rp2.879.316.708,50 terdiri dari:

Tabel 112 Utang BLUD RSUD & Puskesmas

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2022
1	PKM ANGSAU	11.844.580,00
2	PKM ASAM-ASAM	3.142.301,08
3	PKM BATAKAN	5.833.799,79
4	PKM BATI-BATI	16.223.550,00
5	PKM BUMI MAKMUR	16.081.480,00
6	PKM JORONG	23.176.960,00
7	PKM KAIT-KAIT	4.573.100,00
8	PKM KINTAP	4.479.900,00
9	PKM KURAU	1.005.900,00
10	PKM PANYIPATAN	4.972.100,00
11	PKM PADANG LUAS	3.673.600,00
12	PKM PELAIHARI	305.500,00
13	PKM SUNGAI RIAM	2.921.800,00
14	PKM TAJAU PECAH	12.191.200,00
15	PKM TAKISUNG	5.765.999,63
16	PKM TAMBANG ULANG	9.510.980,00
17	PKM TANJUNG HABULU	2.171.400,00
18	PKM TIRTA JAYA	10.737.860,00
19	PKM SUNGAI CUKA	34.178.030,00
20	PKM BENTOK KAMPUNG	66.729.750,00
21	PKM DURIAN BUNGKUK	1.778.700,00
22	RSUD H. BOEJASIN	2.207.757.291,00
23	RSUD KH.MANSYUR	430.260.927,00
	<b>Total</b>	<b>2.879.316.708,50</b>

Rincian pada Lampiran 13.1

**Tabel 113 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Jasa telepon	31.859.402,00	2.703.833,00	29.155.569,00	1.078,31
2	Beban Jasa air	52.293.500,00	37.963.840,00	14.329.660,00	37,75
3	Beban Jasa listrik	543.758.385,00	532.473.835,00	11.284.550,00	2,12
4	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.900.550,00	26.798.773,00	(24.898.223,00)	(92,91)
5	Beban Jasa Medis	2.879.316.708,50	4.999.184.868,25	(2.119.868.159,75)	(42,40)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.509.128.545,50</b>	<b>5.599.125.149,25</b>	<b>(2.089.996.603,75)</b>	<b>(37,33)</b>

**8.1.1.7.3 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**41.148.951.053,00**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**71.837.958.686,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp41.148.951.053 dan Rp71.837.958.686,00 terjadi penurunan sebesar Rp30.689.007.633,00 atau sebesar 42,72%. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 merupakan Utang Lebih Salur DBH Pajak dan SDA. Rincian untuk utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 114 Utang Lebih Salur DBH**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DBH PBB	591.314.888,00	44.346.699,00	546.968.189,00	1233,39
2	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	968.218.600,00	(968.218.600,00)	(100,00)
3	DBH SDA Pertambangan Umum (Mineral dan Batu Bara)	40.384.163.241,00	70.667.699.367,00	(30.283.536.126,00)	(42,85)
4	DBH SDA Perikanan	173.472.924,00	157.694.020,00	15.778.904,00	10,01
	<b>Jumlah</b>	<b>41.148.951.053,00</b>	<b>71.837.958.686,00</b>	<b>(30.689.007.633,00)</b>	<b>(42,72)</b>

Rincian utang Lebih Salur DBH Pajak dan SDA dapat dilihat pada *Lampiran 13.2*.

Saldo Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil yang lebih bayar dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 127 /PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2022, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode 2 Pada Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.7/2022 tgl 28 Desember 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode 3 Pada Tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

**8.1.1.8 EKUITAS**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
(Rp)	(Rp)
<b>4.991.132.313.394,95</b>	<b>4.230.967.002.274,38</b>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.991.132.313.394,95 dan Rp4.230.967.002.274,38. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.230.967.002.274,38 ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional Tahun 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2021	4.230.967.002.274,38
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	73.721.130.756,88
Surplus/defisit Operasional	686.444.180.363,69
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022	<b>4.991.132.313.394,95</b>

**8.1.2 LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**8.1.2.1 PENDAPATAN-LO**

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

**Tabel 115 Pendapatan LO**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	168.093.093.620,29	240.672.417.322,89	(72.579.323.702,60)	(30,16)
2	Pendapatan Transfer	2.138.379.085.769,35	1.167.194.767.400,02	971.184.318.369,33	83,21
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.172.105.677,00	50.845.899.839,00	(45.673.794.162,00)	(89,83)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.311.644.285.066,64</b>	<b>1.458.713.084.561,91</b>	<b>852.931.200.504,73</b>	<b>58,47</b>

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

**8.1.2.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

**1) Pendapatan Pajak Daerah**

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 116 Pendapatan Pajak Daerah**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pajak Hotel	88.001.904,00	48.977.500,00	39.024.404,00	79,68
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	487.100.153,00	236.774.452,00	250.325.701,00	105,72
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.305.161.295,80	4.037.420.782,00	267.740.513,80	6,63
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	65.345.000,00	46.790.000,00	18.555.000,00	39,66
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	489.924.998,77	376.655.487,44	113.269.511,33	30,07
6	Pajak Reklame Kain	46.717.875,00	112.634.467,43	(65.916.592,43)	(58,52)
7	Pajak Reklame Melekat/Stiker	18.087.840,00	21.423.070,00	(3.335.230,00)	(15,57)
8	Pajak Reklame Berjalan	5.875.200,00	5.884.597,16	(9.397,16)	(0,16)
9	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.887.516.287,00	21.009.663.614,00	3.877.852.673,00	18,46
10	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	52.972.952,00	60.867.925,00	(7.894.973,00)	(12,97)
11	Pajak Parkir	118.382.800,00	37.651.000,00	80.731.800,00	214,42
12	Pajak Air Tanah	1.357.979.711,00	1.124.850.085,00	233.129.626,00	20,73
13	Pajak Sarang Burung Walet	75.090.000,00	93.364.500,00	(18.274.500,00)	(19,57)
14	Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya	1.630.843.755,00	1.305.156.468,00	325.687.287,00	24,95
15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.610.538.542,00	6.383.268.747,00	227.269.795,00	3,56
16	BPHTB - Pemindahan Hak Baru	5.448.746.032,00	2.858.475.687,00	2.590.270.345,00	90,62
17	BPHTB - Pemberian Hak Baru	1.011.497.684,00	6.769.672.591,00	(5.758.174.907,00)	(85,06)
	<b>Jumlah</b>	<b>46.699.782.029,57</b>	<b>44.529.530.973,03</b>	<b>2.170.251.056,54</b>	<b>4,87</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah–LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.170.251.056,54 atau sebesar 4,87%.

Terdapat Perbedaan antara Pendapatan Pajak (LRA) dan Pendapatan Pajak (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 117 Perbedaan Pendapatan Pajak LRA dan LO**

Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	45.363.440.225,80
Pendapatan Pajak Daerah (LO)	46.699.782.029,57
<b>Selisih</b>	<b>(1.336.341.803,30)</b>

Perbedaan sebesar Rp1.336.341.803,30 dikarenakan Penambahan piutang pajak daerah sebesar Rp2.465.780.312,00 pengurangan piutang pajak daerah sebesar Rp1.104.284.616,00, Penambahan Pendapatan Diterima dimuka atas Pajak Reklame sebesar Rp202.341.189,30 dan Pengurangan Pendapatan Diterima dimuka atas Pajak Reklame sebesar Rp177.187.297,08.

## 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 118 Pendapatan Retribusi**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan kesehatan	0,00	1.120.000,00	(1.120.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	223.380.000,00	324.077.500,00	(100.697.500,00)	(31,07)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	82.700.000,00	45.445.000,00	37.255.000,00	81,98
4	Retribusi Pelataran	562.209.000,00	497.329.000,00	64.880.000,00	13,05
5	Retribusi Los	425.476.000,00	174.669.000,00	250.807.000,00	143,59
6	Retribusi Kios	739.232.000,00	226.638.000,00	512.594.000,00	226,17
7	Retribusi PKB	306.330.500,00	437.562.500,00	(131.232.000,00)	(29,99)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	22.330.000,00	12.440.000,00	9.890.000,00	79,50
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	314.499.500,00	190.478.950,00	124.020.550,00	65,11
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	562.424.000,00	564.880.000,00	(2.456.000,00)	(0,43)
11	Retribusi Penyewaan Bangunan	337.995.000,00	344.864.200,00	(6.869.200,00)	(1,99)
12	Retribusi Pemakaian Laboratorium	495.792.500,00	541.781.400,00	(45.988.900,00)	(8,49)
13	Retribusi Pemakaian Ruangan	46.214.000,00	29.720.000,00	16.494.000,00	55,50
14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	72.915.000,00	52.485.000,00	20.430.000,00	38,93
15	Retribusi Pemakaian Alat	448.916.500,00	177.875.000,00	271.041.500,00	152,38
16	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	189.442.000,00	223.661.500,00	(34.219.500,00)	(15,30)
17	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	81.700.500,00	88.465.500,00	(6.765.000,00)	(7,65)
18	Retribusi Tempat Khusus Parkir	484.163.000,00	424.555.500,00	59.607.500,00	14,04
19	Retribusi Rumah Potong Hewan	59.796.000,00	56.844.000,00	2.952.000,00	5,19
20	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	899.829.000,00	544.346.500,00	355.482.500,00	65,30
21	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan	933.559.507,00	761.149.978,80	172.409.528,20	22,65
	<b>Jumlah</b>	<b>7.288.904.007,00</b>	<b>5.720.388.528,80</b>	<b>1.568.515.478,20</b>	<b>27,42</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.568.515.478,20 atau sebesar 27,42 %.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi (LRA) dan Pendapatan Retribusi (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 119 Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO**

Pendapatan Retribusi Daerah (LRA)	6.971.598.007,00
Pendapatan Retribusi Daerah (LO)	7.288.904.007,00
<b>Selisih</b>	<b>(317.306.000,00)</b>

Perbedaan sebesar Rp317.306.000,00 dikarenakan Penambahan Piutang Retribusi sebesar Rp343.575.000,00 dan Pengurangan Piutang Retribusi sebesar Rp26.269.000,00.

**2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dan pada Bank Kalsel. Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Kalsel dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya.

**Tabel 120 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	10.425.528.033,00	9.461.741.668,00	963.786.365,00	10,19
2	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan	838.743.041,28	541.016.478,20	297.726.563,08	55,03
3	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha	1.273.886.134,00	374.935.017,00	898.951.117,00	239,76
	<b>Jumlah</b>	<b>12.538.157.208,28</b>	<b>10.377.693.163,20</b>	<b>2.160.464.045,08</b>	<b>20,82</b>

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.160.464.045,08 atau sebesar 20,82%.

Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 121 Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan LO**

Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (LRA)	11.010.810.384,00
Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (LO)	12.538.157.208,28
<b>Selisih</b>	<b>(1.527.346.824,28)</b>

Terdapat Perbedaan sebesar Rp1.527.346.824,28 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR Tanah Laut Rp732.737.704,28 dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Baratala Rp794.609.120,00.

**3) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 122 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	126.026.425,00	271.301.749,00	(145.275.324,00 )	(53,55)
2	Hasil Sewa BMD	445.894.106,53	208.777.976,11	237.116.130,42	113,57
3	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
4	Jasa Giro Kas Daerah	18.071.530.348,14	17.153.845.293,13	917.685.055,01	5,35
5	Jasa Giro Kas Bendahara	383.838.274,83	144.973.481,26	238.864.793,57	164,76
6	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	1.160.390.391,32	0,00	1.160.390.391,32	100,00
7	Jasa Giro Rekening Dana BOS	0,00	10.671.270,00	(10.671.270,00)	(100,00)
8	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	30.000.000,00	(106.342.500,00)	136.342.500,00	(128,21)
9	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	16.808.219.172,75	(16.808.219.172,75)	(100,00)
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	518.315.758,00	144.600.396,00	373.715.362,00	258,45
11	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	410.125,00	4.441.000,00	(4.030.875,00)	(90,77)
12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.622.030.176,84	530.479.990,94	1.091.550.185,90	205,77
13	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan	308.410.195,00	461.266.133,00	(152.855.938,00)	(33,14)
14	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Taperum Rakyat	2.000.000,00	53.827.262,00	(51.827.262,00)	(96,28)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
15	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	401.587.962,00	77.517.090,00	324.070.872,00	418,06
16	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	188.554.605,00	(188.554.605,00)	(100,00)
17	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran (JKK)	161.499.510,00	77.461.703,00	84.037.807,00	108,49
18	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran (JKM)	0,00	32.757.490,00	(32.757.490,00)	(100,00)
19	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran (JKN)	0,00	0,20	(0,20)	(100,00)
20	Pendapatan BLUD	77.978.126.479,63	143.912.853.018,47	(65.934.726.538,84)	(45,82)
21	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	30.972.500,00	68.950.000,00	(37.977.500,00)	(55,08)
22	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	202.387.485,03	649.527,00	201.737.958,03	31.059,21
23	Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	77.830.638,12	0,00	77.830.638,12	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>101.566.250.375,44</b>	<b>180.044.804.657,86</b>	<b>(78.478.554.282,42)</b>	<b>(43,59)</b>

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp78.478.554.282,42 atau sebesar 43,59%.

Perbedaan antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LRA) dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 123 Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LO**

Lain-lain PAD Yang Sah (LRA)	130.544.167.137,07
Lain-lain PAD Yang Sah (LO)	101.566.250.375,44
<b>Selisih</b>	<b>28.977.916.761,63</b>

Perbedaan sebesar Rp28.977.916.761,63 dikarenakan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa bangunan/tanah sebesar Rp184.977.606,65, pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp86.838.971,18, Pengurangan Piutang sebesar Rp33.955.067.421,00, dan Penambahan Piutang Rp3.914.898.903,52, dan Pendapatan Bunga Deposito Dana Cadangan sebesar Rp1.160.390.391,32.

### 8.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 124 Pendapatan Transfer**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.946.912.915.925,00	1.034.624.002.233,00	912.288.913.692,00	88,18
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00	(8.729.493.000,00)	(45,77)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.123.223.844,35	113.498.326.167,02	67.624.897.677,33	59,58
	<b>Jumlah</b>	<b>2.138.379.085.769,35</b>	<b>1.167.194.767.400,02</b>	<b>971.184.318.369,33</b>	<b>83,21</b>

#### 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 125 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	1.216.551.769.067,00	348.951.388.688,00	867.600.380.379,00	248,63
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	491.839.636.893,00	494.306.446.000,00	(2.466.809.107,00)	(0,50)
3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.691.850.759,00	78.056.125.716,00	11.635.725.043,00	14,91
4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	148.829.659.206,00	113.310.041.829,00	35.519.617.377,00	31,35
	<b>Jumlah</b>	<b>1.946.912.915.925,00</b>	<b>1.034.624.002.233,00</b>	<b>912.288.913.692,00</b>	<b>88,18</b>

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

**Tabel 126 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DBH PBB	28.080.787.140,00	34.752.815.873,00	(6.672.028.733,00)	(19,20)
2	DBH PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29	8.877.959.820,00	8.667.310.362,00	210.649.458,00	2,43



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	DBH Cukai Hasil Tembakau	47.161,00	624,00	46.537,00	7.457,85
4	DBH SDA Minyak Bumi	-92.432.908,00	1.588.988.768,00	(1.681.421.676,00)	(105,82)
5	DBH SDA Gas Bumi	0,00	542.721.600,00	(542.721.600,00)	(100,00)
6	DBH SDA Mineral dan BatuBara-LandRent	1.647.232.617,00	570.843.748,00	1.076.388.869,00	188,56
7	DBH SDA Mineral dan BatuBara-Royalty	1.175.277.961.081,00	301.438.298.513,00	873.839.662.568,00	289,89
8	DBH SDA Kehutanan-PSDH	605.928.849,00	349.671.050,00	256.257.799,00	73,29
9	DBH SDA Perikanan	2.154.285.307,00	1.040.738.150,00	1.113.547.157,00	107,00
10	Dana Alokasi Umum	491.839.636.893,00	494.306.446.000,00	(2.466.809.107,00)	(0,50)
11	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler	11.242.522.680,00	9.582.476.862,00	1.660.045.818,00	17,32
12	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler	21.091.856.293,00	27.416.593.703,00	(6.324.737.410,00)	(23,07)
13	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Reguler	5.977.020.000,00	2.793.665.000,00	3.183.355.000,00	113,95
14	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Penugasan	0,00	495.376.000,00	(495.376.000,00)	(100,00)
15	DAK Fisik Bidang Pertanian-Penugasan	5.256.882.750,00	2.910.617.416,00	2.346.265.334,00	80,61
16	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	357.771.036,00	290.630.000,00	67.141.036,00	23,10
17	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.762.859.500,00	15.243.807.735,00	(4.480.948.235,00)	(29,40)
18	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.454.105.000,00	0,00	16.454.105.000,00	100,00
19	DAK Fisik Bidang Air Minum Reguler	11.033.469.000,00	0,00	11.033.469.000,00	100,00
20	DAK Fisik Bidang Sanitasi Reguler	1.950.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00	100,00
21	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	0,00	6.951.313.000,00	(6.951.313.000,00)	(100,00)
22	DAK Fisik Bidang	0,00	2.631.288.000,00	(2.631.288.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
23	Sanitasi Penugasan DAK Fisik Bidang Irigasi- Penugasan	4.274.239.500,00	8.383.048.000,00	(4.108.808.500,00)	(49,01)
24	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup- Penugasan	1.291.125.000,00	1.357.310.000,00	(66.185.000,00)	(4,88)
26	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	34.913.634.262,00	0,00	34.913.634.262,00	100,00
27	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.240.000.000,00	0,00	1.240.000.000,00	100,00
28	DAK Non Fisik TPG PNSD	87.015.173.489,00	99.243.920.000,00	(12.228.746.511,00)	(12,32)
29	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	1.485.145.500,00	615.467.000,00	869.678.500,00	141,30
30	DAK Non Fisik BOP PAUD	6.659.495.000,00	7.156.218.625,00	(496.723.625,00)	(6,94)
31	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.546.200.000,00	1.869.270.400,00	(323.070.400,00)	(17,28)
32	DAK Non Fisik BOKKB BOKB	14.983.944.401,00	2.615.635.945,00	12.368.308.456,00	472,86
34	DAK Non Fisik PK2UKM	293.245.149,00	242.878.040,00	50.367.109,00	20,74
35	DAK Non Fisik/Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.566.651.819,00	(1.566.651.819,00)	(100,00)
36	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	244.776.000,00	0,00	244.776.000,00	100,00
37	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	354.013.405,00	0,00	354.013.405,00	100,00
38	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	94.032.000,00	0,00	94.032.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.946.912.915.925,00</b>	<b>1.034.624.002.233,00</b>	<b>912.288.913.692,00</b>	<b>88,18</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp912.288.913.692,00 atau sebesar 88,18%. Antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (LRA) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (LO) terdapat perbedaan, sebagai berikut:

Tabel 127 Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO

Uraian	Nominal
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan (LRA)	1.667.151.026.122,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LO)	1.946.912.915.925,00
<b>Selisih</b>	<b>279.761.889.803,00</b>

Perbedaan Rp279.761.889.803,00 dikarenakan Dana DBH dalam bentuk TDF (Treasury Deposit Facilities) sebesar Rp320.910.840.856,00, Pengurangan Piutang Transfer Pusat sebesar Rp24.817.804.050,00, Pengurangan Utang Transfer Pusat sebesar Rp65.173.419.712,00, Penambahan Utang DBH Pusat sebesar Rp607.093.792,00.

Untuk Pendapatan Dana Desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp104.093.790.400,00 sesuai Penerapan Bultek 21 Dana Desa (Non Provinsi) tidak diakui sebagai Pendapatan LO.

## 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 128 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DID	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00	(8.729.493.000,00)	(45,77)
	<b>Jumlah</b>	<b>10.342.946.000,00</b>	<b>19.072.439.000,00</b>	<b>(8.729.493.000,00)</b>	<b>(45,77)</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.729.493.000,00 atau sebesar 45,77%.

Penerapan Bultek 21 Pendapatan Transfer Dana Desa (Non Provinsi) tidak diakui sebagai Pendapatan LO

## 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**4) Tabel 129 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	181.123.223.844,35	112.798.326.167,02	68.324.897.677,33	60,57
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>181.123.223.844,35</b>	<b>113.498.326.167,02</b>	<b>67.624.897.677,33</b>	<b>59,58</b>

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

**Tabel 130 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.676.101.732,51	20.958.077.480,44	(6.281.975.747,93)	(29,97)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.667.069.287,15	9.427.289.865,46	(2.760.220.578,31)	(29,28)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	140.544.616.751,68	66.102.623.729,53	74.441.993.022,15	112,62
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	621.860.148,01	150.759.128,59	471.101.019,42	312,49
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18.613.575.925,00	16.159.575.963,00	2.453.999.962,00	15,19
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
7	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten / Kota	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>181.123.223.844,35</b>	<b>113.498.326.167,02</b>	<b>67.624.897.677,33</b>	<b>59,58</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp67.624.897.677,33 atau sebesar 59,58%.

**Tabel 131 Perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA dan LO**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah (LRA)	181.618.220.753,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah (LO)	181.123.223.844,35
<b>Selisih</b>	<b>494.996.908,65</b>

Perbedaan sebesar Rp494.996.908,65 dikarenakan Penambahan Piutang Transfer Antar Daerah Rp50.656.124.065,67 dan Pengurangan Piutang Transfer Antar Daerah Rp51.151.120.974,32.

#### 8.1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dapat dijabarkan sebagai berikut.

##### 1) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022:

**Tabel 132 Pendapatan Hibah**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.639.568.606,00	7.743.747.769,00	(5.134.522.563,00)	(66,31)
2	Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.908.647.000,00	(2.908.647.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	305.000.000,00	582.786.500,00	(277.786.500,00)	(47,67)
4	Sumbangan Pihak Ketiga / Sejenis	2.143.662.071,00	497.938.570,00	1.648.911.635,00	331,15



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	-
6	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	83.875.000,00	0,00	83.875.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.172.105.677,00</b>	<b>11.733.119.839,00</b>	<b>(6.588.169.428,00)</b>	<b>(56,15)</b>

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.588.169.428,00 atau sebesar 56,15%.

**Tabel 133 Perbedaan Pendapatan Hibah LRA dan LO**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah (LRA)	2.143.662.071,00
Pendapatan Hibah (LO)	<b>5.172.105.677,00</b>
<b>Selisih</b>	<b>(3.028.443.606,00)</b>

Perbedaan sebesar Rp3.028.443.606,00 merupakan Hibah Aset/Barang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 134 Rincian Perbedaan Pendapatan Hibah LRA dan LO**

No	Nama SKPD/UPT	Jumlah Pendapatan Hibah Yang Diterima
<b>Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat</b>		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.799.818,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	331.086.800,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.525.300,00
4	Dinas Kesehatan	275.248.048,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.430.720.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	53.628.640,00
7	Dinas Perhubungan	515.560.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat</b>		<b>2.639.568.606,00</b>
<b>Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah</b>		
<b>Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>		
1	PKM Bumi Makmur	15.000.000,00
2	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	40.000.000,00
3	UPTD Pelaihari Disdik	250.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>		<b>305.000.000,00</b>
<b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi</b>		
1	Dinas Pendidikan	83.875.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi</b>		<b>83.875.000,00</b>
<b>Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis</b>		
1	Pemerintah Pusat	1.288.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga:	
	PT. Charoend Phokpand	21.000.000,00
	PT. Pugung Raya	130.216.656,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD/UPT	Jumlah Pendapatan Hibah Yang Diterima
	PT. Patriot Intan AB	22.200.000,00
	PT. Adhom Farm Indonesia	10.000.000,00
	PT. Arutmin	620.456.982,00
	PT. Ciomas Adisatwa	2.500.000,00
	PT. Prima Media Selaras	2.456.000,00
	PT. Sumber Graha Sejahtera	5.934.100,00
	Bank BJB	1.318.333,00
	BAPOPSI KALSEL	27.600.000,00
	Sumbangan Masyarakat	11.980.000,00
	<b>Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis</b>	<b>2.143.662.071,00</b>

2) **Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 135 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	39.112.780.000,00	(39.112.780.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>39.112.780.000,00</b>	<b>(39.112.780.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengalami penurunan sebesar Rp39.112.780.000,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS pada tahun 2022 sebesar Rp39.112.780.000,00

**8.1.2.5 BEBAN**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp1.615.548.306.693,40 dan Rp1.651.784.881.071,82 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 136 Rincian Beban**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pegawai	653.956.945.688,00	639.840.569.796,56	14.116.375.891,44	2,21
2	Persediaan	67.714.598.060,22	39.430.197.101,75	28.284.400.958,47	71,73
3	Jasa	343.585.705.542,38	250.882.770.953,98	92.702.934.588,40	36,95
4	Pemeliharaan	67.165.991.058,00	44.795.963.221,00	22.370.027.837,00	49,94
5	Perjalanan Dinas	45.122.102.741,00	40.228.425.279,00	4.893.677.462,00	12,16
6	Barang & BLUD	-	131.025.337.576,41	(131.025.337.576,41)	(100,00)
7	Hibah	44.321.201.603,00	53.691.496.964,00	(9.370.295.361,00)	(17,45)
8	Bantuan Sosial	22.416.500.000,00	15.250.290.000,00	7.166.210.000,00	46,99



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
9	Penyusutan dan Amortisasi	242.528.344.798,91	303.077.833.023,09	(60.549.488.224,18)	(19,98)
10	Penyisihan Piutang	3.796.434.962,30	2.344.293.329,47	1.452.141.632,83	61,94
11	Lain-lain	4.057.803.099,58	4.521.621.201,56	(463.818.101,98)	(10,26)
12	Transfer	120.136.253.140,00	120.224.510.660,00	(88.257.520,00)	(0,07)
13	Luar Biasa	746.426.000,00	6.471.571.965,00	(5.725.145.965,00)	(88,47)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.615.548.306.693,39</b>	<b>1.651.784.881.071,82</b>	<b>(36.236.574.378,43)</b>	<b>(2,19)</b>

Realisasi Beban Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.236.574.378,42 atau sebesar 2,19% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

#### 8.1.2.5.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp653.956.945.688,00 dan Rp639.840.569.796,56. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	255.040.274.160,00	248.167.096.471,00	6.873.177.689,00	2,77
2	Beban Tunjangan Keluarga	22.297.525.913,00	21.865.596.332,00	431.929.581,00	1,98
3	Beban Tunjangan Jabatan	5.110.735.876,00	7.676.009.750,00	(2.565.273.874,00)	(33,42)
4	Beban Tunjangan Fungsional	21.329.458.775,00	18.605.633.450,00	2.723.825.325,00	14,64
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	2.735.531.851,00	2.427.057.260,00	308.474.591,00	12,71
6	Beban Tunjangan Beras	13.926.293.558,00	13.564.116.379,00	362.177.179,00	2,67
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	808.178.326,00	797.253.379,00	10.924.947,00	1,37
8	Beban Pembulatan Gaji	3.603.657,00	3.521.011,00	82.646,00	2,35
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	23.079.828.624,00	(23.079.828.624,00)	(100,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.795.767.496,00	0,00	20.795.767.496,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	525.785.207,00	0,00	525.785.207,00	0,00
12	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.562.879.316,00	0,00	1.562.879.316,00	0,00
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.353.008.250,00	0,00	1.353.008.250,00	0,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	215.039.065,00	0,00	215.039.065,00	0,00
15	Beban Uang Representasi DPRD	764.505.000,00	0,00	764.505.000,00	0,00
16	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	65.404.500,00	0,00	65.404.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
17	Beban Tunjangan Beras DPRD	81.979.440,00	0,00	81.979.440,00	0,00
18	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.108.532.250,00	0,00	1.108.532.250,00	0,00
19	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.713.439,00	0,00	111.713.439,00	0,00
20	Beban Uang Paket	66.559.500,00	66.244.500,00	315.000,00	0,48
21	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	7.174.921.553,00	(7.174.921.553,00)	(100,00)
22	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	67.652.286,00	0,00	67.652.286,00	0,00
23	Beban Uang Jasa Pengabdian	1.575.000,00	9.450.000,00	(7.875.000,00)	(83,33)
24	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00	0,00
25	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00
26	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	98.280.000,00	0,00
27	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.607.120,00	0,00	2.607.120,00	0,00
28	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.783.156,00	0,00	1.783.156,00	0,00
29	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
30	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.351.760,00	0,00	5.351.760,00	0,00
31	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	251.040,00	0,00	251.040,00	0,00
32	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	668.880,00	0,00	668.880,00	0,00
33	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.450.000,00	312.480.000,00	(30.000,00)	(0,01)
34	Tunjangan Profesi Guru PNSD	83.944.522.200,00	99.919.135.170,00	(15.974.612.970,00)	(15,99)
35	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	1.503.097.500,00	589.862.500,00	913.235.000,00	154,82
36	Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian	0,00	2.033.963.206,00	(2.033.963.206,00)	(100,00)
37	Tunjangan Transportasi	6.112.000.000,00	6.112.000.000,00	0,00	0,00
38	Tambahan Khusus Guru PNSD	269.775.000,00	238.676.400,00	31.098.600,00	13,03
39	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	1.543.500.000,00	1.514.100.000,00	29.400.000,00	1,94
40	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	998.460,00	0,00	998.460,00	0,00
41	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.374.193.904,00	0,00	6.374.193.904,00	0,00
42	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	186.014.882.695,00	105.921.966.479,00	80.092.916.216,00	75,62



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
43	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	7.028.229.355,00	6.581.767.346,00	446.462.009,00	6,78
44	Tunjangan Penghasilan PNS berbasis kinerja	0,00	59.540.934.078,56	(59.540.934.078,56)	(100,00)
45	Beban Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.129.900.000,00	6.100.500.000,00	29.400.000,00	0,48
46	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
47	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	492.003.000,00	2.019.625.000,00	(1.527.622.000,00)	(75,64)
48	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	67.907.073,00	225.972.908,00	(158.065.835,00)	(69,95)
49	Beban Pegawai BLUD	5.425.000.000,00	4.660.358.000,00	764.642.000,00	16,41
50	Beban Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	0,00	32.500.000,00	(32.500.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>653.956.945.688,00</b>	<b>639.840.569.796,56</b>	<b>14.116.375.891,44</b>	<b>2,21</b>

Realisasi Beban Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.116.375.891,44 atau sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya.

#### 8.1.2.5.2 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.714.598.060,22 dan Rp39.430.197.101,75. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut::

Tabel 138 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	6.173.039.676,48	8.907.239.760,84	(2.734.200.084,36)	(30,70)
2	Kertas dan Cover	1.346.781.561,60	0,00	1.346.781.561,60	100,00
3	Perabot Kantor	1.554.458.137,44	0,00	1.554.458.137,44	100,00
4	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.757.611.414,00	1.792.728.056,00	(35.116.642,00)	(1,96)
5	Perlengkapan Dinas	1.042.050.254,00	0,00	1.042.050.254,00	100,00
6	Pendukung Olah Raga	357.368.978,33	0,00	357.368.978,33	100,00
7	Suvenir/Cendera Mata	631.507.891,00	0,00	631.507.891,00	100,00
8	Benda Pos	242.688.006,00	355.997.000,00	(113.308.994,00)	(31,83)
9	Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.916.973.605,00	(1.916.973.605,00)	(100,00)
10	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.364.685.816,00	0,00	3.364.685.816,00	100,00
11	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	19.387.727,00	(19.387.727,00)	(100,00)
12	Pengisian Isi Tabung Gas	1.050.000,00	20.321.000,00	(19.271.000,00)	(94,83)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
13	Barang Cetak	54.545.100,00	689.905.810,00	(635.360.710,00)	(92,09)
14	Bahan-Bahan Baku	566.681.265,00	0,00	566.681.265,00	100,00
15	Bahan-Bahan Lainnya	(3.066.310.143,90)	0,00	(3.066.310.143,90)	(100,00)
16	Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.944.519.346,00	1.395.051.551,00	9.549.467.795,00	684,52
17	Bahan/Bibit Tanaman	134.169.935,00	215.374.319,00	(81.204.384,00)	(37,70)
18	Bibit Ternak	11.900.000,00	4.202.400,00	7.697.600,00	183,17
19	Bahan Obat-obatan	2.688.127.314,45	6.371.195.796,29	(3.683.068.481,84)	(57,81)
20	Obat-Obatan Lainnya	3.165.630.842,00	0,00	3.165.630.842,00	0,00
21	Bahan Kimia	827.633.042,50	4.701.262.439,50	(3.873.629.397,00)	(82,40)
22	Makanan dan Minuman Rapat	6.867.647.739,00	0,00	6.867.647.739,00	100,00
23	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.113.564.000,00	0,00	2.113.564.000,00	100,00
24	Penambah Daya Tahan Tubuh	927.091.500,00	0,00	927.091.500,00	100,00
25	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.740.848.540,00	0,00	5.740.848.540,00	100,00
26	Bahan Komputer	1.780.857.102,50	2.535.569.863,00	(754.712.760,50)	(29,77)
27	Hadiah dalam bentuk barang	0,00	852.829.221,00	(852.829.221,00)	(100,00)
28	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.381.586.050,00	(1.913.387.825,00)	3.294.973.875,00	(172,21)
29	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.216.748.452,00	0,00	7.216.748.452,00	100,00
30	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	70.470.000,00	0,00	70.470.000,00	100,00
31	Bahan	0,00	2.883.729.712,78	(2.883.729.712,78)	(100,00)
32	Suku Cadang	0,00	3.399.464.798,00	(3.399.464.798,00)	(100,00)
33	Suku Cadang Alat Angkutan	129.798.400,00	0,00	129.798.400,00	100,00
35	Suku Cadang Lainnya	7.528.724.102,82	0,00	7.528.724.102,82	100,00
36	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.561.389.713,00	5.056.836.848,34	(3.495.447.135,34)	(69,12)
37	Natura dan Pakan	212.225.575,00	36.676.554,00	175.549.021,00	478,64
38	Persediaan Penelitian	9.570.000,00	188.838.465,00	(179.268.465,00)	(94,93)
39	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	124.200.000,00	0,00	124.200.000,00	100,00
40	Pakaian Kerja Laboratorium	40.090.000,00	0,00	40.090.000,00	100,00
41	Pakaian Adat Daerah	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	100,00
42	Pakaian Batik Tradisional	135.582.200,00	0,00	135.582.200,00	100,00
43	Pakaian Olahraga	24.392.250,00	0,00	24.392.250,00	100,00
44	Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.498.000,00	0,00	3.498.000,00	100,00
45	Pipa-Pipa Lainnya	18.676.000,00	0,00	18.676.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>67.714.598.060,22</b>	<b>39.430.197.101,75</b>	<b>28.284.400.958,47</b>	<b>71,73</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi Beban Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp28.284.400.958,47 atau sebesar 71,73% dari tahun sebelumnya.

Penjelasan perbedaan antara Belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan Beban Persediaan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 139 Selisih Beban Persediaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan (1)	62.842.238.710,00
Beban Persediaan (2)	67.714.598.060,22
Saldo Awal Persediaan (3)	27.714.368.100,41
Saldo Akhir Persediaan (4)	22.842.008.750,19
<b>Selisih {5=1- (2+4-3)}</b>	0,00

8.1.2.5.3 BEBAN JASA

Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp343.585.705.542,38 dan Rp250.882.770.953,98. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 140 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Jasa telepon	858.804.744,00	364.075.670,00	494.729.074,00	135,89
2	Beban Jasa air	1.058.015.931,00	896.337.597,00	161.678.334,00	18,04
3	Beban Jasa listrik	14.174.133.565,00	11.863.679.277,00	2.310.454.288,00	19,48
4	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	181.395.220,00	1.971.040.600,00	(1.789.645.380,00)	(90,80)
5	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	3.830.707.296,00	4.594.747.920,00	(764.040.624,00)	(16,63)
6	Beban Jasa Paket/Pengiriman	22.876.896,00	1.838.450,00	21.038.446,00	1.144,36
7	Beban Jasa Transaksi Keuangan	14.678.955,00	13.993.201,00	685.754,00	4,90
8	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.186.163.600,00	0,00	1.186.163.600,00	100,00
9	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
10	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	34.861.500,00	0,00	34.861.500,00	100,00
11	Beban Jasa Kalibrasi	203.774.000,00	0,00	203.774.000,00	100,00
12	Beban Jasa Pengolahan Sampah	350.815.324,00	0,00	350.815.324,00	100,00
13	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.045.597.000,00	0,00	2.045.597.000,00	100,00
14	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	38.110.520.000,00	0,00	38.110.520.000,00	100,00
15	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	17.118.605.505,00	0,00	17.118.605.505,00	100,00
16	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	338.819.740,00	0,00	338.819.740,00	100,00
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.971.048.200,00	0,00	9.971.048.200,00	100,00
18	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.230.470.000,00	0,00	5.230.470.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
19	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	100,00
20	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	88.300.000,00	0,00	88.300.000,00	100,00
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	317.600.000,00	0,00	317.600.000,00	100,00
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	25.267.980.000,00	0,00	25.267.980.000,00	100,00
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	680.400.000,00	0,00	680.400.000,00	100,00
24	Beban Jasa Tenaga ahli/narasumber/instruktur	11.498.258.334,00	12.769.074.344,00	(1.270.816.010,00)	(9,95)
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	100,00
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.206.800.000,00	0,00	3.206.800.000,00	100,00
27	Beban Jasa Tenaga Supir	767.800.000,00	0,00	767.800.000,00	100,00
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	100,00
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	252.500.000,00	0,00	252.500.000,00	100,00
30	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	58.968.392,00	0,00	58.968.392,00	100,00
31	Beban Jasa Kantor	0,00	63.366.429.786,00	(63.366.429.786,00)	(100,00)
32	Beban Honorarium	0,00	30.914.235.700,00	(30.914.235.700,00)	(100,00)
33	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.142.365.000,00	0,00	3.142.365.000,00	100,00
34	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.082.263.007,00	0,00	5.082.263.007,00	100,00
35	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.466.523.141,00	0,00	2.466.523.141,00	100,00
36	Beban Honorarium Rohaniwan	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00	100,00
37	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	220.840.000,00	0,00	220.840.000,00	100,00
38	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	100,00
39	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
40	Beban Penambahan Daya	151.567.170,00	32.997.600,00	118.569.570,00	359,33
41	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.537.419,00	4.047.845,00	(510.426,00)	(12,61)
42	Beban Pengolahan Air Limbah	184.404.300,00	129.222.000,00	55.182.300,00	42,70
43	Beban Medical Check Up	57.957.000,00	40.997.406.423,00	(40.939.449.423,00)	(99,86)
44	Beban Registrasi/Keanggotaan	6.391.130,00	0,00	6.391.130,00	0,00
45	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	0,00	59.951.607.470,00	(59.951.607.470,00)	(100,00)
46	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	1.519.461.517,00	0,00	1.519.461.517,00	100,00
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	55.241.944.492,00	0,00	55.241.944.492,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
48	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	674.038.400,00	0,00	674.038.400,00	100,00
49	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.484.682.840,00	0,00	4.484.682.840,00	100,00
50	Beban Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	232.995.028,00	187.239.673,04	45.755.354,96	24,44
51	Beban Premi Asuransi Jaminan Kematian	292.698.100,00	231.243.732,94	61.454.367,06	26,58
52	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
53	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	187.100.000,00	362.855.000,00	(175.755.000,00)	(48,44)
54	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	109.880.000,00	744.918.650,00	(635.038.650,00)	(85,25)
55	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	78.278.400,00	0,00	78.278.400,00	100,00
56	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	160.000.000,00	800.000,00	159.200.000,00	19.900,00
57	Beban Sewa Bangunan Terbuka	624.172.000,00	0,00	624.172.000,00	100,00
58	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.662.398.120,00	(3.662.398.120,00)	(100,00)
59	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.431.127.000,00	0,00	2.431.127.000,00	100,00
60	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.043.295.091,00	0,00	2.043.295.091,00	100,00
61	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	100,00
62	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	9.100.000,00	(7.100.000,00)	(78,02)
63	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.554.000,00	0,00	34.554.000,00	100,00
64	Beban Sewa Mebel	200.832.550,00	0,00	200.832.550,00	100,00
65	Beban Sewa Alat Pendingin	22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	100,00
66	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	214.600.000,00	0,00	214.600.000,00	100,00
67	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	100,00
68	Beban Sewa Sumber Tenaga	94.150.000,00	0,00	94.150.000,00	100,00
69	Beban Sewa Peralatan Jaringan	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	100,00
70	Beban Sewa Meja Kursi	0,00	150.986.800,00	(150.986.800,00)	(100,00)
71	Beban Sewa Generator	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
72	Beban Sewa Sound system	0,00	18.500.000,00	(18.500.000,00)	(100,00)
73	Beban Sewa Peralatan/Perlengkapan lain-lain	0,00	619.871.180,00	(619.871.180,00)	(100,00)
74	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	5.691.473.100,00	(5.691.473.100,00)	(100,00)
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.616.057.015,00	(5.616.057.015,00)	(100,00)
76	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	1.024.724.350,00	(1.024.724.350,00)	(100,00)
77	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.401.671.600,00	96.500.000,00	4.305.171.600,00	4.461,32
78	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.419.761.062,00	1.139.183.000,00	2.280.578.062,00	200,19



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
79	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	26.400.000,00	(26.400.000,00)	(100,00)
80	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	56.430.000,00	317.610.500,00	(261.180.500,00)	(82,23)
81	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	46.742.150,00	0,00	46.742.150,00	100,00
82	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	100,00
83	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.940.592.024,00	2.548.173.174,00	1.392.418.850,00	54,64
84	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	205.001.250,00	0,00	205.001.250,00	100,00
85	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.250.950.000,00	0,00	3.250.950.000,00	100,00
86	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.667.500.000,00	0,00	1.667.500.000,00	100,00
87	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.705.400.000,00	27.500.000,00	5.677.900.000,00	20.646,91
88	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.743.999.698,00	404.999.976,00	3.338.999.722,00	824,44
89	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	120.502.800,00	(120.502.800,00)	(100,00)
90	Beban Barang dan Jasa BOS	27.527.531.405,00	0,00	27.527.531.405,00	100,00
91	Beban Barang dan Jasa BLUD	71.990.304.566,38	0,00	71.990.304.566,38	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>343.585.705.542,38</b>	<b>250.882.770.953,98</b>	<b>92.702.934.588,40</b>	<b>36,95</b>

Realisasi Beban Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp92.702.934.588,40 atau sebesar 36,95% dari tahun sebelumnya.

Antara Belanja Jasa dan Beban Jasa terdapat selisih sebesar Rp111.374.400,00 yang merupakan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa ke asset tetap Gedung dan bangunan. Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 141 Selisih Beban Jasa**

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa (1)	345.802.136.897,92
Beban Jasa (2)	343.585.705.542,38
Saldo Awal Utang Jasa Medis (3)	5.614.185.502,04
Saldo Akhir Utang Beban (4)	3.509.128.545,50
<b>Selisih {5=1- (2+3)+4}</b>	<b>111.374.400,00</b>

#### 8.1.2.5.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.165.504.058,00 dan Rp44.795.963.221,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 142 Rincian Beban Pemeliharaan**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	158.502.000,00	(158.502.000,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.387.510.351,00	11.181.651.056,00	(794.140.705,00)	(7,10)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.257.145.157,00	7.368.638.904,00	(6.111.493.747,00)	(82,94)
4	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	55.518.935.550,00	25.985.149.261,00	29.533.786.289,00	113,66
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.400.000,00	102.022.000,00	(99.622.000,00)	(97,65)
	<b>Jumlah</b>	<b>67.165.991.058,00</b>	<b>44.795.963.221,00</b>	<b>22.370.027.837,00</b>	<b>49,94</b>

Realisasi Beban Pemeliharaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.370.027.837,00 atau sebesar 49,94% dari tahun sebelumnya.

#### 8.1.2.5.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.122.102.741,00 dan Rp40.228.425.279,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

**Tabel 143 Rincian Beban Perjalanan Dinas**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.958.773.981,00	14.096.908.247,00	(138.134.266,00)	(0,98)
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.153.328.760,00	25.527.525.784,00	5.625.802.976,00	22,04
3	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	602.391.248,00	(602.391.248,00)	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000,00	1.600.000,00	8.400.000,00	525,00
	<b>Jumlah</b>	<b>45.122.102.741,00</b>	<b>40.228.425.279,00</b>	<b>4.893.677.462,00</b>	<b>12,16</b>

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.893.677.462,00 atau sebesar 12,16% dari tahun sebelumnya.

#### 8.1.2.5.6 BEBAN BARANG

Beban Barang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp131.025.337.576,41. Rincian Beban Barang adalah sebagai berikut:

**Tabel 144 Rincian Beban Barang**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Barang Dana BOS	0,00	32.532.379.983,00	(32.532.379.983,00)	(100,00)
2	Beban Makanan dan Minuman	0,00	21.882.300.550,00	(21.882.300.550,00)	(100,00)
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	189.033.000,00	(189.033.000,00)	(100,00)
4	Beban Pakaian Kerja	0,00	724.857.874,00	(724.857.874,00)	(100,00)
5	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	3.256.639.263,00	(3.256.639.263,00)	(100,00)
6	Beban barang dan jasa BLUD	0,00	68.269.265.906,41	(68.269.265.906,41)	(100,00)
7	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	251.370.000,00	(251.370.000,00)	(100,00)
8	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	2.344.046.000,00	(2.344.046.000,00)	(100,00)
9	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	1.575.445.000,00	(1.575.445.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>131.025.337.576,41</b>	<b>(131.025.337.576,41)</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Beban Barang Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp131.025.337.576,41 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya.

#### 8.1.2.5.7 BEBAN HIBAH

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan kelompok penerima Beban Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.321.201.603,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.691.496.964,00 Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut:

**Tabel 145 Rincian Beban Hibah**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	41.550.726.114,00	(41.550.726.114,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	9.779.072.300,00	(9.779.072.300,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	897.000.000,00	(897.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.920.000.000,00	0,00	1.920.000.000,00	100,00
5	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.268.021.000,00	0,00	1.268.021.000,00	100,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela	11.723.798.571,00	0,00	11.723.798.571,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
	dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.956.671.120,00	0,00	8.956.671.120,00	0,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.280.602.804,00	0,00	8.280.602.804,00	0,00
9	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.333.459.582,00	0,00	10.333.459.582,00	0,00
10	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	373.949.976,00	0,00	373.949.976,00	0,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.464.698.550,00	1.464.698.550,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.321.201.603,00</b>	<b>53.691.496.964,00</b>	<b>(9.370.295.361,00)</b>	<b>(30,88)</b>

Realisasi Beban Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.370.295.361,00 atau sebesar 30,88% dari tahun sebelumnya.

#### 8.1.2.5.8 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.416.500.000,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.250.290.000,00. Adapun Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 146 Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	1.600.000.000,00	(1.600.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	22.416.500.000,00	13.650.290.000,00	8.766.210.000,00	64,22
	<b>Jumlah</b>	<b>22.416.500.000,00</b>	<b>15.250.290.000,00</b>	<b>7.166.210.000,00</b>	<b>46,99</b>

Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.166.210.000,00 atau sebesar 46,99% dari tahun sebelumnya.

### 8.1.2.5.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2022 sebesar Rp242.528.344.798,91 dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp303.077.833.023,09.

#### 1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp241.648.364.857,84, sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp302.360.991.697,89. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

**Tabel 147 Rincian Beban Penyusutan**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.637.384.198,18	58.658.366.287,16	7.979.017.911,02	13,60
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.659.351.170,67	33.913.327.866,00	1.746.023.304,67	5,15
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	139.349.686.532,99	209.733.173.478,73	(70.383.486.945,74)	(33,56)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.942.956,00	56.124.066,00	(54.181.110,00)	(96,54)
	<b>Jumlah</b>	<b>241.648.364.857,84</b>	<b>302.360.991.697,89</b>	<b>(60.712.626.840,05)</b>	<b>(20,08)</b>

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp60.712.626.840,05 atau sebesar 20,08% dari tahun sebelumnya.

#### 2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi merupakan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp879.979.941,07 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp716.841.325,20. Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 148 Rincian Beban Amortisasi**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	879.979.941,07	716.841.325,20	163.138.615,87	22,76
	<b>Jumlah</b>	<b>879.979.941,07</b>	<b>716.841.325,20</b>	<b>163.138.615,87</b>	<b>22,76</b>

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp163.138.615,87 atau sebesar 22,76% dari tahun sebelumnya.

### 8.1.2.5.10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 dan perubahan ketiga Nomor 218 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada Tahun Anggaran 2017, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.796.434.962,30 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.344.293.329,47. Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

**Tabel 149 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	907.982.238,39	(373.705.976,50)	1.281.688.214,89	(342,97)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	74.056.945,00	57.346.454,00	16.710.491,00	29,14
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(30.000.000,00)	0,00	(30.000.000,00)	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.741.652.851,97	(2.741.652.851,97)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	2.990.064.400,00	0,00	2.990.064.400,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(171.252.254,64)	0,00	(171.252.254,64)	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	173.984.886,05	0,00	173.984.886,05	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	130.494.279,05	0,00
9	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	(100.000.000,00)	0,00	(100.000.000,00)	0,00
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	120.497,50	0,00	120.497,50	0,00
11	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(3.521.750,00)	0,00	(3.521.750,00)	0,00
12	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	(45.000.000,00)	(81.000.000,00)	36.000.000,00	(44,44)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.796.434.962,30</b>	<b>2.344.293.329,47</b>	<b>1.452.141.632,83</b>	<b>61,94</b>

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.452.141.632,83 atau sebesar 61,94% dari tahun sebelumnya.

#### 8.1.2.5.11 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.057.803.099,58 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.521.621.201,56. Rincian Beban Lain-Lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 150 Rincian Beban Lain-Lain**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	2.813.387.234,58	3.696.370.669,69	(882.983.435,11)	(23,89)
2	Beban Ekstrakomtabel (Lain-Lain)	0,00	825.250.531,87	(825.250.531,87)	(100,00)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
3	Beban Lain-lain	1.244.415.865,00	0,00	1.244.415.865,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.057.803.099,58</b>	<b>4.521.621.201,56</b>	<b>(463.818.101,98)</b>	<b>(10,26)</b>

Realisasi Beban Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp463.818.101,98 atau sebesar 10,26% dari tahun sebelumnya.

#### 8.1.2.5.12 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.136.253.140,00,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp120.224.510.660,00. Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sesuai Penerapan Bultek 21 Beban Transfer Dana Desa (Non Provinsi) tidak diakui dalam Laporan Operasional (LO). Rincian Beban Transfer adalah sebagai berikut:

**Tabel 151 Rincian Beban Transfer**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.100.025.000,00	4.161.500.000,00	(61.475.000,00)	(1,48)
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	115.040.966.190,00	115.040.966.190,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
4	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	795.261.950,00	1.022.044.470,00	(226.782.520,00)	(22,19)
	<b>Jumlah</b>	<b>120.136.253.140,00</b>	<b>120.224.510.660,00</b>	<b>(88.257.520,00)</b>	<b>(0,07)</b>

Realisasi Beban Transfer Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp88.257.520,00 atau sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya.

#### 8.1.2.6 DEFISIT NON OPERASIONAL

Beban Defisit Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.651.798.009,56 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 152 Rincian Beban Defisit Non Operasional**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	9.651.798.009,56	0,00	9.651.798.009,56	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.651.798.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651.798.009,56</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Beban Defisit Non Operasional Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.651.798.009,56 atau 100,00% dari tahun sebelumnya.

### 8.1.2.7 BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp746.426.000,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.471.571.965,00. Beban Tak Terduga tahun 2022 yang dialokasikan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, Beban Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 153 Rincian Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Tak Terduga	746.426.000,00	6.471.571.965,00	(5.725.145.965,00)	(88,47)
	<b>Jumlah</b>	<b>746.426.000,00</b>	<b>6.471.571.965,00</b>	<b>(5.725.145.965,00)</b>	<b>(88,47)</b>

Realisasi Tak Terduga Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.725.145.965,00 atau sebesar 88,47% dari tahun sebelumnya.

### 8.1.3 LAPORAN ARUS KAS

#### 8.1.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN ARUS KAS

##### 8.1.3.1.1 TUJUAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk, arus kas keluar, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi pada tanggal pelaporan.

##### 8.1.3.1.2 DEFINISI

- 1) Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.
- 2) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- 3) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

##### 8.1.3.1.3 AKTIVITAS ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

**Aktivitas Operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan/ arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan pajak daerah, penerimaan transfer pusat, dan penerimaan transfer provinsi. Sedangkan pengeluaran/ arus keluar kas dari aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

**Aktivitas Investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

**Aktivitas Pendanaan** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

**Aktivitas Transitoris** merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

### 8.1.3.2 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
(Rp)	(Rp)
<b>2.159.068.634.674,87</b>	<b>1.522.630.088.767,55</b>

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasi pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

**Tabel 154 Masuk Kas Aktivitas Operasi**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	45.363.440.225,80	43.638.422.656,00	1.725.017.569,80	3,95
2	Penerimaan Retribusi Daerah	6.971.598.007,00	5.743.153.528,80	1.228.444.478,20	21,39
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.010.810.384,00	9.836.676.685,00	1.174.133.699,00	11,94
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	130.373.140.712,07	146.646.076.076,75	(16.272.935.364,68)	(11,10)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	936.789.879.264,00	360.227.578.392,00	576.562.300.872,00	160,06
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	491.839.636.893,00	494.306.446.000,00	(2.466.809.107,00)	(0,50)
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	238.521.509.965,00	191.366.167.545,00	47.155.342.420,00	24,64
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00	(8.729.493.000,00)	(45,77)
9	Penerimaan Dana penyesuaian -Dana Alokasi Desa	104.093.790.400,00	109.494.413.000,00	(5.400.622.600,00)	(4,93)
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	181.618.220.753,00	99.282.497.314,00	82.335.723.439,00	82,93
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	700.000.000,00	(700.000.000,00)	(100,00)
12	Penerimaan Hibah	2.143.662.071,00	3.203.438.570,00	(1.059.776.499,00)	(33,08)
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	39.112.780.000,00	(39.112.780.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.159.068.634.674,87</b>	<b>1.522.630.088.767,55</b>	<b>636.438.545.907,32</b>	<b>41,80</b>

### 8.1.3.3 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
(Rp)	(Rp)
<b>1.466.604.325.738,92</b>	<b>1.450.969.138.478,00</b>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

**Tabel 155 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pembayaran Pegawai	653.956.945.688,00	639.840.569.796,56	14.116.375.891,44	2,21
2	Pembayaran Barang dan Jasa	520.933.208.907,92	505.996.286.092,44	14.936.922.815,48	2,95
3	Pembayaran Hibah	44.321.201.603,00	53.691.496.964,00	(9.370.295.361,00)	(17,45)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	22.416.500.000,00	15.250.290.000,00	7.166.210.000,00	46,99
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	219.334.756.590,00	224.535.379.190,00	(5.200.622.600,00)	(2,32)
6	Pembayaran Tak Terduga	746.426.000,00	6.471.571.965,00	(5.725.145.965,00)	(88,47)
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.100.025.000,00	5.183.544.470,00	(1.083.519.470,00)	(20,90)
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	795.261.950,00	0,00	795.261.950,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.466.604.325.738,92</b>	<b>1.450.969.138.478,00</b>	<b>15.635.187.260,92</b>	<b>1,08</b>

**8.1.3.4 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>171.026.425,00</u>	<u>95.180.000,00</u>

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

**Tabel 156 Arus Masuk Kas Investasi**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	171.026.425,00	271.301.749,00	(100.275.324,00)	(36,96)
2	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	95.180.000,00	(95.180.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>171.026.425,00</b>	<b>366.481.749,00</b>	<b>(195.455.324,00)</b>	<b>(53,33)</b>

**8.1.3.5 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>397.257.596.454,00</u>	<u>458.098.788.114,83</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap setara investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 157 Arus Keluar Kas Investasi

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(100,00)
2	Perolehan Tanah	240.492.000,00	2.897.145.120,00	(2.656.653.120,00)	(91,70)
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	91.151.091.039,00	87.589.675.673,00	3.561.415.366,00	4,07
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	104.788.622.560,00	125.469.046.825,83	(20.680.424.265,83)	(16,48)
5	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.681.712.555,00	226.307.789.870,00	(25.626.077.315,00)	(11,32)
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	395.678.300,00	835.130.626,00	(439.452.326,00)	(52,62)
7	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Perolehan Aset Tetap-BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>397.257.596.454,00</b>	<b>458.098.788.114,83</b>	<b>(60.841.191.660,83)</b>	<b>(13,28)</b>

8.1.3.6 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN

<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<u><u>6.335.623.100,00</u></u>	<u><u>5.759.078.400,00</u></u>

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

**Tabel 158 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	6.004.455.100,00	5.747.184.400,00	257.270.700,00	4,48
2	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	331.168.000,00	11.894.000,00	319.274.000,00	2684,33
	<b>Jumlah</b>	<b>6.335.623.100,00</b>	<b>5.759.078.400,00</b>	<b>576.544.700,00</b>	<b>10,01</b>

### 8.1.3.7 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u><u>75.000.000.000,00</u></u>	<u><u>5.000.000.000,00</u></u>

Arus kas keluar dari aktifitas pendanaan/pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 terdiri atas:

**Tabel 159 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
2	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	0,00	40.000.000.000,00	100,00
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>70.000.000.000,00</b>	<b>1.400,00</b>

### 8.1.3.8 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u><u>95.613.172.096,80</u></u>	<u><u>107.164.053.516,98</u></u>

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

**Tabel 160 Arus Masuk Kas Transitoris**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	95.613.172.096,80	107.164.053.516,98	(11.550.881.420,18)	(10,78)
	Jumlah	95.613.172.096,80	107.164.053.516,98	(11.550.881.420,18)	(10,78)

**8.1.3.9 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u><u>95.613.172.096,80</u></u>	<u><u>107.164.053.516,98</u></u>

Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp95.613.172.096,80 dan Rp107.164.053.516,98 terjadi penurunan pada Tahun 2022 sebesar Rp11.550.881.420,18 atau sebesar 10,78%.

**8.1.3.10 KENAIKAN/PENURUNAN KAS**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u><u>226.713.362.006,95</u></u>	<u><u>(385.312.277.676,28)</u></u>

Kenaikan atau penurunan kas adalah jumlah semua arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp692.464.308.935,95 mengalami kenaikan sebesar Rp620.803.358.646,40 dari tahun 2021. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan sebesar – Rp397.086.570.029,00 mengalami kenaikan sebesar Rp60.645.736.336,83 dari tahun 2021, sedangkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp67.905.298.500,00 dari tahun 2021.

**8.1.3.11 SALDO AWAL KAS**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u><u>604.990.188.933,83</u></u>	<u><u>990.302.466.610,11</u></u>

Saldo awal kas Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

**Tabel 161 Saldo Awal Kas**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Daerah - Bank Kalsel	541.773.574.626,45	962.569.200.331,74	(420.795.625.705,29)	(43,72)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	10.138.500,00	(10.138.500,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
4	Kas Di Dana Kapitasi JKN	0,00	4.678.516.301,00	(4.678.516.301,00)	(100,00)
5	Kas Badan Layanan Umum Daerah	59.162.059.397,36	20.437.482.956,35	38.724.576.441,01	189,48
6	Kas di Bendahara BOS	4.054.554.910,02	2.607.128.521,02	1.447.426.389,00	55,52
	<b>Jumlah</b>	<b>604.990.188.933,83</b>	<b>990.302.466.610,11</b>	<b>(385.312.277.676,28)</b>	<b>(38,91)</b>

### 8.1.3.12 SALDO AKHIR KAS

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>831.703.550.940,78</b>	<b>604.990.188.933,83</b>

Saldo akhir Kas Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp831.703.550.940,78 dan Rp604.990.188.933,83. Kas tersebut berada dalam penguasaan BUD, Bendahara BLUD, dan Bendahara di sekolah-sekolah penerima BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 162 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Daerah - Bank Kalsel	762.266.975.672,06	541.773.574.626,45	220.493.401.045,61	40,70
2	Kas Badan Layanan Umum Daerah	65.761.548.698,67	59.162.059.397,36	6.599.489.301,31	11,15
3	Kas Di Dana BOS	3.626.594.575,05	4.054.554.910,02	(427.960.334,97)	(10,56)
4	Kas Lainnya	48.431.995,00	0,00	48.431.995,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>831.703.550.940,78</b>	<b>604.990.188.933,83</b>	<b>226.713.362.006,95</b>	<b>37,47</b>

### 8.1.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.991.132.313.394,95 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2022 sebesar Rp4.230.967.002.274,38 ditambah Surplus LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp686.444.180.363,69 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.721.130.756,88.

#### 8.1.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.230.967.002.274,38. Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2021..

#### 8.1.4.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2022

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp686.444.180.363,69 berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2022. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

### 8.1.4.3 DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp73.721.130.756,88, Rincian untuk masing masing koreksi ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 163 Koreksi Ekuitas**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Koreksi ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi	282,00	0,00
2	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	24.562.414,50	0,00
3	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	22.156.838.543,97	72.738.706.474,39
5	Koreksi Ekuitas – Lainnya	(4.760.500,00)	0,00
6	Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	837.319.999,93	(10.224.005.230,91)
7	Koreksi ekuitas -Kewajiban jangka pendek lainnya	47.005.094.283,21	0,00
8	Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang	2.777.835.329,48	
9	Koreksi ekuitas -Pendapatan di Terima di Muka	(4.169.512,00)	0,00
10	Koreksi ekuitas - Piutang	928.409.915,79	5.222.926.694,61
	<b>Jumlah Koreksi Ekuitas</b>	<b>73.721.130.756,88</b>	<b>67.737.627.938,09</b>

**Tabel 164 Rincian Koreksi Ekuitas**

No.	Uraian	Koreksi		Keterangan
		Kurang	Tambah	
1	Koreksi Ekuitas-Piutang	2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Panyipatan
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Padang Luas
		5.800,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Sungai Cuka
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Tambang Ulang
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Tanjung Habulu
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Takisung
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Kait Kait
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Asam Asam



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Koreksi		Keterangan
		Kurang	Tambah	
		28.750.000,00		Koreksi Pengurangan Piutang Sapi Betina selisih harga jual dengan harga pokok
			1.254.629.730,79	Koreksi Saldo Awal Piutang DBH Provinsi
		297.290.000,00		Koreksi Ekuitas Sapi Betina
		153.715,00		Koreksi Ekuitas Piutang
2	Koreksi Ekuitas-Penyisihan Piutang		24.562.414,50	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Temuan Inspektorat atas Dana BOS pada Dinas Pendidikan
3	Koreksi Ekuitas-Lainnya		739.500,00	Koreksi selisih SILPA
		5.500.000,00		Koreksi Ekuitas Pengurangan INP Sapi jantan
4	Koreksi Ekuitas-Utang jangka pendek lainnya	34.131.450,21		Koreksi Saldo Awal Utang PKM Batakan
		10.032.369,63		Koreksi Saldo Awal Utang PKM Sungai Riam
		33.877.318.287,00		Koreksi Saldo Awal Utang Utang DBH Pusat
		16.044.634,76		Koreksi Saldo Awal Utang PKMTajau Pecah
			2.096.188,00	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Angsau
			2.602.457,20	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Bumi Makmur
			6.824.281,38	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Jorong
			12.965.835,51	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Kurau
			9.882.497,54	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Panyipatan
			581.106,73	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Padang Luas
			1.221.073,50	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Pelaihari
			1.210.557,87	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Tambang Ulang
			1.600.000,00	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Tanjung Habulu
			1.947.552,38	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Kintap



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Koreksi		Keterangan
		Kurang	Tambah	
			4.216.551,70	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Sungai Cuka
			80.897.472.923,00	Koreksi Ekuitas DBH Pusat
5	Koreksi Ekuitas Investasi Jangka Panjang		2.777.835.329,48	Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal
6	Koreksi Ekuitas-Pendapatan di terima di muka	4.169.512,00		Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka
7	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	4.595.611.083,10	-	Koreksi tambah aset tetap
			17.940.355.140,07	Koreksi Kurang Aset tetap
		29.285.671.990,00		pengurangan aset tetap KIB D pada DPUPRP
			29.285.671.990,00	penambahan aset tetap KIB D pada DPUPRP
		5.540.602.000,00		pengurangan KIB D jaringan pembawa pada DPUPRP
			5.354.622.292,35	penambahan KIB D jaringan pembawa pada DPUPRP
			185.979.707,65	penambahan KIB C Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga pada DPUPRP
		4.355.315.500,00		pengurangan aset tetap KIB D pada DPUPRP
			2.500.479.987,00	penambahan KIB D jaringan pembawa pada DPUPRP
			10.666.930.000,00	reklasifikasi koreksi ekuitas lainnya ke koreksi ekuitas aset tetap pada PKM asam2, PPKD, Diskominfo dan Diskopdag
8	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	6.500.000,00		Koreksi atas double pencatatan pada PKM Tajau Pecah
			0,60	Koreksi tambah saldo awal atas aset lain-lain
		0,67		Koreksi kurang saldo awal atas aset lain-lain
			50.000.000,00	penambahan ATB pada BPKAD
			150.000.000,00	penambahan ATB pada Dispusip
			493.820.000,00	penambahan ATB pada DPUPRP
			150.000.000,00	penambahan ATB pada Setda
9	Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		362,00	Koreksi tambah saldo awal atas akumulasi penyusutan
		80,00		Koreksi kurang saldo awal atas akumulasi penyusutan
	<b>Jumlah</b>	<b>78.057.116.722,37</b>	<b>151.778.247.479,25</b>	



**BAB IX**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**9.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

**9.1.1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BANK KALSEL**

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kalsel untuk Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa (LB) tahun 2022 dilaksanakan tanggal 8 Februari 2023 di Banjarmasin yang dihadiri seluruh Pemegang Saham Bank Kalsel baik Gubernur, Bupati/Walikota dan Perwakilan dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan *Dividen* sebesar Rp11.394.363.814,00 dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13 Februari 2023.

**9.1.2 BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Pada tahun 2023 diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi meliputi Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 08 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 165 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Uraian	Nomor Peraturan Gubernur	Nilai Yang Disalurkan
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pergub Nomor 06 Tahun 2023	40.726.078.694,99
2	Pajak Rokok	Pergub Nomor 07 Tahun 2023	3.390.735.535,00
3	Pajak Air Permukaan	Pergub Nomor 08 Tahun 2023	224.920.418,02
<b>Jumlah</b>			<b>44.341.734.648,01</b>



## BAB X PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2021 realisasi penerimaan pendapatan daerah telah terlampaui dari target yang ditetapkan dan terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu, LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.740.032.489.864,00 dan terealisasi sebesar Rp2.159.239.661.099,87 atau 124,09%. Belanja dianggarkan sebesar Rp1.897.683.755.305,00 yang terealisasi sebesar Rp1.639.631.878.652,92 atau 86,40%. Transfer dianggarkan Rp224.470.023.140,00 yang terealisasi Rp224.230.043.540,00 atau 99,89%. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp610.990.188.934,00 dan terealisasi sebesar Rp611.325.812.033,83 atau 100,05%. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp75.000.000.000,00 atau 100,00%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp536.325.812.033,83. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.



BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA